



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024



Hasan Ali Bassam Kasuba
Bupati Halmahera Selatan



Helmi Umar Muchsin
Wakil Bupati Halmahera Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan prinsip Good Governance. Laporan ini juga merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Laporan ini disusun sesuai Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan dan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ini tidak terlepas dari Kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah pusat dan daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan sangat dibutuhkan sebagai masukan dalam memperbaiki kinerja kedepan. Besar harapan kami bahwa laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sarana informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat taufik, hidayah, dan inayah serta perlindungan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Labuha, 17 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA SELATAN


HASAN ALI BASSAM KASUBA

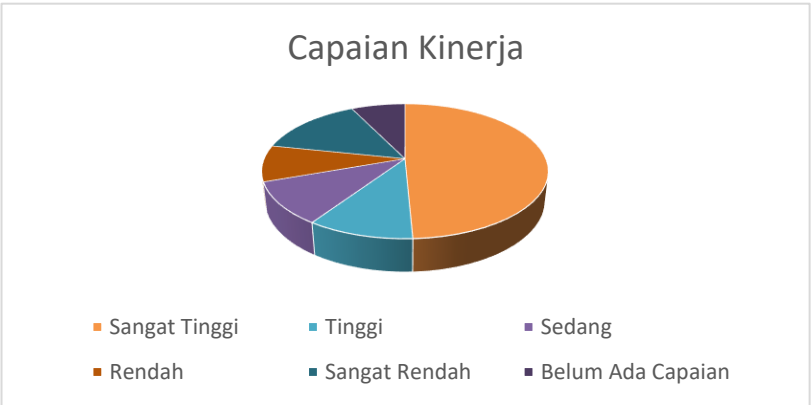
IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran tahun 2024 melalui indikator-indikator sasaran utama menunjukkan keberhasilan yang baik dalam upaya Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, terhadap 36 sasaran dengan 69 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kriteria sebagai berikut:

- 34 Indikator atau 49,28% Kategori Sangat Tinggi (Capaian $91\% \leq 100\%$)
- 7 Indikator atau 10.14% Kategori Tinggi (Capaian $76\% \leq 76\%$);
- 7 Indikator atau 10.14% Kategori Sedang (Capaian $66\% \leq 75\%$)
- 6 Indikator atau 8.70% Kategori Rendah (Capaian $51\% \leq 65\%$)
- 10 Indikator atau 14.49% Kategori Sangat Rendah (Capaian $\leq 50\%$)
- 5 Indikator atau 7,25% Kategori Belum Ada Capaian (Belum dapat diukur)



Pencapaian target indikator kinerja pemerintah Kabupaten halmahera Selatan yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan kantor serta Kecamatan didukung dengan alokasi anggaran dalam APBD-P Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.248.506.173.551,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.805.753.289.134,10 atau 80,31%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45

 3.1 CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 45

 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 53

 3.3 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG
 TARGET KINERJA 165

 3.4 ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER
 DAYA 173

BAB IV PENUTUP 175

LAMPIRAN

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

 2. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

 3. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, Meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian instruksi Presiden diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar Good Governance antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang terbentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 bersamaan dengan Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan berada di kota Labuha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.779,32 km² dan berpenduduk

sebanyak 253.487 jiwa (2022), ada enam pulau utama diantara pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu pulau Obi, pulau Bacan, pulau Makian, pulau Kayoa, pulau Kasiruta dan pulau Mandioli sedangkan sisanya berada di bagian selatan semenanjung Pulau Halmahera.

Sebagai wilayah kepulauan maka topografi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 61,1 persen tergolong lahan agak curam (derajat kemiringan 15-40%). Hanya 38,9 persen saja tergolong datar dan landai yang banyak terdapat di wilayah pesisir sehingga semakin ke dalam dan jauh dari pantai maka kebanyakan lahannya berbukit-bukit. Kabupaten Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya serta semenanjung Halmahera bagian Selatan. Selain itu Kabupaten Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim yaitu Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April. Sedangkan Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

1.2.1 Arti Lambang

Gambar 1
Lambang Kabupaten Halmahera Selatan



Lambang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan bernama “Saruma” yang bermakna tekad segenap unsur masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mewujudkan semangat kebersamaan, kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat demi keutuhan dan kemakmuran Kabupaten Halmahera Selatan ke depan.

Bentuk dasar lambang daerah adalah “Perisai Bersudut Lima” mencerminkan kebulatan tekad seluruh komponen masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadapi segala macam ancaman, tantangan, halangan dan gangguan dari manapun terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Arti dan makna lambang-lambang yang terdapat dalam Lambang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

- Perisai bersudut lima dengan warna dasar biru bermakna laut sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dimana luas wilayah laut lebih dominan, dan laut bukan sebagai pemisah tetapi penghubung.
- Warna putih mengelilingi sisi luar perisai bermakna bersih, suci lahiriah dan batiniah, memberikan prinsip kepada seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan secara utuh dalam rangka membangun Kabupaten Halmahera Selatan dengan landasan keimanan yang bersih dan suci.
- Bintang berwarna keemasan bermakna masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan sebagai masyarakat yang religius serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Sembilan helai daun sagu berwarna hijau dan enam buah cengkih berwarna kuning bermakna Tanggal 9 Bulan 6 atau Bulan Juni (Tahun 2003) sebagai awal aktivitas

pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan.

- Dilambangkan dengan Sagu dan Cengkih, karena sagu merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Daun Sagu berwarna hijau melambangkan kesejahteraan. Selain itu dari pendekatan historis, pada zaman kerajaan Maloko Kie Raha yang terdiri atas empat kerajaan yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Kerajaan bacan merupakan kerajaan yang menyediakan dan mendistribusikan bahan makanan/logistic (Sagu) bagi ketiga kerajaan lainnya. Sedangkan
- Cengkih merupakan komoditas perkebunan khas di Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bidang cakrawala berwarna biru muda diantara Sembilan daun sagu bermakna keluesan wawasan dan kejernihan pikiran. Mencerminkan harapan yang besar dari seluruh masyarakat.

1.2.2 Kondisi Geografis

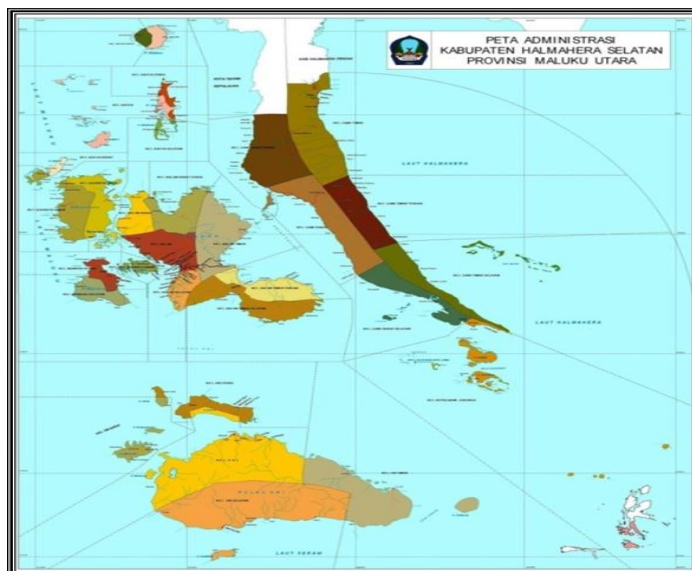
Kabupaten Halmahera Selatan secara astronomis terletak diantara 126°.45' Bujur Timur - 129°.30' Bujur Timur dan 0°.30' Lintang Utara - 2°.00' Lintang Selatan dan secara geografis dibatasi :

- Sebelah Utara dengan Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Sebelah Selatan dengan Laut Seram;
- Sebelah Timur dengan Laut Halmahera
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 Km², terdiri dari luas lautan 31.484,40 Km² (78%) dan luas daratan 8.779, 32 Km² (22%). Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 371 pulau dan diantara pulau-pulau tersebut hanya 41 pulau yang berpenghuni. Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan berdiam di wilayah pantai/pesisir yakni sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya berdiam di daerah pedalaman.

Adapun wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Selatan



1.2.3 Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Selatan

NO	KECAMATAN	Ibu Kota	Jumlah		Luas	
			Desa	RT/SLS	Ha	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Kec. Bacan	Labuha	14	68	28,138	3.47
2	Kec. Bacan Selatan	Mandaong	10	54	15,627	1.93
3	Kec. Bacan Timur	Babang	10	35	42,804	5.28
4	Kec. Bacan Timur Selatan	Wayaua	7	23	29,656	3.66
5	Kec. Bacan Timur Tengah	Bibinoi	7	24	25,514	3.15
6	Kec. Obi Selatan	Wayaloar	8	19	100,059	12.34
7	Kec. Obi	Laiwui	9	23	99,105	12.22
8	Kec. Obi Barat	Jikohai	6	9	8,730	1.08
9	Kec. Obi Timur	Sum	4	12	58,756	7.25
10	Kec. Obi Utara	Madapolo	7	33	14,840	1.83
11	Kec. Mandioli Selatan	Jiko	6	16	12,819	1.58
12	Kec. Mandioli Utara	Indong	6	21	8,939	1.1
13	Kec. Kepulauan Botang Lomang	Bajo	8	31	5,154	0.64
14	Kec. Bacan Barat	Indari	7	22	16,695	2.06
15	Kec. Kasiruta Barat	Palamea	10	30	25,210	3.11
16	Kec. Kasiruta Timur	Loleojaya	8	19	22,896	2.82
17	Kec. Bacan Barat Utara	Yaba	8	18	24,467	3.02
18	Kec. Kayoa	Guruapin	14	53	8,092	1
19	Kec. Kayoa Barat	Busua	4	24	2,500	0.31
20	Kec. Kayoa Selatan	Laluin	6	21	2,407	0.3
21	Kec. Kayoa Utara	Laromabati	6	16	3,622	0.45
22	Kec. Pulau Makian	Kota	15	59	5,125	0.63
23	Kec. Makian Barat	Mateketen	7	23	3,282	0.4
24	Kec. Gane Barat	Saketa	10	38	45,590	5.62
25	Kec. Gane Barat Selatan	Gane Dalam	8	16	23,323	2.88
26	Kec. Gane Barat Utara	Dolik	12	30	46,331	5.71
27	Kec. Kep Joronga	Kukupang	7	20	13,754	1.7
28	Kec. Gane Timur	Maffa	12	58	60,648	7.48
29	Kec. Gane Timur Tengah	Bisui	8	22	28,598	3.53
30	Kec. Gane Timur Selatan	Gane Luar	5	16	28,089	3.46
JUMLAH			249	853	877,932	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halsel Tahun 2023

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan pada akhir Tahun 2023 berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak **255.384** jiwa. Kecamatan Bacan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni **28.468** jiwa, sedangkan Kecamatan Kayoa Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk

terkecil yakni 2.813 jiwa. Adapun data penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Pada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		L	P	JML	
	HALMAHERA SELATAN	132.117	124.851	256.968	71,375
1	PULAU MAKIAN	4.441	4.337	8.778	2,449
2	KAYOA	4.378	4.286	8.664	130
3	GANE TIMUR	5.090	4.643	9.733	354
4	GANE BARAT	5.015	4.883	9.898	492
5	OBI SELATAN	8.172	7.366	15.538	4,346
6	OBI	9.488	8.844	18.332	5,220
7	BACAN TIMUR	6.998	6.736	13.734	3,843
8	BACAN	14.766	13.980	28.746	8,213
9	BACAN BARAT	2.386	2.283	4.669	1,232
10	MAKIAN BARAT	1.902	1.724	3.626	1,079
11	KAYOA BARAT	2.115	2.006	4.121	1,108
12	KAYOA SELATAN	3.370	3.288	6.658	1,844
13	KAYOA UTARA	1.398	1.391	2789	747
14	BACAN BARAT UTARA	2.681	2.476	5.157	1,354
15	KASIRUTA BARAT	3.091	2.923	6.014	1,579
16	KASIRUTA TIMUR	2577	2.462	5.039	71,375
17	BACAN SELATAN	11.085	10,460	21,545	1,326
18	KEPULAUAN BOTANGLOMANG	4,061	3,762	7,823	6,050
19	MANDIOLI SELATAN	3,769	3,505	7,274	2,020
20	MANDIOLI UTARA	1,921	1,906	3,827	1,897
21	BACAN TIMUR SELATAN	4,382	4,044	8,426	1,055
22	BACAN TIMUR TENGAH	3,409	3,197	6,606	2,269
23	GANE BARAT SELATAN	3,599	3,385	6,984	1,829
24	GANE BARAT UTARA	3,625	3,621	7,246	1,944
25	KEPULAUAN JORONGA	3,632	3,492	7,124	2,009
26	GANE TIMUR SELATAN	2,060	1,940	4,000	1,847
27	GANE TIMUR TENGAH	2,337	2,299	4,636	1,145
28	OBI BARAT	3,051	2,714	5,765	1,330
29	OBI TIMUR	2,106	1,961	4,067	1,496
30	OBI UTARA	5,212	4,937	10,149	1,184

Sumber Data : DISDUKAPIL KAB. HALSEL TAHUN 2024

Adapun data penduduk menurut umur dan jenis kelamin per kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk/Population		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	6844	6165	13009
5-9	11927	11329	23256
10-14	13618	12980	26598

Kelompok Umur	Penduduk/Population		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	15610	14655	30265
20-24	16214	14816	31030
25-29	13298	12176	25474
30-34	9397	9205	18602
35-39	8944	9115	18059
40-44	8674	8552	17226
45-49	7348	7339	14687
50-54	6267	5894	12163
55-59	4550	4294	8844
60-64	3692	3370	7062
65-69	2469	2324	4793
70-74	1824	1420	3244
75+	1441	1215	2656

Sumber Data : DISDUKCAPIL KAB. HALSEL TAHUN 2024

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat di pakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu tahun 2023-2024. Angka IPM Halmahera Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Halmahera Selatan mencapai 65,83. Sedangkan di tahun 2024 IPM Halmahera Selatan kembali meningkat menjadi 66,66 dan masuk dalam kategori IPM sedang.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kab. Halmahera Selatan	65,83	66,66
2	Tingkat Provinsi Maluku Utara	70,21	71,03
3	Tingkat Nasional	73,55	74,20

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan

sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Secara umum, kemiskinan dapat dikatakan juga yaitu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan kata lain konsep Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin disuatu daerah kabupaten/kota. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Untuk mengetahui angka kemiskinan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 dapat terlihat pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Selatan			
No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kab. Halmahera Selatan (%)	5,68	5,63
2	Kab. Halmahera Selatan (Ribu Orang)	13,65	13,69
3	Provinsi Maluku Utara (%)	6,46	6,32
4	Nasional (%)	9,36	9,03

c. **Angka Pengangguran**

Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pengangguran terbuka di negeri ini, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi. Pengangguran terbuka Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebesar 2,00 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,44 persen.

Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Selatan

No	Tingkat Pengangguran	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Halmahera Selatan	2,44	2,00
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Maluku Utara (%)	4,31	4,03
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91

d. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan terus menunjukkan laju positif. Hal ini mengindikasikan bahwa selama rentang waktu tersebut, perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami pelambatan dengan nilai pertumbuhan 14,24 persen, namun pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan meningkat signifikan menjadi 21,38 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 kembali mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 27,78 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi pertambangan beserta hasil olahannya dan peningkatan aktivitas transportasi. Untuk tahun 2024 belum ada rilis.

Tabel 1.7

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Halmaherah Selatan ,2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.15	0.90	0.91	3.81	1.37
B	Pertambangan dan Penggalian	47.16	12.61	36.00	21.97	39.51
C	Industri Pengolahan	14.28	67.80	26.98	43.25	47.13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.29	2.90	9.59	3.61	3.29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daurb Ulang	5.33	4.65	5.66	1.19	2.13
F	Konstruksi	16.72	2.73	-6.95	6.33	-2.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.04	-0.23	0.23	4.10	4.23
H	Transportasi dan Pergudangan	4.34	-9.85	0.03	22.74	3.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.88	-2.28	5.32	1.02	0.35
J	Informasi dan Komunikasi	4.85	5.01	7.03	3.58	0.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.15	5.84	9.05	3.63	4.69
L	Real Estate	4.86	0.98	2.24	1.49	5.75
M,N	Jasa Perusahaan	3.40	-1.21	5.21	5.32	1.08
O	Administrasi Pemerintahan, Perawatanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.03	-299	0.42	0.42	2.01
P	Jasa Pendidikan	5.20	0.09	4.35	3.16	2.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.63	7.20	4.57	2.65	3.07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7.45	1.63	1.99	5.95	2.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.15	17.64	14.22	21.38	27.78

Sumber Data : BPS Kab. Halsel Tahun 2024

e. Gini Ratio

Informasi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan dapat di lihat melalui perkembangan gini ratio. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023), ketimpangan pendapatan di Kabupaten Halmahera Selatan cenderung mengalami fluktuasi namun masih dalam kategori ketimpangan sedang. Beberapa faktor penyebab tinggi dan rendahnya ketimpangan pendapatan adalah faktor pendidikan, penurunan produktifitas, dan peningkatan investasi. Untuk tahun 2024 belum ada rilis. Secara spesifik, tren ketimpangan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan di tampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.8
Perkembangan Rasio Gini Menurut Kabupataen/Kota Dalam Wilayah
Provinsi Maluku Utara, 2021-2023

No	Wilayah	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan			
		2021	2022	2023	Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Halmahera barat	0.275	0.246	0.264	7.32
2	Halmahera tengah	0.265	0.286	0.300	4.90
3	Kepulauan sula	0.244	0.282	0.261	-7.45
4	Halmahera selatan	0.271	0.240	0.239	-0.42
5	Halmahera utara	0.274	0.234	0.279	19.23
6	Halmahera timur	0.258	0.247	0.297	20.24
7	Pulau morotai	0.294	0.266	0.301	13.16
8	Pulau taliabu	0.247	0.238	0.284	19.33
9	Ternate	0.260	0.305	0.294	-3.61
10	Tidore kepulauan	0.249	0.244	0.290	18.85
Maluku utara		0.300	0.279	0.300	7.53

Sumber Data : BPS Kab. Halsel Tahun 2024

1.3 Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah **59** Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari **21** Dinas, **5** Badan, **2** Sekretariat, **1** Inspektorat dan **30** Kecamatan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH			
1	SEKRETARIAT	1	SEKRETARIAT DAERAH
			- BAGIAN PsEMERINTAHAN
			- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			- BAGIAN HUKUM
			- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
			- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
			- BAGIAN UMUM
			- BAGIAN ORGANISASI
			- BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		2	SEKRETARIAT DPRD
2	INSPEKTORAT	3	INSPEKTORAT
3	DINAS	4	DINAS PENDIDIKAN
		5	DINAS KESEHATAN
			- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA
		6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		9	DINAS SOSIAL
		10	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		16	DINAS PERHUBUNGAN
		17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		18	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
		20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4	BADAN	25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
		26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		27	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	KECAMATAN	30	KECAMATAN BACAN
		31	KECAMATAN BACAN BARAT
		32	KECAMATAN BACAN BARAT UTARA
		33	KECAMATAN BACAN SELATAN
		34	KECAMATAN BACAN TIMUR
		35	KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
		36	KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH
		37	KECAMATAN GANE BARAT
		38	KECAMATAN GANE BARAT SELATAN
		39	KECAMATAN GANE BARAT UTARA
		40	KECAMATAN GANE TIMUR
		41	KECAMATAN GANE TIMUR SELATAN
		42	KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH
		43	KECAMATAN KASIRUTA BARAT
		44	KECAMATAN KASIRUTA TIMUR
		45	KECAMATAN KAYOA
		46	KECAMATAN KAYOA BARAT
		47	KECAMATAN KAYOA SELATAN
		48	KECAMATAN KAYOA UTARA
		49	KECAMATAN KEPULAUAN BOTANG LOMANG
		50	KECAMATAN KEPULAUAN JORONGA
		51	KECAMATAN PULAU MAKIAN
		52	KECAMATAN MAKIAN BARAT
		53	KECAMATAN MANDIOLI SELATAN
		54	KECAMATAN MANDIOLI UTARA
		55	KECAMATAN OBI
		56	KECAMATAN OBI BARAT

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
		57	KECAMATAN OBI SELATAN
		58	KECAMATAN OBI TIMUR
		59	KECAMATAN OBI UTARA

1.4 Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Selatan sampai dengan akhir tahun 2023 yang masih melaksanakan tugas sebanyak **5.004** orang, terdiri dari laki-laki **2.164** orang dan perempuan **2.840** orang, sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.10
Jumlah ASN Kab. Halmahera Selatan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat	Jumlah
	Pendidikan	
1	SD/SEDERAJAT	8
2	SLTP/SEDERAJAT	35
3	SMA/SEDERAJAT	853
4	DI/SEDERAJAT	6
5	DII/SEDERAJAT	330
6	DIII/SEDERAJAT	471
7	S1/Sederajat	1863
8	S2	158
9	S3	4
Total		3728

Sumber Data : BKPPD Kab. Halsel

1.5 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

1.5.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan 2024

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mewujudkan Halmahera Selatan Senyum 2026:

a. Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terimbas oleh berbagai tantangan, seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi, salah satu langkah utama adalah pengembangan sektor pertanian dan perikanan, mengingat daerah ini memiliki potensi besar dalam kedua sektor tersebut. Ini termasuk memberikan pelatihan, bantuan alat, serta akses pasar bagi petani dan nelayan agar hasil produksi mereka dapat dipasarkan dengan harga yang lebih baik dan menguntungkan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, akan mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal, dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk membuka usaha sendiri yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam pengentasan kemiskinan, selain bantuan sosial langsung seperti BLT dan bantuan pangan, pemerintah daerah juga akan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi fokus lain, karena kedua sektor ini dapat memperbaiki kualitas hidup dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah terintegrasi tersebut, diharapkan dapat terjadi perbaikan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi daerah, sehingga masyarakat Halmahera Selatan dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri.

b. Pengembangan Kawasan serta Penyediaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Selama ini pendekatan pembangunan lebih banyak pendekatan parsial dan sporadis, sehingga output dan outcome yang dirasakan oleh Masyarakat dirasa kurang. Sementara karakteristik geografis Halmahera Selatan yang berupa kepulauan, membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis kawasan terpadu sesuai tipologi, potensi dan fokus pengembangan kewilayahan. Setidaknya ada 5 klaster pulau besar yang ada di Halmahera Selatan, yaitu: Bacan, Obi, Gane, Kasiruta Mandioli dan Makian Kayoa. Tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pembangunan kawasan adalah belum adanya roadmap pengembangan kawasan, belum fokus dan holistiknya perencanaan pengembangan kawasan, masalah status kawasan dan penyediaan ruang/lahan, lemahnya koordinasi lintas sektor dan terbatasnya ruang fiskal.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial secara merata dan berkualitas dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka keterisolasian dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Tantangan bagi pembangunan infrastruktur adalah angka pertumbuhan pembangunan jalan yang lebih lambat daripada kecepatan pertumbuhan penduduk dan mobilitas orang dan barang, adanya penetapan status jalan antara kabupaten, provinsi dan pusat yang belum jelas menyebabkan lambannya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan, penyebaran pembangunan infrastruktur yang belum merata, masalah pembebasan lahan dan kualitas infrastruktur yang rendah.

Terkait dengan sektor perhubungan yang menjadi tantangan adalah penyediaan fasilitas terminal, pelabuhan dan bandara yang representative

penyediaan moda transportasi publik baik darat, laut maupun udara yang terintegrasi, murah dan nyaman.

Terkait infrastruktur telekomunikasi, informatika dan komunikasi (TIK), tidak dapat dipungkiri memang transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan di era disruptif 4.0. Oleh karenanya penyediaan infrastruktur TIK menjadi kebutuhan yang tidak bias dielakkan. Namun tantangannya adalah rentang kendali dan tipologi wilayah Halmahera Selatan yang berupa kepulauan membutuhkan sumber daya yang besar, keterbatasan anggaran, masih adanya daerah yang blank spot, kurangnya dukungan dari pihak provider telekomunikasi, minimnya sumber daya manusia yang melek teknologi informatika, kurangnya literasi digital bagi terkait infrastruktur listrik dan air bersih masyarakat. Sementara tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya angka elektrifikasi, kapasitas pembangkit listrik PLN yang masih terbatas, pelayanan PLN yang belum menjangkau semua wilayah, masih terbatasnya penyediaan Listrik perkotaan, pedesaan dan permukiman, masih lambatnya pelayanan gangguan listrik, minimnya pemeliharaan jaringan listrik, pemanfaatan sumber energi terbarukan yang masih minim, sumber air baku yang masih terbatas, belum adanya sistem pengolahan air bersih yang memadai, jaringan pipa air bersih yang belum memadai, penyediaan air bersih pedesaan yang masih minim, pelayanan PDAM masih terbatas dan belum prima.

Tantangan dalam sektor lingkungan hidup adalah regulasi terkait daya dukung lingkungan dan penataan tata ruang yang belum memadai dan menjangkau semua wilayah, ketersediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang masih minim, konservasi lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai yang masih kurang, penataan drainase yang masih belum optimal, sistem pengelolaan sampah masih tradisional, penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin masih belum optimal, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh, masih banyaknya pelanggaran terhadap regulasi tata ruang dan Tingkat ketaatan terhadap dokumen lingkungan masih rendah.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Inovasi Daerah

Pembangunan sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan suatu daerah karena sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang. Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia karena menggambarkan ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup), mempunyai pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan memiliki standar hidup yang layak (pengeluaran per kapita per bulan). Walaupun setiap tahun angka IPM Kabupaten Halmahera Selatan terus naik, namun dibandingkan dengan kabupaten lain di Maluku Utara, tingkat IPM Kabupaten Halmahera Selatan masih berada di peringkat 6 yaitu sebesar 64,11 (BPS, 2019), masih jauh di bawah IPM Kota Ternate sebesar 80,03 (BPS, 2019).

Dalam sektor pendidikan, masih ditemukan angka rata-rata lama sekolah masih rendah berarti tingkat putus sekolah yang cukup tinggi, kesadaran dan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi juga masih minim, masih kurangnya tenaga guru, ditambah dengan belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas guru/ tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, rendahnya manajemen pengelolaan sekolah, kurangnya perhatian terhadap pendidikan informal dan nonformal, pengembangan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai masih rendahnya tingkat Universal Health Coverage (UHC), baru sekitar 42,68% (BPJS, 2021) artinya cakupan masyarakat yang bisa mendapatkan akses dan pelayanan jaminan kesehatan masih rendah. Kemudian masih minim dan belum meratanya penempatan tenaga kesehatan, masih tingginya angka stunting dan penyakit menular lainnya, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.

Di sektor tenaga kerja, jumlah angkatan kerja di Halmahera Selatan cukup tinggi namun tidak ditunjang dengan kompetensi dan ketrampilan yang mumpuni, sehingga angka pengangguran cukup tinggi. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya serta meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja.

Tantangan dalam mengembangkan inovasi daerah adalah masih rendahnya budaya literasi masyarakat, terbatasnya akses terhadap media ilmu pengetahuan, masih rendahnya kreativitas aparatur dan masyarakat, kurangnya sarana pengembangan kreativitas, kompetisi inovasi dan kreativitas yang masih minim, minimnya perlindungan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas inovasi, masih minimnya riset dan penelitian serta kurangnya insentif terhadap pelaku industri kreatif

d. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik

Peran aparatur birokrasi sebagai public servant ke depan sangat strategis karena adanya tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). Pergeseran paradigma dan budaya birokrasi dari “dilayani” menjadi “melayani” bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan politicalwill, keteladan dan konsistensi untuk merealisasikan konsep reformasi birokrasi. Era disruptif dan transformasi digital juga memaksa birokrasi untuk bisa lebih “agile” (lincah) dan adaptif terhadap perubahan. Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya culture shock di tubuh birokrasi yang membutuhkan dorongan dan motivasi untuk open minded (terbuka) dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selain itu perlu adanya guidance terhadap proses bisnis (business process) di birokrasi berupa SOP atau regulasi agar terbangun sistem organisasi yang handal. Kemudian masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pelayanan yang lebih transparan, cepat dan murah. Perlu juga adanya, peningkatan kualitas perencanaan melalui perbaikan kualitas data dan peningkatan kapasitas perencanaan. Selain itu dalam konteks pengelolaan keuangan, dan transformasi pemerintahan menuju entrepreneurship government (pemerintahan berbasis kewirausahaan) perlu kiranya inovasi dalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Sementara itu dalam hal transformasi pengawasan, tantangannya adalah masih lemahnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), pembinaan mental aparatur yang masih belum optimal, serta masih kurangnya tenaga auditor di sektor pemberdayaan kelembagaan desa, terlihat masih banyak desa yang masuk kategori tertinggal. Hal ini dikarenakan minimnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, belum optimalnya peran BUMDesa sebagai akselerator perekonomian di desa, masih minimnya infrastruktur publik di desa dan lemahnya administrasi desa. Di sektor kependudukan, tantangannya adalah masalah desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal serta validasi data kependudukan yang lambat.

e. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah., terutama di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Halmahera Selatan. Seiring dengan meningkatnya investasi terutama di sektor pertambangan, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh sektor ekonomi kerakyatan untuk bisa menangkap peluang bersinergi dengan investasi yang ada, namun banyak tantangannya.

Di sektor koperasi dan UMKM misalnya, kinerja koperasi dan UMKM pada level produktivitas, kontinuitas dan kualitas produk yang masih rendah, jaringan pasar yang masih terbatas, dan akses permodalan yang juga terbatas. Sementara di sektor pertanian, masih belum optimalnya produksi pertanian karena masih terkendala masalah kapasitas dan kualitasnya, khususnya terkait dengan kemampuan produktifitas petani dan pengolahan hasil-hasil pertanian paska panen. Kemampuan produksi hasil perkebunan masih rendah padahal potensi ketersediaanya tinggi. Potensi luas lahan perkebunan di Halmahera Selatan adalah 105.509,77 Ha, tetapi yang termanfaatkan baru 45.794,47 Ha. Demikian juga kemampuan dalam pengolahan paska panen juga rendah sehingga pemasukan devisa bagi daerah dari sektor ini masih lemah.

Di sektor kehutanan, tantangannya adalah luas kawasan hutan yang semakin menyempit (deforestasi) akibat dari kegiatan pertambangan. Di satu sisi kegiatan penambangan dibutuhkan dalam rangka pendayagunaan bahan-bahan tambang tetapi di sisi lain mengurangi luas kawasan hutan yang juga dibutuhkan dalam konteks konservasi dan penjagaan keseimbangan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Kemudian belum optimalnya kegiatan reboisasi dan penghijauan serta masih minimnya pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Selain itu tantangan di sektor perikanan dan kelautan yaitu belum optimalnya pengelolaan atas potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. Perlu dukungan yang lebih memadai lagi berupa penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan khususnya desa-desa yang mayoritas penduduknya nelayan. Masih belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dan pemanfaatan hasil laut non ikan.

Kemudian dari sisi daya saing produk daerah tantangannya adalah belum optimalnya kualitas produk-produk daerah sehingga memiliki daya saing yang rendah di pasar nasional maupun global. Masih rendahnya kompetensi dan kemampuan inovasi dalam hal diversifikasi produk, pengemasan maupun aspek legalisasi.

Di sektor industri, bahan baku untuk industri tersedia melimpah di Halmahera Selatan, khususnya di sector kehutanan, perkebunan, tambang, dan perikanan. Namun ketersediaan industri pengolahan (manufaktur) yang dibutuhkan untuk mengembangkan nilai tambah komoditas masih belum ada, akibat ketersediaan pasokan listrik yang masih terbatas dan ongkos transportasi yang masih tinggi.

f. Stabilitas Keamanan, Rekonsiliasi Sosial, dan Pengembangan Budaya Daerah

Keberagaman etnis dan budaya di Kabupaten Halmahera Selatan di satu sisi adalah anugerah dan aset daerah, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. Pengalaman sejarah terjadinya konflik horizontal memberikan pelajaran penting akan mahalnya harga sebuah perdamaian. Peran kesultanan Bacan sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya selama ini kurang dioptimalkan dalam menjembatani potensi konflik. Selain

itu, faktor keadilan terhadap kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi proses akulturasi. Selama ini juga dirasakan kurang kegiatan dialog antar umat beragama dan paguyuban etnis, padahal kegiatan ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan yang ada. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang selama ini aktif, namun akhir-akhir ini semakin menurun juga berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan kantibmas.

Di sektor Budaya, terlihat bahwa masih minimnya iven-iven budaya yang diselenggarakan untuk melestarikan potensi budaya, masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Kesultanan Bacan dan masih kurangnya ruang dan sarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya.

1.5.2 Prioritas Pembangunan

- a. Prioritas Daerah ke-1 : Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing.
 - Meningkatkan penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan;
 - Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan;
 - Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
 - Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perikanan;
 - Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan;
 - Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan strategis daerah;
 - Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian; dan
 - Meningkatkan daya saing industri, perdagangan dan pariwisata.
- b. Prioritas Daerah ke-2 : Membangun Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dan Infrastruktur Pedesaan untuk Menjamin Pemerataan Pembangunan.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman;
 - Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak;
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman
 - Meningkatkan kualitas penataan ruang di Halmahera Selatan; dan
 - Meningkatkan kualitas infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- c. Prioritas Daerah ke-3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
 - Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - Meningkatkan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan;
 - Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender;
 - Meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - Meningkatkan prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda; dan
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
- d. Prioritas Daerah ke-4 : Merevitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.

- Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
- e. Prioritas Daerah ke-5 : Membangun Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan.
- Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik;
 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut;
 - Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Prioritas Daerah ke-6 : Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Memitigasi Dampak Bencana.
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Halmahera Selatan; dan
 - Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana.
- g. Prioritas Daerah ke-7 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah.
- Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara;
 - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi pembangunan daerah;
 - Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara;
 - Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
 - Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan; dan
 - Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PEMERINTAH KABUPATEN
Halimahera Selatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Sesuai dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026*, maka Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah”**

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan 7 (tujuh) Misi atau disebut juga **SAPTA SENYUM** (TUJUH SEMANGAT NYATA UNTUK MEMBANGUN) yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, sebagai berikut :

1. **SENYUM SARUMA: Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian** Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma.
2. **SENYUM PRIMA: Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan** yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai.
3. **SENYUM BERDAYA: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat** dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
4. **SENYUM UNGGUL: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan** Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.

5. **SENYUM SEJAHTERA: Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah** berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing.
6. **SENYUM MAJU: Mengembangkan sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan** yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan.
7. **SENYUM BERKAH: Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang**, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian.

Penjelasan Masing-masing Misi :

1. Misi Pertama merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengarahkan pembangunan kehidupan bernegara untuk penguatan idiologi Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan masyarakat Halmahera Selatan yang bertanggung jawab, gotong-royong, tentram dan tertib serta penuh prestasi
2. Misi Kedua merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus memantapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Misi Ketiga merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengarahkan pembangunan kehidupan sosial sebesar-besarnya untuk penguatan kehidupan masyarakat Halmahera Selatan yang bertanggung jawab dan mandiri.
4. Misi Keempat merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, merata dan terjangkau.
5. Misi kelima merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada semua sektor dengan prioritas sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang menjadi unggulan daerah, didukung sektor UMKM yang produktif serta peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah regional, nasional dan global.
6. Misi keenam merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan yang bertujuan untuk peningkatan konektivitas wilayah, mempermudah aksesibilitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
7. Misi Ketujuh merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengembangkan kehidupan beragama di Halmahera Selatan yang lebih beradab, berkepribadian dan harmonis serta masyarakat yang mampu melestarikan budaya, kearifan lokal dan adat seatorang di Bumi Saruma Halmahera Selatan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah atau masyarakat dalam jangka waktu tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat lebih fokus, efektif, dan efisien.

Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam matriks hubungan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 11
Matriks Hubungan Antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

Visi					
"Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah"					
Misi	Tujuan		Sasaran Strategis		
	Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja (IKU)	
1 Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma (SENYUM SARUMA)	1 Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia 2 Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani	1 Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1 Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	
			2 Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	2 Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani	
				3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam	
2 Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai (SENYUM PRIMA)	2 Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja ASN yang profesional	1 Indeks Reformasi Birokrasi	3 Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	5 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
			4 Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	6 Indeks Resiko Bencana (IRB)	
				7 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	
			5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	8 Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	
				9 Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP	
			6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	10 Presentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA	
				11 Tingkat pengelolaan arsip secara baku	
			7 Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	12 Persentase pengunjung perpustakaan	
				13 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti	
			8 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	14 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti	
				15 Rerata Indeks Profesionalitas ASN	
			9 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
				17 Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	
			10 Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum	18 Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	
				19 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	
			11 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20 Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
				21 Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	
			12 Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	22 Indeks Inovasi daerah (IID)	
			13 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah		

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja (IKU)
				14 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 24 Nilai LPPD Pemerintah Daerah 25 Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A 26 Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)
				15 Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27 Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)
				16 Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28 Persentase desa mandiri
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (SENYUM BERDAYA)	3 Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas	1 Persentase Penduduk Miskin	17 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 18 Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 19 Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	30 Presentase PMKS yang tertangani 31 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 32 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan 33 Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) 34 Persentase Cadangan Pangan Masyarakat
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sestim Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau (SENYUM UNGGUL)	4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia	20 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan 21 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 22 Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	35 Rata-rata Lama Sekolah 36 Harapan Lama Sekolah 37 Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A 38 Usia Harapan Hidup (tahun) 39 Angka kesakitan 40 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target 41 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 42 Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)
5	Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing (SENYUM SEJAHTERA)	5 Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal	1 Pertumbuhan Ekonomi 2 PDRB Per Kapita	23 Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata 24 Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan 25 Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan 26 Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan 27 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	43 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 44 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 45 Presentase Kunjungan Wisatawan 46 Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) 47 Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya) 48 Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan 49 Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan 50 Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas) 51 Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha 52 Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi)
6	Mengembangkan sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan (SENYUM MAJU)	6 Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial	1 Indeks Konektivitas Wilayah - Rumus: Jumlah jaringan jalan / rute pelayaran dibagi jumlah kota - Semakin tinggi indeks Konektivitas wilayah semakin baik	28 Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut 29 Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	53 Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap 54 Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi 55 Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi 56 Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik 57 Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City) 58 Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja (IKU)
				31 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59 Presentase Rumah Layak Huni 60 Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni 61 Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				32 Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62 Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak 63 Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak
				33 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64 Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH 65 Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani 66 Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang
				34 Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67 Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi
7	Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian (SENYUM BERKAH)	7 Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama. - Skor 0 – 100, semakin tinggi semakin baik. - Menggunakan tiga variabel: toleransi, kesetaraan dan kerjasama	35 Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang 36 Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	68 Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan 69 Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan analisis strategi pilihan yang telah dilakukan, maka strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Halmahera Selatan 2021-2026

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Memanfaatkan semua potensi sumberdaya untuk mengantisipasi gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia	-	Peningkatan wawasan politik, demokrasi, kebangsaan, dan edialogi Negara terhadap ASN dan masyarakat melalui sosialisasi/ bimtek dan diklat
				-	Deteksi Dini atas gangguan terhadap kamtibmas oleh Kominda
		2	Menumbuhkan kembali nilai-nilai ketahanan di dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong	-	Peningkatan stabilitas daerah yang didukung secara swakarsa oleh masyarakat
		3	Memperkuat komunikasi dan manajemen kelembagaan dalam forum antar umat beragama sehingga mampu meredam konflik yang terjadi	-	Peningkatan kewaspadaan nasional melalui toleransi antar umat beragama
				-	Peningkatan kewaspadaan nasional melalui pencegahan terjadinya konflik dan percepatan penanganan konflik
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	4	Penguatan keterlindungan warga, keamanan, serta ketertiban di dalam lingkungan masyarakat	-	Memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat
		5	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayahnya	-	Memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	6	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana.	-	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air
				-	Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana
				-	Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				-	Pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana khususnya dalam Kawasan Perkotaan Labuha
				-	Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7Meningkatkan kualitas pembinaan olah raga prestasi	- Peningkatan kapasitas pembina olah raga - Peningkatan perekrutan atlit baru - Peningkatan prestasi atlit - Penghargaan bagi atlit berprestasi - Peningkatan jumlah event pertandingan olah raga tingkat kabupaten - Peningkatan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olah Raga
	8Mendorong semangat pemuda untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan	- Peningkatan keaktifan ormas kepemudaan - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana aktivitas kepemudaan
5Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance	- Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan serta informasi kependudukan kepada masyarakat - Pembebasan biaya administrasi pengurusan KK/KTP/Akta Lahir - Desentralisasi pelayanan dokumen kependudukan ditingkat kecamatan - Pemberian bantuan buku nikah/ akta nikah gratis (diprioritaskan pada pasturi yang belum memiliki buku nikah) - Peningkatan kualitas pelayanan dokumen pencatatan sipil
	10Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah	- Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan arsip daerah - Peningkatan kapasitas Arsiparis Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan
6Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat	- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan perpustakaan daerah - Peningkatan kapasitas Pustakawan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan
	12Memperkuat komitmen dan transparansi layanan publik melalui kesepakatan bersama dalam pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	- Implementasi budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju Halsei Zero Corruption - Peningkatan Kapasitas APIP - Peningkatan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah
8Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	13Meningkatkan kualitas SDM ASN melalui Penegakan Disiplin, Pembinaan Karier serta Pendidikan dan Pelatihan	- Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Penyusunan pedoman budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Internalisasi pedoman budaya kerja birokrasi - Implementasi budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Perbaikan Manajemen Kepegawaian dan Pembinaan Karier ASN - Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis - Peningkatan Kesejahteraan ASN - Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai kompetensi - Rekrutmen ASN sesuai kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya
	14Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah	- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah - Peningkatan jumlah aset tanah Pemda bersertifikat
9Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	15Menumbuhkan alternatif kerjasama dan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan baru melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta/badan usaha	- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber- sumber PAD dan Sumber Pendapatan Lainnya - Pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendapatan daerah
	16Optimaliasi kerjasama Pemda, Badan Pertanahan dan masyarakat dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan	- Penyelesaian secara menyeluruh atas sengketa tanah dengan masyarakat - Identifikasi dan Pensertfikatan setiap kapling tanah milik Pemda - Penyusunan dokumen rencana pengadaan tanah Pemerintah Daerah - Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kab Halmahera Selatan dalam Tata Guna Tanah
11Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	17Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi	- Peningkatan penataan database dan pemanfaatan statistik daerah - Membangun pengelolaan database berbasis Tekonologi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
12 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	18 Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi	- Peningkatan kemampuan aparatatur perencana (Bappeda dan SKPD) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah
		- Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui Monitoring dan Evaluasi
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan pembangunan
		- Pemanfaatan IT dalam Perencanaan dan Penganggaran
		- Perbaikan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
13 Meningkatkan kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	19 Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah	- Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah
		- Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah
		- Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
14 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	20 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	- Penguatan fungsi dan peran Pemda dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		- Peningkatan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah (Perda/Perbup) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
		- Penguatan kelembagaan OPD menurut kebutuhan dan kewenangan
		- Implementasi e-Government dan Senyum Smart City di seluruh unit kerja (OPD)
15 Meningkatkan Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	21 Membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	- Penguatan fungsi dan peran Pemda dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		- Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan melalui Diklat
		- Pelimpahan Kewenangan kepada Camat sesuai ketentuan perundang-undangan
		- Peningkatan koordinasi antar Unit Kerja di Kecamatan
		- Peningkatan Fungsi Pengawasan Pembangunan ditingkat kecamatan oleh Camat
16 Meningkatkan kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	22 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatatur dan penerapan good governance di Tingkat Kecamatan	- Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Camat
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		- Peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan melalui Koperasi dan/atau BUMDES
		- Pembangunan infrastruktur perdesaan termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, social keagamaan, dan ekonomi
		- Rintisan desa percontohan melalui Lomba Desa dan Lomba PKK
17 Meningkatkan kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	23 Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam menata desa baik infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya	- Penyelesaian tapal batas wilayah kecamatan dan desa
		- Peningkatan kapasitas aparatatur pemerintah desa dan BPD
		- Mendorong perbaikan Nilai Indeks Membangun Desa secara bertahap
		- Mengoptimalkan peran dan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
18 Meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	24 Menguatkan kemandirian Desa baik secara administratif maupun keuangan	- Menjalankan fungsi rehabilitasi dan pemberdayaan kelembagaan sosial
		- Pengurangan PMKS secara bertahap
		- Penanggulangan dan penanganan kemiskinan
19 Meningkatkan Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	25 Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas	- Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat di pemerintahan dan lembaga legislatif
		- Peningkatan kegiatan perempuan di bidang sosial dan ekonomi
		- Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		- Peningkatan kualitas data Gender dan Anak
	26 Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan	- Penegakan hukum KDRT dan perlindungan anak
		- Penerapan perlindungan anak di bawah umur
		- Melakukan intervensi penanganan daerah rawan pangan
		- Meningkatkan diversifikasi, penganeekaragaman dan keamanan pangan
		- Meningkatkan upaya ketersediaan dan penguatan stok cadangan pangan
	27 Optimalisasi dalam implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender dari tingkat desa	- Swasembada pangan lokal (Peningkatan kemandirian pangan)
		- Pembentukan BULOG Daerah
	28 Penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak terlantar serta perempuan dan anak korban kekerasan	
	29 Meningkatkan kemandirian pangan daerah	

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	30 Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah, lembaga pendidikan dan swasta dan pemanfaatan iptek berlandaskan prinsip-prinsip good governance	- Gratis biaya Pendidikan Dasar (SD/SMP) melalui subsidi BOSDA - Pemberian subsidi untuk lembaga PAUD - Peningkatan kapasitas pendidikan dasar termasuk pendidikan dasar di pesantren/swasta sesuai SNP - Peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi minimal A - Peningkatan kualitas pendidikan Non Formal dan Informal - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan terutama di desa-desa terpencil - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan di desa-desa terpencil - Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan - Pemberian Beasiswa Berprestasi dan siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Lokal untuk peningkatan kualitas pendidikan - Penyusunan Kurikulum bermuatan kearifan lokal
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	31 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan perbaikan gizi masyarakat	- Peningkatan rasio jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) - Pemerataan sebaran Bidan Desa (satu desa satu bidan) - Peningkatan akses informasi dan promkes - Peningkatan Akreditasi Puskesmas - Peningkatan status RSU Laiwui dari Non Type ke Type D - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan sesuai SPM (Rumah Sakit dan Puskesmas) - Peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal - Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) - Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat termasuk penurunan angka stunting - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak - Peningkatan status RSUD Labuha dari type D ke type B - Kesehatan gratis untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya masyarakat miskin termasuk biaya persalinan/ melahirkan dan biaya ambulance/ pemakaman pada saat dirujuk
22	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelola Kependudukan	32 Meningkatkan pelayanan KB dan keluarga sejahtera	- Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan - Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga - Peningkatan pelayanan KB terpadu
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	33 Meningkatkan kemampuan berwirausaha para pelaku UMKM sektor perdagangan	- Pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM sektor perdagangan - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan dan UMKM sektor perdagangan - Fasilitasi Tera dan Tera Ulang - Pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui mekanisme dana bergulir atau disalurkan melalui Bank / BPRS - Pengawasan keamanan barang perdagangan yang beredar di masyarakat - Peningkatan sarana dan prasarana distribusi dan perdagangan
		34 Meningkatkan kapasitas Pelaku Industri Kecil dan menengah termasuk Home Industry	- Peningkatan kapasitas Pelaku Industri Kecil dan menengah termasuk Home Industry melalui Diklat - Fasilitasi pengurusan izin dan sertifikasi produk dan sertifikasi Halal pelaku IKM dan Home Industri - Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan di Pulau Obi - Pengembangan sentra-sentra Industri Kecil Menengah (IKM) atau Home Industri
		35 Membangun, memperbaiki, dan merawat destinasi wisata melalui pelibatan pihak swasta	- Peningkatan jumlah, perbaikan dan perawatan destinasi wisata dengan pelibatan swasta - Peningkatan angka kunjungan wisatawan melalui promosi dengan menggunakan berbagai media - Peningkatan sarana penunjang seperti hotel dan restoran - Mempermudah akses ke Halmahera Selatan baik darat, laut maupun udara terutama ketempat-tempat destinasi wisata

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	36 Mendorong peningkatan kualitas produksi di bidang pertanian dan perkebunan serta mendorong tumbuhnya agroindustri	- Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di bidang pertanian dan perkebunan melalui teknologi pengolahan pasca panen termasuk pengembangan industri pakan ternak - Fasilitasi pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan - Pengembangan industri terpadu sektor pertanian/perkebunan - Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman komoditi unggulan: Kelapa, Pala, Cengkeh, Kopi Bacan - Pembangunan industri pengolahan tanaman rempah (komoditi unggulan) bekerjasama dengan swasta (investor) - Menurunkan peran para tengkulak atas pemasaran komoditi unggulan dan memaksimalkan fungsi BUMDes dan/atau Koperasi - Peningkatan luas lahan pertanian dan perkebunan dengan pemanfaatan lahan tidur sebagai bagian ekstensifikasi lahan pertanian - Mengoptimalkan peran dan fungsi Penyuluh Pertanian dan pengadaan Sarprodi - Peningkatan produksi ternak (sapi dan ayam) serta pengendalian penyakit ternak
		37 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas produksi perikanan	- Peningkatan kualitas pengelolaan dan kualitas produksi perikanan - Pemanfaatan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) sebagai wadah pemasaran produk perikanan Halmahera Selatan - Perintisan Kawasan Industri Terpadu Pengolahan Ikan dan Kawasan Pelabuhan Perikanan - Penguatan Kelembagaan dengan membentuk Koperasi / BUMDes Nelayan
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	38 Memanfaatkan posisi strategis, dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi, terutama di sektor perkebunan dan perikanan.	- Peningkatan kemudahan penanaman modal (investasi) di daerah - Pembebasan biaya administrasi pengurusan ijin usaha khususnya UMKM - Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	39 Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi serta akses permodalan	- Pembinaan berkelanjutan pada Koperasi Aktif - Pemberian dukungan akses permodalan kepada koperasi aktif - Pembentukan dan/atau pengaktifan kembali Koperasi Primer atau Koperasi Induk
		40 Meningkatkan kemampuan berwirausaha para pelaku UMKM	- Peningkatan jumlah wirausahawan dan penciptaan iklim wirausaha yang baik - Pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM - Pembentukan jaringan wirausahawan daerah - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan dan UMKM - Optimalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendukung pelaku UMKM - Pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui mekanisme dana bergulir atau disalurkan melalui BPRS - Pembentukan BUMDes baru dan pembinaan terhadap BUMDes yang sudah ada
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	41 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan daya saing tenaga kerja daerah untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja daerah melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional - Peningkatan jumlah prasarana, sarana dan instruktur pelatihan tenaga kerja
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	42 Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	- Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan berbasis gugus pulau sesuai arahan Tata Ruang - Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat - Peningkatan status jalan Kabupaten/Provinsi menjadi jalan Nasional: Labuha-Sawadai, Jikotamo-Jikodolong, Sayoang-Yaba dan Saketa-Batulak, Matuitng-Gane Dalam - Pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat - Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
		43 Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan laut antar pulau dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik	- Subsidi transportasi laut dan udara untuk mengatasi keterisolasian - Pengembangan sistem transportasi laut antar pulau - Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan laut antar pulau - Memfasilitasi Pengembangan Kawasan Pelabuhan Babang dan Bandara Oesman Sadik Labuha - Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	44	Meningkatkan konservasi Sumber Daya Air dan pendayagunaan sumber daya air	- Peningkatan konservasi Sumber Daya Air dan pendayagunaan sumber daya air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi	45	Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan mendorong pihak swasta membangun infrastruktur telekomunikasi seluler dan internet serta optimalisasi pemanfaatannya	- Penambahan kapasitas telepon seluler bekerjasama dengan provider dalam rangka Halsel bebas blank spot area - Peningkatan manajemen birokrasi dan pelayanan masyarakat dengan E- Government berbasis Teknologi Informasi - Pengembangan “ SMART CITY “ di Kawasan Perkotaan Labuha - Pengembangan “ SMART VILLAGE “ di luar Kawasan Perkotaan Labuha
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	46	Meningkatkan ketersediaan perumahan dan kualitas kawasan permukiman	- Peningkatan Kompetensi Pelakau Jasa Konstruksi melalui diklat dan sertifikasi - Penataan Bangunan dan lingkungannya - Peningkatan bangunan fasilitas umum dan sosial (Fasum dan Fasos), Fasilitas Publik serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Peningkatan bangunan Pemerintahan - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian - Pembangunan Perumahan Layak Huni - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik - Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) disetiap desa - Penyediaan PJU yang memadai untuk mendukung kualitas kawasan permukiman
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	47	Meningkatkan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum dan Akses Sanitasi yang Layak	- Peningkatan kapasitas air bersih PDAM Halmahera Selatan (SPAM Perkotaan) - Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan (SPAM Perdesaan) - Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestic (akses sanitasi) - Advokasi dan sosialisasi tentang Penyehatan lingkungan dan PHBS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	48	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang	- Perencanaan pengembangan Kawasan Strategis secara komprehensif: - Kawasan Perkotaan Labuha (PKW Labuha) - Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kec. Gane Timur - Kawasan Perdesaan Prioritas - Kawasan PSN (Program Strategis Nasional) di Pulau Obi - Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang dengan memperhatikan pola ruang sesuai RTRW - Melakukan Revisi Tata Ruang Halmahera Selatan
		49	Peningkatan kualitas SDM Pengelola dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	- Penyusunan neraca SDA - Pengembangan kompetensi SDM lingkungan hidup melalui pendidikan teknnis dan sertifikasi serta penyiapan Laboratorium Lingkungan Hidup - Pelaksanaan evaluasi ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum oleh Tim Terpadu
		50	Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca	- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Pengembangan Kawasan Khusus Mangrove
		51	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan drainase lingkungan	- Peningkatan layanan persampahan dan drainase lingkungan - Advokasi dan sosialisasi tentang Penyehatan lingkungan dan PHBS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	52	Mendorong partisipasi masyarakat warga transmigrasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	- Peningkatan afirmasi pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	53	Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Halmahera Selatan	- Peningkatan peran serta masyarakat dan Kesultanan Bacan dalam pembangunan dan pelestarian budaya dan adat seatorang - Peningkatan kapasitas pembina seni budaya dan kualitas pembinaan seni budaya - Peningkatan jumlah event seni budaya
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	54	Mendorong peningkatan semangat beragama masyarakat	- Peningkatan Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai (PMBN) - Peningkatan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN) - Peningkatan kapasitas tokoh agama serta kesejahteraan para Imam dan Pendeta - Peningkatan kualitas prasarana dan sarana rumah ibadah

Kebijakan daerah Lainnya :

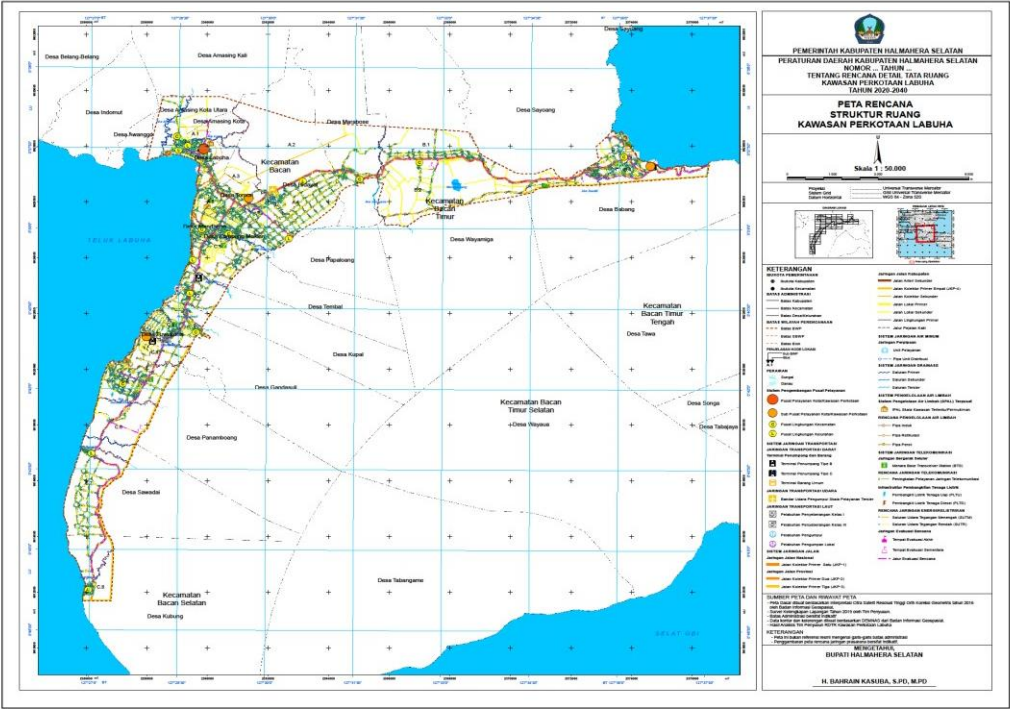
- **Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu**

Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pengembangan dengan pendekatan tematis holistik kawasan strategis dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan strategis terpilih baik Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu yang ditempuh meliputi :

- a. Pengembangan PKW Kawasan Perkotaan Labuha seluas 5.969,67 Ha dengan konsep **SMART CITY** (Kota Cerdas).

Penataan Kawasan Perkotaan Labuha melalui konsep Smart City ditetapkan menjadi fokus prioritas pengembangan kawasan strategis karena Labuha sebagai ibukota kabupaten merupakan etalase dan barometer pembangunan serta pelayanan pemerintahan. Kawasan Perkotaan Labuha merupakan suatu ekosistem multidimensi yang menjadi episentrum pelayanan pemerintahan, interaksi sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus merupakan representasi dan wajah Halmahera Selatan, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur

Gambar 3
Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Labuha



Sumber : RDTR Kawasan Perkotaan Labuha, 2021

Labuha Smart City dikembangkan sebagai model tata kelola kawasan perkotaan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan memaksimalkan potensi dalam memberikan pelayanan terhadap

masyarakat agar tercapainya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi, tata kelola dan sumber daya manusia yang baik.

Pengembangan Labuha Smart City dilakukan dengan pendekatan 3 Kluster utama meliputi: *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) dan *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) dan 3 Komponen *Enabler* (pengungkit) meliputi: *Smart People* (Sumber Daya Manusia), *Smart Governance* (Tata Kelola Pemerintahan) dan *Smart Infrastructure & Technology* (Infrastruktur dan Teknologi).

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Labuha dengan konsep Smart City meliputi :

1. Kluster *Smart Economy*

- a. Penataan, Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian Kawasan Perkotaan.
- b. Penamaan dan Penetapan Fasilitas Umum Berkarakter Budaya Lokal.
- c. Pengembangan dan Rehabilitasi Objek Wisata Pulau Nusara.
- d. Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Panambuang.
- e. Revitalisasi Kawasan Halmahera Selatan Bisnis Center di Tuwokona dan Labuha.
- f. Penataan dan Pembangunan Kawasan Pelabuhan Babang, Kupal dan Tuwokona.
- g. Penataan dan Pembangunan Kawasan Pasar Baru Babang.
- h. Penataan dan Pengembangan Kawasan Bandara Oesman Sadik Labuha.
- i. Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Bandara Udara Oesman Sadik Labuha dan Pelabuhan Nasional Babang.
- j. Penataan dan pengembangan Kawasan Sentra UMKM di Kawasan Perkotaan.
- k. Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian di Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah dan Bacan Timur Selatan.
- l. Penataan dan Revitalisasi Terminal Labuha dan Babang.
- m. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan Internet.

- n. Peningkatan Kapasitas Listrik Kawasan Ibukota Kabupaten melalui penambahan mesin pembangkit, rehabilitasi jaringan dan percepatan realisasi investasi pembangunan PLTPB Tawa, Bacan Timur Tengah.
- o. Revitalisasi dan Restrukturisasi PERUSDA PD. Prima Niaga Halmahera Selatan.

2. Kluster *Smart Economy*.

- a. Pembangunan Papaloang Park, Tugu Zero Point dan Landmark Kota Labuha.
- b. Penataan dan Pembangunan Avenue, Fitness Ground, Playground, Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau dengan konsep Ramah Anak
- c. Penataan dan Pembangunan Sempadan Pantai dan Sungai dalam kota.
- d. Penataan dan Pembangunan Talud (break water) Teluk Labuha.
- e. Penataan dan Revitalisasi Kawasan Hutan Mangrove/ Hutan Kota sebagai daerah resapan air (catchment area) dan kawasan wisata lingkungan.
- f. Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang ramah lingkungan.
- g. Penataan Kawasan Hutan Karet Kantor Bupati dan Hutan Kota Lainnya sebagai kawasan hijau dan konservasi habitat Yakis Bacan
- h. Pembangunan Pusat Mitigasi Bencana dan Pengadaan Alat Mitigasi
- i. Pembangunan Kanal Pengendali Banjir
- j. Revitalisasi infrastruktur jaringan dan pengolahan air bersih serta restrukturisasi PDAM Labuha
- k. Penataan Pantai Teluk Labuha dan Perumahan Kumuh dengan Konsep
- l. Water Front City
- m. Normalisasi dan Revitalisasi DAS Kawasan Sungai Perkotaan
- n. Pembangunan Listrik Perkotaan, Permukiman dan Penerangan Jalan Umum dengan Konsep Ramah Lingkungan
- o. Pembangunan Traffic Light dan Zebra Cross

3. Kluster *Smart Society*

- a. Pengembangan pelayanan umum digital dan penerapan e-*Government* melalui Aplikasi e-*Smart* Labuha.
- b. Pembangunan *Command Center Senyum Smart City*.
- c. Pembangunan Media Publikasi dalam bentuk Videotron.
- d. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan (Landscap Kantor Bupati, Rumah Jabatan KDH/WKDH, Rehabilitasi

- Kantor Bupati, Rehabilitasi Kantor DPRD, pembangunan kantor OPD).
- e. Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya sebagai Pusat Dakwah dan Wisata Religi
 - f. Pengembangan Perguruan Tinggi Lokal sebagai Center of Excelent masyarakat intelektual perkotaan.
 - g. Penataan dan Pembangunan Kawasan Kota Tua sebagai destinasi Culture and Heritage Tourism
 - h. Pembangunan Rumah Budaya Saruma sebagai Pusat Pengembangan dan Pelestarian Budaya Saruma sekaligus Sekretariat Bersama Paguyuban
 - i. Pengembangan RSUD Labuha sebagai RS Rujukan Regional Tipe B dengan tingkat pelayanan yang terstandarisasi.
 - j. Pengembangan Sekolah Unggulan yang Terakreditasi dan Penetapan ZonaAman Sekolah.
- b. Pengembangan Pulau Obi untuk mendukung Kawasan PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam pembangunan Industri Pengolahan Nikel dan Logam Dasar di Pulau Obi.

Pengembangan Kawasan Pulau Obi dilakukan untuk mendukung perubahan status Kawasan Industri Pulau Obi dari program pembangunan berskala provinsi menjadi program pembangunan berskala nasional sekaligus mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional terkait dengan aspek keamanan investasi, penyiapan kapasitas SDM daerah, proteksi terhadap daya dukung dan korservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyediaan infrastuktur dasar dan penunjang masyarakat.

Pengembangan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Nikel dan Logam Dasar di Pulau Obi diarahkan dengan tetap menjaga iklim investasi industri yang sudah ada seperti industri pengelolaan hasil hutan di Jikodolong, industri pengolahan emas di Anggai dan industri budidaya mutiara di Garga.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pulau Obi dilakukan secara seimbang dan komprehensif dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat Obi dan peningkatan daya dukung lingkungan meliputi :

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergisitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Perusahaan dalam rangka

Pembangunan Ruas Jalan Lingkar dan Jembatan Pulau Obi, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Bandara dan Program *Community Social Responsibility* (CSR).

2. Pemberian Subsidi Transportasi untuk membuka akses ke daerah terpencil
 3. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Internet.
 4. Pengembangan dan Revitalisasi Pukesmas, Pustu, Polindesa serta Rumah Sakit Obi sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 5. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan desa lingkar tambang untuk menopang kebutuhan industri melalui penguatan kapasitas petani/nelayan dan peningkatan sarana pertanian dan perikanan masyarakat.
 6. Peningkatan Kapasitas Petani dan Nelayan melalui penyuluhan dan bantuan bibit, pupuk, sarana produksi dan alat tangkap serta program pemberdayaan.
 7. Pengembangan PDAM Laiwui dalam rangka peningkatan kapasitas air bersih di Pulau Obi
 8. Peningkatan Kapasitas PLN Laiwui dalam rangka penyediaan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Obi
 9. Penguatan Program Konservasi Lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai dan Daerah Rawan Bencana
 10. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang merata dan berkualitas dan program beasiswa kemitraan
 11. Penguatan Lembaga BUMDes sebagai sentra pengelolaan potensi dan komoditi lokal unggulan
 12. Penguatan kerjasama dengan perbankan dalam pembiayaan, penyaluran KUR dan modal bergulir bagi pelaku UMKM di Obi untuk menggerakkan sektor usaha riil yang menopang kebutuhan industri
 13. Pembangunan Pasar dan Sentra Ekonomi masyarakat
 14. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu
- c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Gane Timur seluas lk. 5.517,19 hektar sebagai lumbung pangan Halmahera Selatan.
- Wilayah Gane Timur khususnya Kawasan Transmigrasi di SP 1, SP2, SP3, SP4, SP5 dan SP6 memiliki peranan penting sebagai Lumbung Pangan Daerah karena memiliki potensi sebagai sentra produksi padi (bahan pangan utama) sehingga diharapkan bisa berperan dalam pemenuhan kebutuhan

beras dalam daerah secara mandiri (swasembada) sekaligus sebagai *buffer stock* dalam mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan serta gejolak harga atau keadaan darurat. Oleh karena itu arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Lumbung Pangan Halmahera Selatan antara lain :

1. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi

3. Peningkatan kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan pendampingan pada petani.

4. Penyediaan Saprodi berupa: Bibit, Pupuk dan Obat-Obatan

5. Penyediaan Saprotan/Alsintan berupa: Hand Tractor, Jhonn Deer, RMU (Rice Milling Unit) dan bangunannya, Pengering Padi (Drier)

6. Pembangunan dan Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat di SP2 Desa Sumber Makmur.

7. Penguatan kelembagaan BUMDes dalam rangka optimalisasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 13
Keselarasan Program dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1. Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan. 2. Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Resiko Bencana (IRB)	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%) 2. Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%) 2. Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			- PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	1. Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%) 2. Persentase pengunjung perpustakaan (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			- PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			- PROGRAM PERIZINANAN PENGGUNAAN ARSIP
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	1. Rerata Indeks Profesionalitas ASN	- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD 3. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	1. Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	-
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KABUPATEN KOTA
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			- PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	1. Indeks Inovasi daerah (IID)	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 2. Nilai LPPD Pemerintah Daerah 3. Presentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A 4. Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
			- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	1. Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Persentase desa mandiri (%) 2. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Presentase PMKS yang tertangani (%)	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			- PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) 2. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (tahun) 2. Angka kesakitan (%) 3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 3. Presentase Kunjungan Wisatawan	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) 2. Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	1. Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan 2. Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	1. Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas) 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	1. Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	1. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%) 2. Persentase sarana Perhubungan yang Layak	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
		Operasi (%) 3. Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	1. Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	1. Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City) 2. Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	1. Presentase Rumah Layak Huni 2. Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni 3. Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
			- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	1. Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak 2. Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor) 2. Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%) 3. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	1. Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	1. Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	1. Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	-

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	62.10
		2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	90.00
2	Terkendalnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71.00
		4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	40.00
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.35
		6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	205.60
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	50.00
		8	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	90.00
		10	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	30.00
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	11	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	70.00
		12	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	45.00
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	50.00
		14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	80.00
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	15	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.00
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	75.00
		17	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	10.50
		18	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	45.00
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	19	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	10.00
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2024
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	22	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	501
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	A (85)
		24	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3.75
		25	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	60.00
		26	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	90.00
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	45.00
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28	Persentase desa mandiri (%)	%	8.03
		29	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	59.03
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30	Presentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	58.00
		32	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	11.00
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	33	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	82.50
		34	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	80.00
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	35	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.60
		36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07
		37	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	17.50
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.57
		39	Angka kesakitan (%)	%	4.00
		40	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	85.00
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61
		42	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	81.00
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	43	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33.75
		44	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14.75
		45	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	60.00
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	46	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	65,275.29
		47	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	42,208.69
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	48	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	300
		49	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	50	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	47.50
		51	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	65.00
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	52	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	40.00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi	53	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	36.00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2024
	darat dan laut	54	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	80.00
		55	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	75.00
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	56	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	65.00
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	57	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00
		58	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	60.00
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59	Presentase Rumah Layak Huni	%	77.50
		60	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	60.00
		61	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60.00
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	70.00
		63	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	80.00
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64	Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	72.00
		65	Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	70.00
		66	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	55.00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	50.00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	68	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	85
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	69	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	65.00

ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 PER PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2,191,563,200.00
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57,483,990,777.00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	72,790,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	855,998,000.00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	99,105,000.00
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,742,861,750.00
7	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,754,529,000.00
8	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	45,584,887,000.00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5,211,272,000.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	216,920,000.00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	49,920,000.00
12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	620,000,000.00
13	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	483,220,000.00
14	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	393,009,200.00
15	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	42,750,000.00
16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284,478,000.00
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46,670,000.00
18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	692,762,000.00
19	PROGRAM PERIZINANAN PENGGUNAAN ARSIP	183,354,900.00
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,421,645,000.00
21	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,858,788,700.00
22	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5,373,060,350.00
23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300,000,000.00
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	349,888,567,827.00
25	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11,801,562,000.00
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,552,803,000.00
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KABUPATEN KOTA	502,138,236.00
28	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,958,118,650.00
29	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4,853,602,650.00
30	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,630,967,800.00
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	710,297,510,057.00
32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23,862,863,000.00
33	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,564,116,200.00
34	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23,010,703,600.00
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,391,517,000.00
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,392,162,300.00
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,779,392,950.00
38	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,614,360,300.00
39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47,300,000.00
40	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,534,467,000.00
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,709,713,000.00
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,266,330,400.00
43	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	55,208,000.00
44	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,286,089,500.00
45	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,560,840,000.00
46	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	435,567,350.00
47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	600,000,000.00
48	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15,000,200.00
49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	691,336,000.00
50	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99,922,000.00
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	197,090,000.00
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	290,000,000.00
53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	163,425,689,727.00
54	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4,080,486,500.00
55	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	299,510,535,184.00
56	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34,073,994,500.00
57	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	326,356,450.00
58	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	745,056,750.00
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	635,184,000.00
60	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7,557,667,000.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,102,240,350.00
62	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	568,897,100.00
63	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	600,081,950.00
64	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193,631,550.00
65	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,549,995,800.00
66	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,117,065,000.00
67	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,988,726,000.00
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	65,300,000.00
69	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	39,960,000.00
70	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13,054,399,300.00
71	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32,348,821,900.00
72	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	494,805,000.00
73	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	420,140,000.00
74	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	943,104,600.00
75	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	205,000,000.00
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16,379,730,000.00
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,289,555,000.00
78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	810,760,000.00
79	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	701,165,000.00
80	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	254,880,000.00
81	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	396,601,000.00
82	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	199,992,000.00
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,098,286,750.00
86	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,734,384,250.00
87	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	141,693,200.00
88	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	106,478,000.00
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160,276,583,380.00
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,400,895,400.00
91	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,189,119,750.00
92	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19,671,677,950.00
93	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7,235,517,256.00
94	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,320,027,500.00
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	565,190,000.00
96	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	852,400,000.00
97	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10,520,810,000.00
98	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	89,525,000,000.00
99	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	259,213,500.00
100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4,106,504,290.00
101	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	816,578,550.00
102	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,828,595,000.00
103	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	49,627,949,317.00
104	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	535,000,000.00
105	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300,000,000.00
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,908,891,650.00
107	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	446,750,000.00
108	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,819,715,550.00
109	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55,129,000.00
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	386,700,000.00
111	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49,410,000.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
112	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	98,610,000.00
113	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	212,838,000.00
114	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	179,876,700.00
115	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3,058,664,000.00
116	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	245,039,000.00
TOTAL ANGGARAN BELANJA DAERAH		2,248,506,173,551

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

rumus :

Jika terdapat anomali capaian kinerja maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Normalisasi capaian kinerja memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas sasaran dan indikator kinerja sasaran maka digunakan skala pengukuran ordinal. Skala penilaian peringkat kinerja mengacu berdasarkan pada formulir T-E. 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	90.01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75.01% ≤ 90%	Tinggi
3	65.01% ≤ 75%	Sedang
4	50.01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Halmahera Selatan merupakan kinerja tahun ke-4 pada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Halmahera Selatan 2024 adalah **75.33%** dengan Predikat **TINGGI**, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Halmahera Selatan di Tahun 2024 Cukup Berhasil. Adapun data detail hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Sumber Data
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	62.10	67.00	107.89	Badan Kesbangpol
		2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%)	%	90.00	70.00	77.78	Badan Kesbangpol
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71.00	97.00	110.00	SATPOL-PP
		4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	40.00	38.00	95.00	Dinas Damkar dan Penyelamatan
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.35	0.245	70.00	BNPB/BPBD
		6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	205.60	122.80	110.00	BNPB/BPBD
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	50.00	40.00	80.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		8	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3	4	110.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	90.00	88.10	97.89	Disdukcapil
		10	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	30.00	34.07	110.00	Disdukcapil
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	11	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	70.00	39.00	55.71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		12	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	45.00	31.95	71.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	50.00	30.02	60.04	Inspektorat
		14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	80.00	70.00	87.50	Inspektorat

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif								
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Sumber Data
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	15	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.00	74.02	100.03	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	75.00	55.56	74.08	Kemendagri
		17	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	10.50	11.65	110.00	BPKAD
		18	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	45.00	29.05	64.56	BPKAD
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	19	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	10.00	274.93	110.00	BPKAD
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	50	50.00	Diskominfo, Persandian dan Statistik
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00	80.00	100.00	Bappelitbangda
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	22	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	501	320	63.87	Badan Litbang Kemendagri
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	A (85)	CC (57.61)	67.78	Kemenpan-RB
		24	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3.75	Belum Rilis	0.00	Kemendagri
		25	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	60.00	0	0.00	Inspektorat
		26	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	90.00	100	110.00	Sekretariat DPRD
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	45.00	Belum Ada Capaian	0.00	Bagian Administrasi Pembangunan
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28	Persentase desa mandiri (%)	%	8.03	3.61	44.96	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
		29	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	59.03	63.86	108.18	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30	Presentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00	75.00	100.00	Dinas Sosial
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	58.00	51.12	88.14	DP3AKB
		32	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	11.00	5.2	110.00	DP3AKB
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	33	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	82.50	78.90	95.64	Dinas Pertanian dan Ketpang
		34	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	80.00	Belum Ada Capaian	0.00	Dinas Pertanian dan Ketpang
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	35	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.60	8.42	97.91	BPS
		36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07	13.4	95.24	BPS
		37	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	17.50	0.24	1.37	Dinas Pendidikan
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.57	66.71	100.21	BPS
		39	Angka kesakitan (%)	%	4.00	9.00	-25	BPS
		40	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	85.00	80.05	94.18	RSUD Labuha
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	63.94	104.82	DP3AKB
		42	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	81.00	83.00	102.47	DP3AKB
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	43	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33.75	54.59	110.00	Dinas Koperindag
		44	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14.75	7.46	50.58	Dinas Koperindag
		45	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	60.00	76.00	110.00	DISPARBUD
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	46	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	65,275.29	27,828.70	42.63	Dinas pertanian dan Ketpang
		47	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	42,208.69	45,972.99	108.92	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	48	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	300	88,431	110.00	DPM PTSP
		49	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100	DPM PTSP

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif								
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Sumber Data
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	50	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	47.50	9.58	20.17	Dinas Koperindag
		51	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	65.00	5.20	8.00	Dinas Koperindag
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	52	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	40.00	10.00	25.00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	53	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	36.00	27.34	75.94	Dinas PUPR
		54	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	80.00	85.00	106.25	Dinas Perhubungan
		55	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	75.00	88.00	110.00	Dinas Perhubungan
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	56	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	65.00	82.15	110.00	Dinas PUPR
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	57	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00	55.00	100.00	Diskominfo, Persandian dan Statistik
		58	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	60.00	65.00	108.33	Diskominfo, Persandian dan Statistik
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59	Presentase Rumah Layak Huni	%	77.50	69.93	90	Dinas PERKIM
		60	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	60.00	11.81	20	Dinas PERKIM
		61	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60.00	43.57	73	Dinas PERKIM
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	70.00	56.54	81	BPS/Dinas PERKIM
		63	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	80.00	50.62	63	BPS/Dinas PERKIM
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64	Indeks Kulitias Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	72.00	81.09	110.00	Neraca Lingkungan
		65	Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	70.00	52.45	74.93	Dinas Lingkupan Hidup
		66	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	55.00	65.00	110.00	Dinas PUPR
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	50.00	0.00	0.00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	68	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	85	61.00	71.76	DISPARBUD
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	69	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	65.00	Belum Ada Capaian	0.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2024							75.33	

Berikut ini penjabaran terkait capaian realisasi kinerja Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2024 :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	60.00	61.00	71.46	67.00
		2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	49.00	100.00	68.50	70.00
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	50.00	60.00	65.00	97.00
		4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	25.00	33.00	100.00	38.00
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	1.00	1.05	3.12	0.245
		6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	216.99	216.99	214.20	122.80
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	0.00	30.00	43.00	40.00
		8	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	2	7	3	4

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	69.29	79.44	89.59	88.10
		10	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	17.40	27.22	28.79	34.07
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	11	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	55.00	60.00	65.00	39.00
		12	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	30.00	35.00	40.00	31.95
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	29.00	29.00	37.00	30.02
		14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	76.05	76.05	72.12	70.00
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	15	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	51.00	53.00	58.66	74.02
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	0.00	0.00	0.00	55.56
		17	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	5.41	7.36	10.63	11.65
		18	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	28.84	29.38	28.99	29.05
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	19	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	259.78	270.77	271.60	274.93
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	27	30.40	45.50	50
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	100.00	100.00	100.00	80.00
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	22	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	10.00	50.00	110.00	320
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	53.47	55.85	56.03	CC (57.61)
		24	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-				Belum Rilis
		25	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	0.00	0.00	0.00	0
		26	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	128	64.00	64.00	100
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	Belum Ada Capaian	Belum Ada Capaian	Belum Ada Capaian	Belum Ada Capaian
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28	Persentase desa mandiri (%)	%	0	0.00	0.80	3.61
		29	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	76.71	76.71	67.47	63.86
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30	Presentase PMKS yang tertangani (%)	%	60.00	64.00	65.05	75.00
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	47.19	46.38	47.19	51.12
		32	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	2.00	3.00	3.00	5.2
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	33	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	78.00	79.00	82.00	78.90
		34	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	Belum Ada Capaian	Belum Ada Capaian	202.30	Belum Ada Capaian
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	35	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.10	8.16	8.17	8.42
		36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.79	12.97	13.03	13.04
		37	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	0.00	0.00	0.00	0.24
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	69.93	66.22	66.50	66.71
		39	Angka kesakitan (%)	%	16.75	0.16	13.75	9.00
		40	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	80.00	73.30	84.10	80.05
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	52.09	54.06	62.15	63.94
		42	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	%	78.00	54.00	62.00	83.00
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	43	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	0.23	4.10	4.23	54.59
		44	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	26.98	43.25	47.13	7.46
		45	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	30	35.00	50.00	76.00
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	46	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	43,661.00	43,043.00	37,161.96	27,828.70
		47	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	46,944.50	44,682.50	46,814.60	45,972.99

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	48	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	4.90	7.50	0.46	88,431
		49	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100	100
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	50	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	50.00	42.00	44.00	9.58
		51	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	3.10	11.40	0.99	5.20
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	52	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	0.00	35.00	113.00	10.00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	53	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	23.20	25.00	26.84	27.34
		54	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	75.00	90.00	95.00	85.00
		55	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	70.00	90.00	90.00	88.00
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	56	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	60.01	61.51	63.01	82.15
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	57	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (smart City)	%	40.00	45.00	50.00	55.00
		58	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	28.00	40.00	50.00	65.00
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59	Presentase Rumah Layak Huni	%	75.75	79.00	69.00	69.93
		60	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	4.00	10.00	17.00	11.81
		61	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	22.00	33.00	44.00	43.57
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	59.69	38.00	10.00	56.54
		63	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	68.40	50.00	9.00	50.62
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	74.63	75.43	81.13	81.09
		65	Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	-	48.50	51.81	52.45
		66	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	60.05	62.00	63.50	65.00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	68	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	30	40.00	40.00	61.00
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	69	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	100.00	100.00	100.00	Belum Ada Capaian

Berikut ini penjabaran terkait capaian realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	70.00	67.00	95.71
		2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%)	%	100.00	70.00	70.00
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	82.75	97.00	110.00
		4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	50.00	38.00	76.00
3		5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.40	0.245	61.25

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	202.40	122.80	110.00
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	60.00	40.00	66.67
		8	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	25	4	16.00
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	100.00	88.10	88.10
		10	Persentase penduduk usia 17 tahun dibawah yang memiliki KIA (%)	%	50.00	34.07	68.14
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	11	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	80.00	39.00	48.75
		12	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	55.00	31.95	58.09
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	70.00	30.02	42.89
		14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	90.00	70.00	77.78
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	15	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	82.00	74.02	90.27
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	85.00	55.56	65.36
		17	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	11.50	11.65	101.30
		18	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	55.00	29.05	52.82
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	19	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	90.00	274.93	110.00
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	50	50.00
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	88.00	80.00	90.91
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	22	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	1001	320	31.97
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	AA (90.00)	CC (57.61)	64.01
		24	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	4.00	Belum Rilis	0.00
		25	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	80	0	0.00
		26	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	100	100	100.00
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	60.00	Belum Ada Capaian	0.00
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28	Persentase desa mandiri (%)	%	12.04	3.61	29.98
		29	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	48.19	63.86	110.00
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30	Presentase PMKS yang tertangani (%)	%	85.00	75.00	88.24
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	62	51.12	82.45
		32	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	5	5.2	96.00
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	33	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	87.50	78.90	90.17
		34	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	90.00	Belum Ada Capaian	0.00
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	35	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.97	8.42	93.87
		36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.72	13.04	88.59

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
		37	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	25.00	0.24	0.96
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.93	66.71	99.67
		39	Angka kesakitan (%)	%	2.00	9.00	-250.00
		40	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	90.00	80.05	88.94
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65	63.94	98.37
		42	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	85.00	83.00	97.65
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	43	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34.25	54.59	110.00
		44	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15.50	7.46	48.13
		45	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	80	76.00	95.00
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	46	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	78,983.10	27,828.70	35.23
		47	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	45,731.90	45,972.99	100.53
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	48	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	500.00	88,431	110.00
		49	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100.00
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	50	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	52.50	9.58	18.25
		51	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	75.00	5.20	6.93
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	52	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	50.00	10.00	20.00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	53	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	40.00	27.34	68.35
		54	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	90.00	85.00	94.44
		55	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	80.00	88.00	110.00
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	56	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	75.00	82.15	109.53
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	57	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	70.00	55.00	78.57
		58	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	70.00	65.00	92.86
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59	Presentase Rumah Layak Huni	%	90.00	69.93	78
		60	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	70.00	11.81	17
		61	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	70.00	43.57	62
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	90.00	56.54	63
		63	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	90.00	50.62	56
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64	Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	76.00	81.09	106.70
		65	Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	80.00	52.45	65.56
		66	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	65.00	65.00	100.00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	60.00	Belum Ada Capaian	0.00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	68	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	90	61.00	67.78
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	69	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	75.00	Belum Ada Capaian	0.00

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 SASARAN 1 : MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM, WAWASAN KEBANGSAAN, POLITIK DAN BERDEMOKRASI MASYARAKAT HALMAHERA SELATAN.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	62.10	67.00	107.89	Sangat Tinggi	Badan Kesbangpol
2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	90.00	70.00	77.78	Tinggi	Badan Kesbangpol
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1					92.83	Sangat Tinggi	

3.2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah, mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.6 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	62.10	67.00	107.89

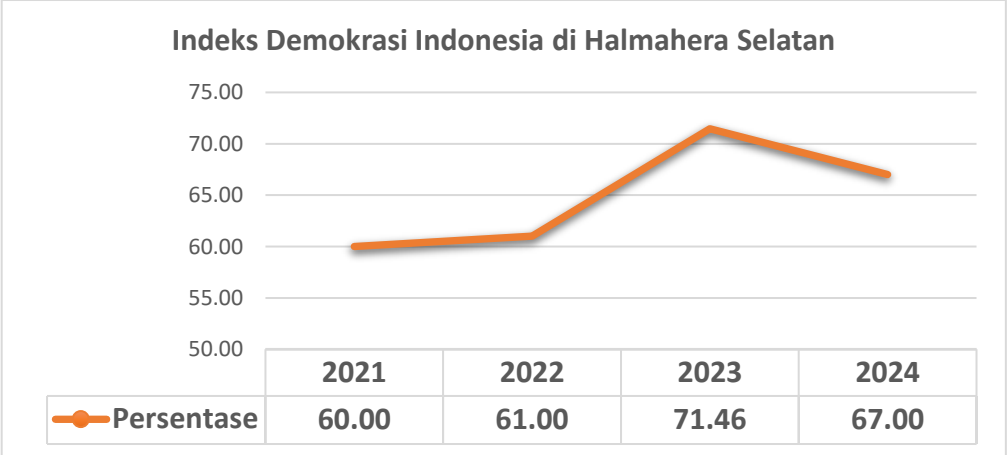
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Halmahera Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **62,10%**, namun realisasinya mencapai **67,00%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **107,89%**.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Halmahera Selatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, peningkatan transparansi pemerintahan, serta efektivitas lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.1 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan



Sumber : Badan Kesbangpol

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian ,.... Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	67.00	70.00	95.71

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan Anggaran sehingga tidak terjangkau pemantauan hingga pelosok

2. Faktor Pendukung

- Penyelenggaraan Pemilu

3. Upaya/Solusi

- Tersedianya kebutuhan anggaran

3.2.1.2 Persentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani.

Persentase Potensi Gangguan Konflik yang Tertangani adalah indikator yang mengukur seberapa banyak potensi gangguan konflik di suatu daerah yang telah berhasil diidentifikasi dan ditangani oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pihak terkait. Gangguan konflik dapat mencakup konflik sosial, politik, ekonomi, serta ketegangan antar kelompok masyarakat.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.7 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

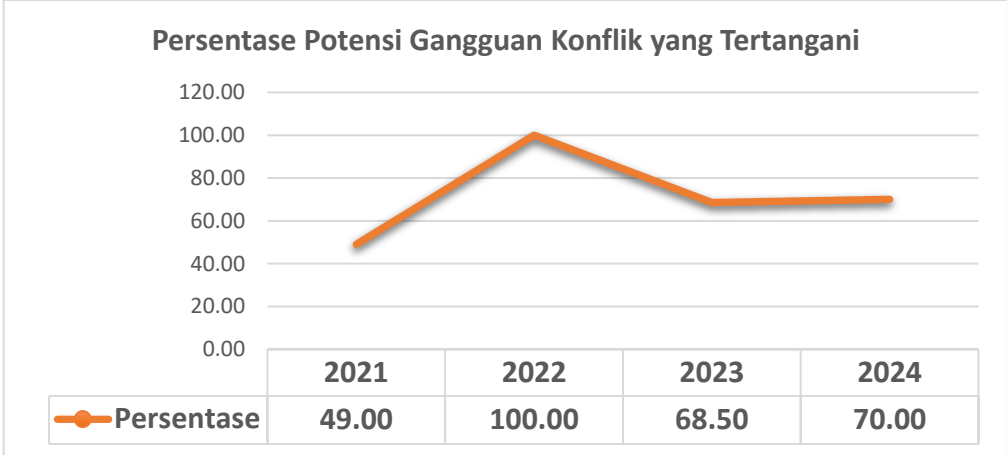
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	90.00	70.00	77.78

Pada tahun 2024, Persentase Potensi Gangguan Konflik yang Tertangani ditargetkan sebesar 90%, namun realisasinya hanya mencapai 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 77,78%.Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar potensi gangguan konflik telah berhasil ditangani, masih terdapat gap sebesar 22,22% dari target yang ditetapkan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.2 Perkembangan Persentase Potensi Gangguan Konflik yang Tertangani



Sumber : Badan Kesbangpol

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	70.00	100.00	70.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Tersedianya Anggota Kominda Dan Tim Terpadu dalam melaksanakan namun dukungan anggaran tidak cukup dalam hal operasional
- Tersediannya dukungan anggaran namun tidak mencukupi untuk membackup seluruh program kegiatan yang tertuang pada Rencana dan strategis (Resntra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan 2021-2026
- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan masih minim sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggngjawab
- Kurangnya pemahaman aparatur atas Tugas Pokok Dan Fungsi
- Minimnya Dukungan Sarana Dan Prasarana dalam hal ini gedung kantor yang tidak mendukung sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan kerja

2. Faktor Pendukung

- Tersedianya Anggota Kominda Dan Tim Terpadu dalam melaksanakan pemantauan dan mitigasi konflik

3. Upaya/Solusi

- Penambahan Anggaran pada setiap program dan kegiatan
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Menyediakan sarana dan prasarana gedung kantor

3.2.2 SASARAN 2 : TERKENDALINYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71.00	97.00	110.00	Sangat Tinggi	SATPOL-PP

2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	40.00	38.00	95.00	Sangat Tinggi	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2					102.50	Sangat Tinggi	

3.2.2.1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Formula Perhitungan Indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKKU) adalah sebagai berikut :

IKKU = 35% Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/K3 + 35% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 30% Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Maka sebelum menghitung formula IKKU maka harus terlebih dahulu kita menghitung :

- 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/K3
- 2. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
- 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.10 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71.00	97.00	110.00

Untuk menghitung capaian IKKU tahun 2024 maka terlebih dahulu kita menghitung indikator pendukungnya, Adapun penghitungan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Indikator Penunjang Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian pelanggaran perda k3 (keamanan, ketertiban dan keindahan)	75%	75%	100%
2	Presentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	85%	85%	100%
3	Presentase peningkatan kapasitas SATPOL PP	50%	45%	90%

Maka Nilai IKKU (Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum)

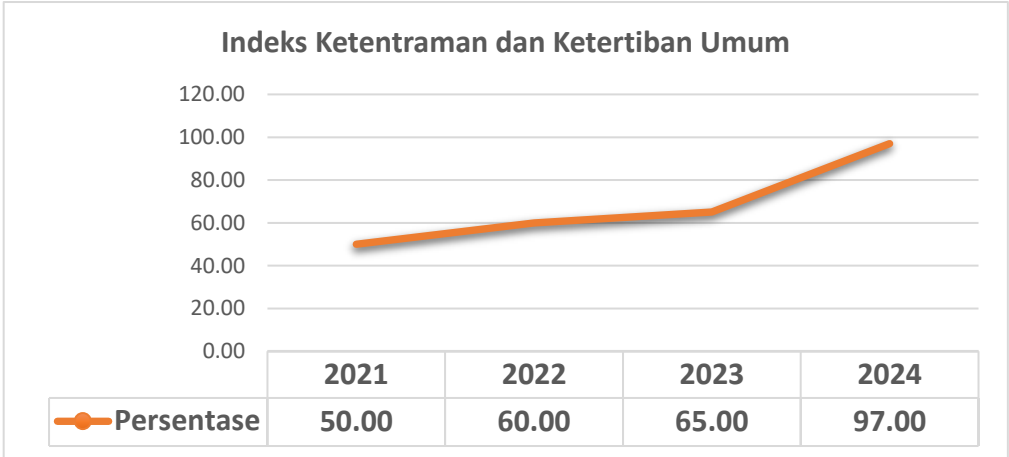
= (35% x 100%) + (35% x 100%) + (30% x 90%)
= 35% + 35% + 27%
= 97%

Pada tahun 2024 terdapat 24 kasus pelanggaranperda/K3 yang terselesaikan, 21 jumlah gangguan trantib yang diselesaikan dan 80 personil Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti Diklat Kesamaptaan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.3 Perkembangan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum



Sumber : Satpol-PP

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	97.00	82.75	110.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurang jumlah PNS yang hanya 26 orang sehingga ada jabatan yang kosong
- Belum Optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
- Sosialisasi produk hukum daerah tidak terlaksana dengan maksimal
- Kerjasama mitra instansi belum terselenggarasecaramaksimal
- Belum adanya Pos pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Program bidang perlindungan masyarakat belum terlaksana secara optimal
- Sarana Prasarana pendukung belum memadai, seperti Gedung Kantor
- Regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat belum lengkap dan sudah tidak uptodate dengan aturan-aturan terbaru.
- Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal
- Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal

2. Faktor Pendukung

- Jumlah anggota (Tenaga Honorer) yang berjumlah 152 orang sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian
- Kerjasama yang baik dengan beberapa instansi
- SDM yang handal dalam penanganan gangguan trantibum
- Ketersedian Anggaran

3. Upaya/Solusi

- Penetapan jumlah SATLINMAS berdasarkan Permendagri dan Target SPM
- Mengkordinasikan dengan Tim Anggaran agar dapat mengalokasi Dana guna membiayai kegiatan-kegiatan Pelatihan Kesamaptaan Tingkat Lanjutan
- Mengusulkan kepada Instansi terkait untuk penambahan PNS / P3K
- Mengusulkan kepada Instansi terkait untuk mengisi kekosongan jabatan

- Melakukan revisi atas produk Peraturan Daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- Mengusulkan untuk pembangunanan Gedung Kantor yang representatif
- Meningkatkan dukungan fasilitas dan sarana prasarana pengamanan yang memadai.
- menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tepat.
- melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan gangguan trantibum
- Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang memuat sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan.
- Menyediakan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan yang telah berlaku, baik secara offline (pamflet, papan pengumuman, dll) maupun online melalui platform media sosial.

3.2.2.2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam adalah indikator kinerja yang mengukur kecepatan respons layanan pemadam kebakaran dalam menangani kejadian kebakaran di suatu wilayah. Indikator ini penting karena menunjukkan efektivitas dan kesiapan layanan pemadam kebakaran dalam menangani insiden secara cepat, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian jiwa dan harta benda. Standar ideal respons pemadam kebakaran umumnya berada di bawah 15 menit untuk area perkotaan dan maksimal 24 jam untuk daerah terpencil atau sulit dijangkau

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.13 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

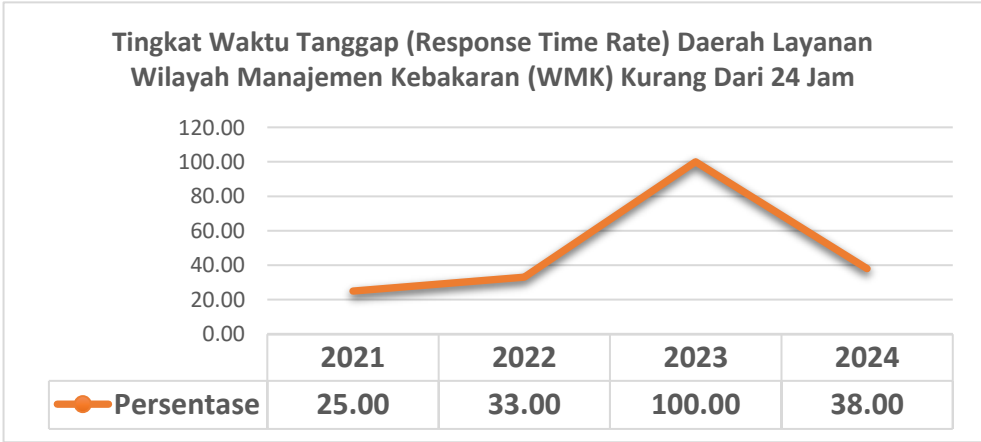
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	40.00	38.00	95.00

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 40%, namun realisasinya hanya mencapai 38%, dengan capaian kinerja sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hampir mencapai target, masih terdapat selisih 5% yang perlu diperbaiki

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.4 Perkembangan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam



Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kurang Dari 24 Jam Tahun 2024* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	38	50.00	76.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan Peralatan dan Sarana: Keterbatasan peralatan dan sarana dapat menyebabkan kinerja penanganan kebakaran menjadi tidak efektif.
- Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kinerja penanganan kebakaran menjadi tidak efektif.
- Faktor Penghambat Eksternal
 1. Kurangnya Dukungan Masyarakat: Kurangnya dukungan masyarakat dapat menyebabkan kinerja penanganan kebakaran menjadi tidak efektif.
 2. Kurangnya Kerja Sama dengan Instansi Lain: Kurangnya kerja sama dengan instansi lain dapat menyebabkan kinerja penanganan kebakaran menjadi tidak efektif.
 3. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kinerja penanganan kebakaran menjadi tidak efektif.

2. Faktor Pendukung

- Ketersediaan Peralatan dan Sarana yang Memadai: Ketersediaan peralatan dan sarana yang memadai dan terawat dengan baik untuk mendukung penanganan kebakaran.
- Ketersediaan Anggaran yang Memadai: Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan kebakaran.
- Faktor Pendukung Eksternal
 1. Kerja Sama dengan Instansi Lain: Kerja sama dengan instansi lain seperti TNI, POLRI, dan BMKG untuk mendukung penanganan kebakaran.
 2. Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat yang kuat untuk mendukung penanganan kebakaran.
 3. Ketersediaan Teknologi yang Memadai: Ketersediaan teknologi yang memadai untuk mendukung penanganan kebakaran

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 1. Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan: Melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam penanganan kebakaran.
 2. Rekrutmen SDM yang Berkualitas: Melakukan rekrutmen SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan kebakaran.
- Meningkatkan Kualitas Peralatan dan Sarana
 1. Pengadaan Peralatan yang Memadai: Melakukan pengadaan peralatan yang memadai dan terawat dengan baik untuk mendukung penanganan kebakaran.
 2. Pemeliharaan Peralatan yang Baik: Melakukan pemeliharaan peralatan yang baik untuk memastikan bahwa peralatan dapat berfungsi dengan baik.

3.2.3 SASARAN 3 : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.35	0.245	70.00	Sedang	BNPB/BPBD
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	205.60	122.80	110.00	Sangat Tinggi	BNPB/BPBD
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3					90.00	Tinggi	

3.2.3.1 Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan memulihkan diri dari berbagai ancaman, baik dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun pemerintahan. IKD mencerminkan sejauh mana sebuah daerah mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, krisis ekonomi, dan gangguan sosial

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.16 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

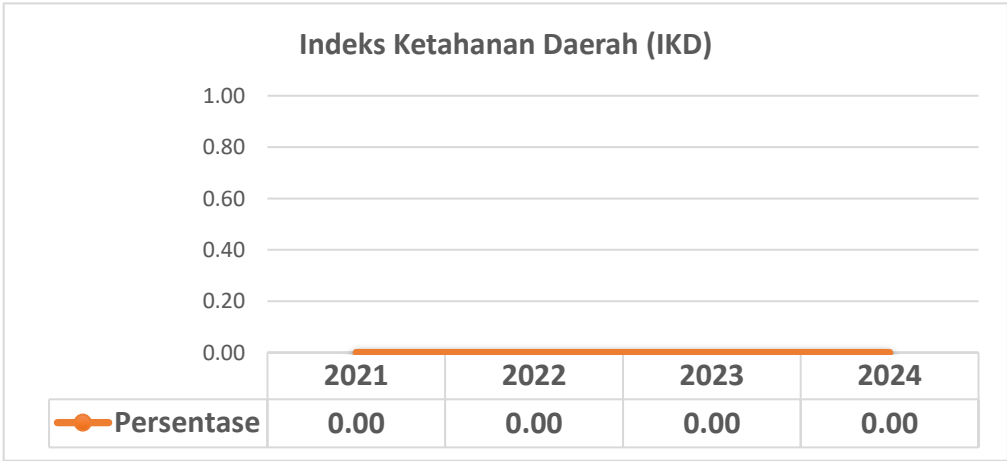
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.35	0.245	70.00

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,35, namun realisasinya hanya mencapai 0,245, sehingga capaian kinerja berada pada 70% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan daerah masih di bawah harapan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.5 Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



Sumber : BPBD

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.245	0.40	61.25

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Letak Geografis yang kepulauan dan faktor cuaca ekstrim, sehingga menjadi peggambat tersendiri dalam penanganan bencana

2. Faktor Pendukung

- Sumber pendanaan yang cukup yang bersumber dari APBD Pokok dan Perubahan serta APBN

3. Upaya/Solusi

- Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana yang Harus di dukung penuh oleh pemerintah daerah

3.2.3.2 Indeks Resiko Bencana (IRB).

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah indikator yang mengukur tingkat risiko suatu daerah terhadap bencana, dengan mempertimbangkan **bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) dalam menghadapi bencana**. Indeks ini dikeluarkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)** untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.18 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

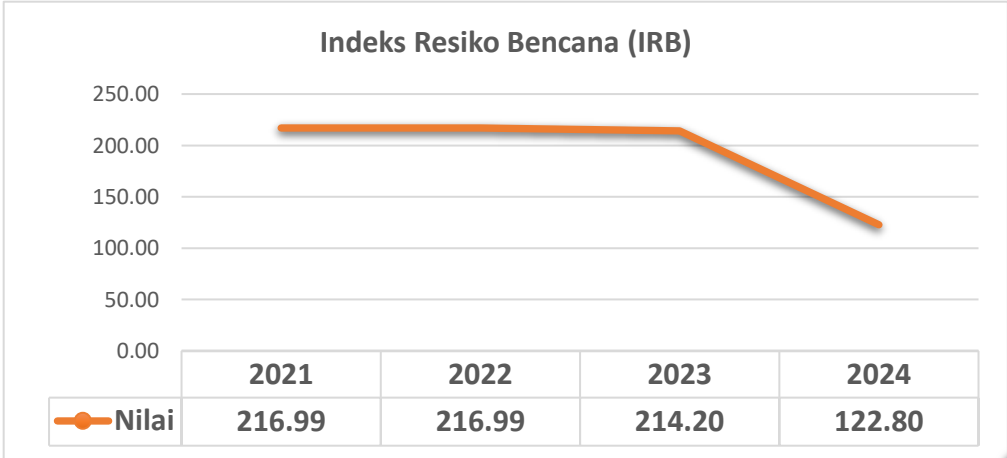
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	205.60	122.80	110.00

Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 ditargetkan sebesar 205,60, namun realisasinya hanya mencapai 122,80, dengan capaian kinerja sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana di daerah tersebut lebih rendah dari yang diperkirakan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan **Indeks Resiko Bencana (IRB)** dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.6 Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB)



Sumber : BPBD

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian **Indeks Resiko Bencana (IRB)** Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	122.80	202.40	110.00

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Rentang kendali Kabupaten Halmahera Selatan yang begitu Luas Menjadi Penghambat Tersendiri dalam meminimalisir Resiko Bencana

2. Faktor Pendukung

- Sumber pendanaan yang cukup yang bersumber dari APBD Pokok serta Dukungan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana

3. Upaya/Solusi

- Membuat Rencana Penanggulangan Bencana Lintas Sektor yang Terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Masa maupun Elektronik

3.2.4 SASARAN 4 : MENINGKATNYA PRESTASI OLAH RAGA DAN PARTISIPASI GENERASI MUDA.

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	50.00	40.00	80.00	Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3	4	110.00	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4					95.00	Sangat Tinggi	

3.2.4.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif adalah indikator yang mengukur seberapa banyak organisasi kepemudaan di suatu daerah yang masih berfungsi secara efektif dalam menjalankan kegiatan dan programnya. Organisasi pemuda yang aktif biasanya memiliki kegiatan rutin, struktur kepengurusan yang jelas, serta keterlibatan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di daerahnya.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.21 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	50.00	40.00	80.00

Target kinerja "Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif" tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi 40% dari target 50%, sehingga capaian kinerjanya hanya 80%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keberlanjutan organisasi pemuda di daerah masih perlu ditingkatkan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.7 Perkembangan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	40.00	60.00	66.67

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Belum adanya dukung pendanaan pada organisasi-organisasi Kepemudaan untuk melaksanakan kegiatan

2. Faktor Pendukung

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam kepemudaan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan

3. Upaya/Solusi

- Dukungan dana untuk organisasi kepemudaan
- Peningkatan pembinaan untuk pemuda dalam berorganisasi
- Komitmen Pemerintah Daerah Untuk Pengembangan SDM Atlet dan peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

3.2.4.2 Jumlah Atlet Berprestasi.

Jumlah Atlet Berprestasi adalah indikator yang mengukur jumlah atlet di suatu daerah yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi olahraga, baik di tingkat **lokal, nasional, maupun internasional**. Atlet berprestasi adalah mereka yang berhasil memenangkan medali atau penghargaan dalam ajang olahraga resmi yang diakui oleh federasi atau organisasi olahraga terkait. Jika jumlah atlet berprestasi meningkat, itu menunjukkan bahwa program pembinaan olahraga di daerah berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.23 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3	4	110.00

Target kinerja "**Jumlah Atlet Berprestasi**" tahun 2024 **melebihi target yang ditetapkan**, dengan realisasi **4 atlet** dari target **3 atlet**, namun capaian kinerjanya tercatat **80%**, yang kemungkinan terjadi karena metode perhitungan capaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa **pembinaan atlet di daerah sudah menunjukkan hasil positif**, dengan jumlah atlet berprestasi yang lebih tinggi dari yang direncanakan. Atlet-atlet dimaksud adalah 2 atlet putri Halmahera Selatan yang lolos ke POPNAS, 1 atlet tenis lapangan di kejuaraan Piala Gubernur dan 1 atlet bulutangkis Halmahera Selatan yang mengikuti kejuaraan internasional bulutangkis usia muda di Singapura.



B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "*Jumlah Atlet Berprestasi*" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.8 Perkembangan Jumlah Atlet Berprestasi



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "*Jumlah Atlet Berprestasi*" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3	25	12.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Profesi sebagai olahragawan belum menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi. Masalah ini menjadi sangat penting sehingga masih banyak pandangan yang mengatakan bahwa menjadi atlet masa depannya tidak terjamin. Bahkan orang tua masih banyak yang tidak mengizinkan anak-anaknya menjadi atlet.

2. Faktor Pendukung

- Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam Keolahragaan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan.

3. Upaya/Solusi

- peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemda, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis organisasi olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.

3.2.5 SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	90.00	88.10	97.89	Sangat Tinggi	Dinas Dukcapil
2	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	30.00	34.07	110.00	Sangat Tinggi	Dinas Dukcapil
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5					103.94	Sangat Tinggi	

3.2.5.1 Presentase Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki e-KTP.

Indikator Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki e-KTP adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang berusia 17 tahun ke atas (atau yang sudah menikah) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia tersebut. Fungsi dan Manfaat dari indikator ini adalah :

1. **Mengukur Kepemilikan Identitas Resmi** → Menunjukkan seberapa banyak penduduk yang memiliki dokumen identitas yang sah.
2. **Menilai Efektivitas Program Administrasi Kependudukan** → Menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam perekaman dan penerbitan e-KTP.
3. **Mendukung Perencanaan Kebijakan** → Berguna untuk keperluan pemilu, pelayanan publik, serta program sosial dan ekonomi berbasis data kependudukan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.26 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

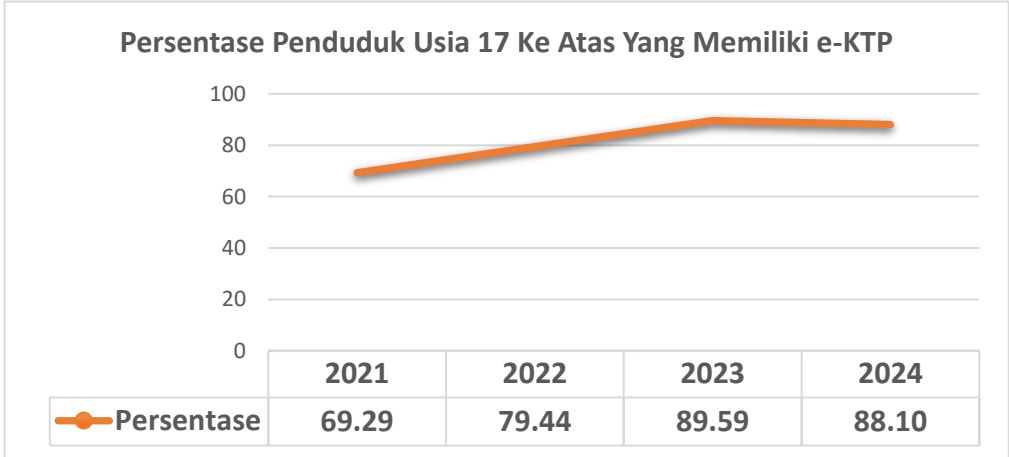
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	90.00	88.10	97.89

Realisasi Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki e-KTP di Halmahera Selatan tahun 2024 adalah 88.10% dari target 90% sehingga capaian yang diperoleh 97.89%. Ini menunjukkan bahwa realisasi masih sedikit di bawah tetapi sudah mendekati target yang diinginkan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki e-KTP dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.9 Perkembangan Penduduk Usia 17 Ke Atas Yang Memiliki e-KTP



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian perkembangan Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki e-KTP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	88.10	100.00	88.10

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki e-KTP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	88.10	99.00	88.99

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kondisi geografis daerah kepulauan menyebabkan akses masyarakat yang sulit dan mahal untuk ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Faktor Pendukung

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

3. Upaya/Solusi

- Dilakukannya kegiatan perekaman di setiap kecamatan

3.2.5.2 Persentase Penduduk Usia 17 Tahun Kebawah Yang Memiliki KIA.

Indikator Persentase Penduduk Usia 17 Tahun ke Bawah yang Memiliki KIA adalah ukuran yang menunjukkan **proporsi anak berusia di bawah 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)** dibandingkan dengan total jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut. Fungsi dan Manfaat dari indikator ini adalah :

1. Mengukur Kepemilikan Identitas Resmi bagi Anak → Menunjukkan sejauh mana anak-anak telah memiliki dokumen identitas resmi.

2. Mendukung Akses ke Layanan Publik → KIA berguna untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan administrasi lainnya.

3. Menilai Efektivitas Program Administrasi Kependudukan → Menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam penerbitan KIA.

4. Mendukung Perencanaan Kebijakan → Berguna untuk perencanaan layanan publik yang lebih inklusif bagi anak-anak.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.29 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

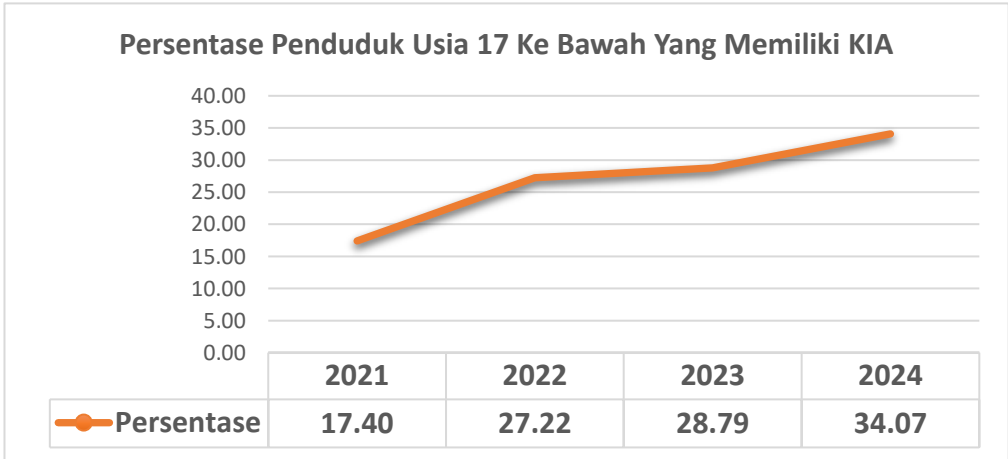
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	30.00	34.07	110.00

Target kinerja “Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA” tahun 2024 sebesar 30% dan realisasinya sebesar 34.07% dengan capaian kinerja sebesar 110%, hal ini menunjukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan di Tahun 2024 telah berhasil menjalankan program secara efektif.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.10 Perkembangan Penduduk Usia 17 Ke Bawah Yang Memiliki KIA



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	34.07	50.00	68.14

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	34.07	30.00	110

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya kepemilikan dokuman KIA bagi anak

2. Faktor Pendukung

- Dilakukan kegiatan jemput bola perekaman KIA siswa sekolah di beberapa kecamatan terdekat
- Kesadaran masyarakat yang meningkat dalam mengurus dokumen kependudukan untuk anak-anak mereka.

3. Upaya/Solusi

- Dilakukannya kegiatan sosialisasi mengenai KIA dan perekaman di setiap kecamatan.

3.2.6 SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	70.00	39.00	55.71	Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	45.00	31.95	71.00	Sedang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 6					63.36	Rendah	

3.2.6.1 Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku.

Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah standar yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi atau daerah mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan ini mencakup kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pengelolaan arsip dinamis, digitalisasi, serta pengawasan dan audit. Tujuannya adalah memastikan arsip tertata dengan baik, mudah diakses, serta aman dari kerusakan atau kehilangan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.33 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

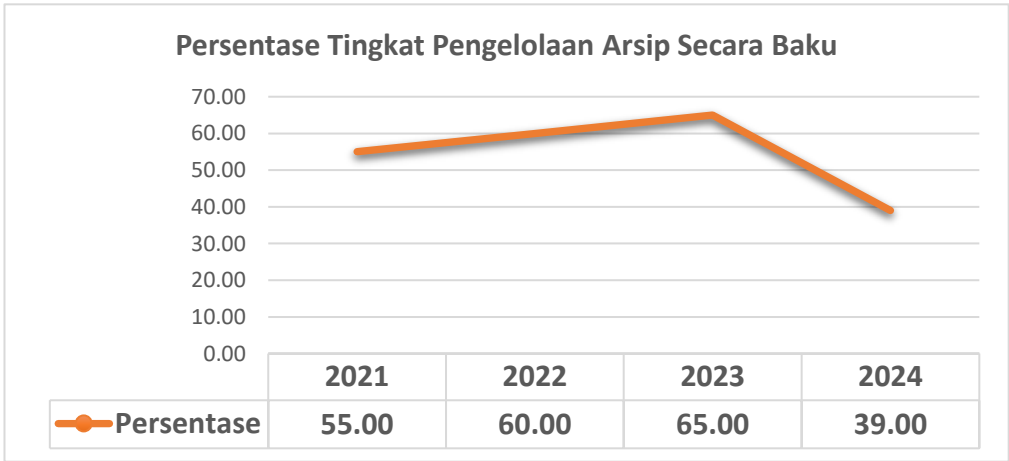
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	70.00	39.00	55.71

Tingkat Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 baru mencapai **39%** dari target **70%**, yang berarti baru sekitar **55.71% dari target yang diharapkan**. Ini menunjukkan bahwa masih ada gap yang cukup besar dalam upaya pencapaian standar pengelolaan arsip di daerah.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan tingkat pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.11 Perkembangan Pengelolaan Arsip Secara Baku



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	39.00	80.00	48.75

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian tingkat pengelolaan arsip secara baku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	39.00	80.00	48.75

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Belumnya Diterapkan Arsip Digital, Kurangnya SDM Arsiparis dan belum tersedia Sarana dan Prasarana yang ada di Record Center di masing - masing OPD

2. Faktor Pendukung.

- Kesadaran Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan Pengelolaan Arsip

3. Upaya/Solusi

- Penerapan Arsip Digital di Masing masing OPD, Melakukan Peningkatan SDM Arsiparis dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang ada di Record Center Masing masing OPD
- Dilakukan juga pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun untuk mengelola penumpukan arsip yang tidak lagi bernilai guna.
- Melaksanakan Bimtek Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)



3.2.6.2 Persentase Pengunjung Perpustakaan.

Persentase Pengunjung Perpustakaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah populasi atau target yang ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas layanan perpustakaan dalam menarik minat baca dan meningkatkan literasi masyarakat.

Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Indikator ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan koleksi buku, fasilitas, layanan digital, serta program literasi yang diselenggarakan perpustakaan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.26 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	45.00	31.95	71.00

Capaian **Persentase Pengunjung Perpustakaan** di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 mencapai **31,95%** dari target **45%**, yang berarti baru sekitar **71% dari target yang ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih di bawah ekspektasi.

- Kegiatan Perpustakaan Keliling di beberapa Sekolah Dasar



- Kegiatan Lomba Bertutur.



- Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan pada SMP, SMA, Sekolah Tinggi dan Beberapa Kecamatan.



- Kegiatan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun



B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase Pengunjung Perpustakaan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.12 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	31.95	55.00	58.09

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	31.95	100.00	31.95

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan di Perpustakaan Sekolah dan Desa

2. Faktor Pendukung

- Kesadaran Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan Pelayanan Perpustakaan

3. Upaya/Solusi

- Pengadaan sarana dan Prasarana Perpustakaan, Melakukan BIMTEK Pengelola dan Pustakawan di Perpustakaan Sekolah dan Desa
- Pada tahun 2024, Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan upaya dalam meningkatkan pengelolaan arsip sesuai standar. Salah satu langkah nyata adalah peresmian Pojok Baca Digital (Pocadi) oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat setempat.

3.2.7 SASARAN 7 : MENINGKATNYA INTEGRITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI APARATUR SIPIL NEGARA.

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	50.00	30.02	60.04	Rendah	Inspektorat
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	80.00	70.00	87.50	Tinggi	Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 7					73.77	Sedang	

3.2.7.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Harus Ditindaklanjuti.

Mekanisme atau prosedur penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh auditi diawali saat diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah auditi menerima LHP dan melihat rekomendasi temuan yang disampaikan, kemudian auditi melakukan penyelesaian sesuai dengan hasil rekomendasi baik itu berupa temuan administrasi ataupun finansial.

Formulasi Perhitungan : (Jumlah rekomendasi internal yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi internal) x 100 %. Sumber Data diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Laporan Hasil Pemeriksaan Pihak Internal).

Tindaklanjut yang dilakukan audit terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, yaitu dengan cara menyelesaikan temuan sesuai dengan rekomedasi APIP baik itu berupa penyelesaian administrasi maupun penyelesaian keuangan dengan cara menyetor ke rekening kas daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.30 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

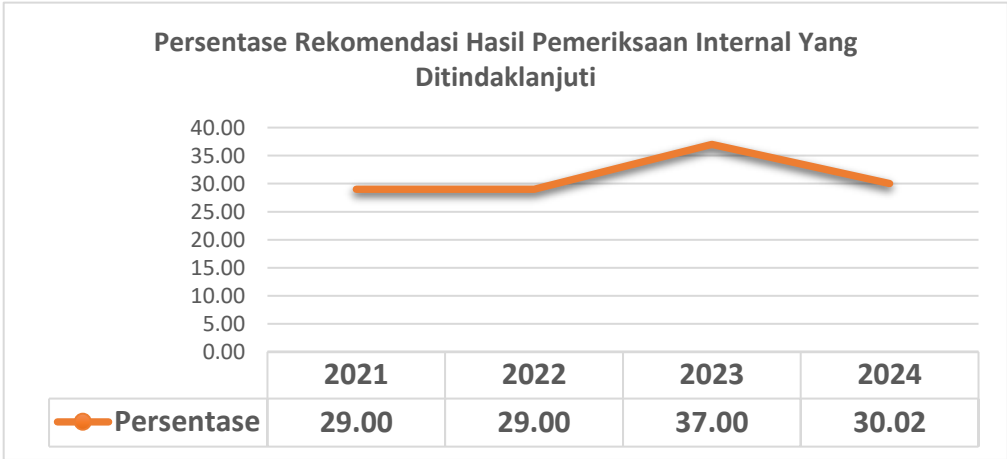
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	50.00	30.02	60.04

Realisasi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti adalah 30.02 % dan capaiannya sebesar 60.04 % dari target yang ditetapkan sebesar 50 %. Hal ini menunjukan sudah sebagian besar OPD menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan internal.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.13 Perkembangan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti



Sumber : Inspektorat Halmahera Selatan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	30.02	70.00	42.89

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga auditor untuk melakukan pendampingan tindak lanjut internal

2. Faktor Pendukung

- Melakukan pemantauan secara berkala tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

3. Upaya/Solusi

- Pimpinan OPD dan Kepala Desa harus diberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan administrasi jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti

3.2.7.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Harus Ditindaklanjuti.

Mekanisme atau prosedur penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh auditi diawali saat diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah auditi menerima LHP dan melihat rekomendasi temuan yang disampaikan, kemudian auditi melakukan penyelesaian sesuai dengan hasil rekomendasi baik itu berupa temuan administrasi ataupun finansial.

Formulasi Perhitungan : (Jumlah rekomendasi eksternal yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi eksternal) x 100 %. Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Laporan Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal (BPK).

Tindaklanjut yang dilakukan auditi terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan cara menyelesaikan temuan sesuai dengan rekomedasi BPK baik itu berupa penyelesaian administrasi maupun penyelesaian keuangan dengan cara menyetor ke rekening kas daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.32 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

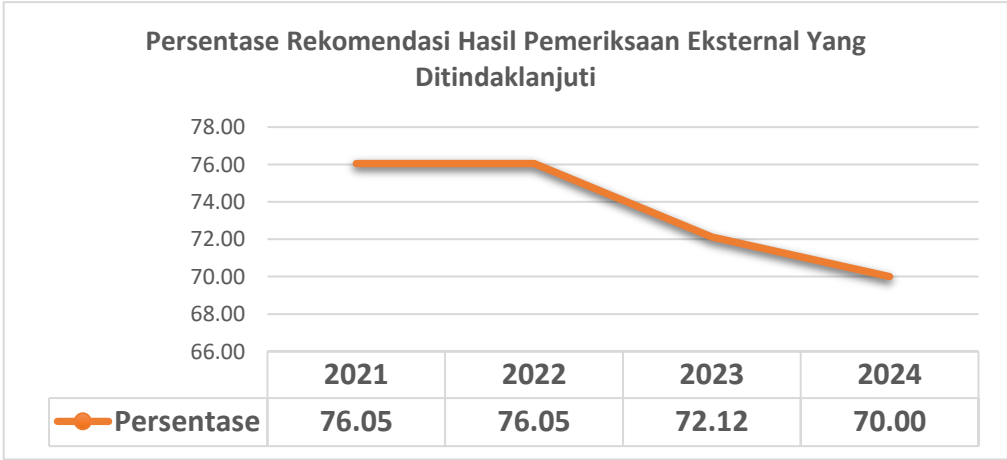
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	80.00	70.00	87.50

Realisasi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti adalah 70 % dan capaiannya sebesar 87.50 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 %. Hal ini menunjukkan sudah sebagian besar OPD menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan eksternal.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.14 Perkembangan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti



Sumber : Inspektorat Halmahera Selatan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	70.00	90.00	77.78

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam memberikan prioritas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan

2. Faktor Pendukung

- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI yang mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan

3. Upaya/Solusi

- Pimpinan OPD harus diberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan administrasi jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti

3.2.8 SASARAN 8 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR SIPIL NEGARA.

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.00	74.02	100.03	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 8					100.03	Sangat Tinggi	

3.2.8.1 Rerata Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Indeks ini digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas kinerja ASN berdasarkan standar tertentu yang mencerminkan kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui 4 (empat) dimensi utama, yaitu :

- **Kualifikasi** → Pendidikan formal yang dimiliki ASN sesuai dengan persyaratan jabatan.
- **Kompetensi** → Kemampuan ASN dalam menjalankan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan yang relevan.
- **Kinerja** → Evaluasi terhadap hasil kerja ASN berdasarkan target yang ditetapkan.
- **Disiplin** → Kepatuhan ASN terhadap aturan, kode etik, dan regulasi yang berlaku.

Indeks Profesionalitas ASN juga bertujuan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Memastikan ASN memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, Mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dan Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan ASN.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.35 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.00	74.02	100.03

Ditahun 2024, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mencapai target nilai Indeks Profesionalitas ASN yakni senilai 74,02 dari target senilai 74,00.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi se-Wilayah Kerja Kantor Regional XI BKN Data Per 19 Desember 2024 Sumber: SIASN BKN									
No	Nama Instansi	Kategori	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Nilai	Total
1	Pemerintah Kab. Minahasa	tinggi	3.613	20,18	32,58	25,01	5	82,77	299.046
2	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	tinggi	2.156	21,05	31,52	25,09	5	82,66	178.208
3	Pemerintah Kota Manado	tinggi	4.514	21,23	30,87	24,8	4,99	81,89	369.634
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	sedang	3.246	20,75	29,84	24,99	5	80,58	261.572
5	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	sedang	2.362	20,94	29,3	25,07	5	80,32	189.705
6	Pemerintah Kab. Bone Bolango	sedang	3.365	21,16	28,39	25,6	5	80,16	269.726
7	Pemerintah Provinsi Gorontalo	sedang	4.988	21,99	27,13	25,34	5	79,46	396.365
8	Pemerintah Kab. Gorontalo	sedang	4.464	20,73	27,72	25,12	5	78,57	350.737
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	sedang	9.709	21,6	26,32	24,99	5	77,9	756.358
10	Pemerintah Kota Gorontalo	sedang	3.549	21,24	27,29	24,26	5	77,79	276.082
11	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	sedang	2.892	20,63	27,01	25,14	5	77,78	224.948
12	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	sedang	2.261	21,22	26,38	25,11	5	77,7	175.688
13	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	sedang	3.137	20,74	26,17	25,05	5	76,96	241.432
14	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	sedang	7.085	21,85	24,88	24,97	5	76,71	543.467
15	Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	sedang	1.941	19,92	26,73	25,03	5	76,68	148.838
16	Pemerintah Kota Tomohon	sedang	2.276	21,63	25,28	24,71	4,98	76,6	174.336
17	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	sedang	3.242	20,07	26,12	25,1	5	76,29	247.346
18	Pemerintah Kab. Pohuwato	sedang	3.211	20,93	25,39	24,83	5	76,15	244.509
19	Pemerintah Kab. Boalemo	sedang	3.004	20,76	25,59	24,7	5	76,04	228.438
20	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	sedang	1.826	20,64	25,42	24,9	5	75,97	138.715
21	Pemerintah Kota KotaMobagu	sedang	2.423	21,67	24,65	24,51	4,99	75,81	183.699
22	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	sedang	2.246	20,14	25,38	24,87	5	75,39	169.335
23	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	sedang	1.245	20,29	25,33	24,55	5	75,17	93.581
24	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	sedang	2.531	20,2	25,08	24,64	5	74,93	189.655
25	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	sedang	2.992	20,16	24,29	24,91	5	74,36	222.475
26	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	sedang	3.282	19,63	25,26	24,31	5	74,19	243.505
27	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	sedang	3.747	19,47	24,95	24,6	5	74,02	277.360
28	Pemerintah Kota Ternate	sedang	4.250	21,16	23,86	23,67	5	73,69	313.164
29	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	sedang	1.934	20,92	23,88	23,38	5	73,17	141.511
30	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	sedang	2.081	20,8	22,91	23,25	5	71,96	149.745
31	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	rendah	3.222	20,02	22,61	20,74	5	68,37	220.296
32	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	rendah	3.682	21	20,39	19,21	5	65,6	241.529
33	Pemerintah Kota Bitung	sangat rendah	2.547	21,07	12,37	8,66	5	47,1	119.974
34	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	sangat rendah	3.589	20,26	11,82	7,52	5	44,61	160.100
Notes:									
Nilai			Tingkat Profesionalitas						
91-100			Sangat Tinggi						
81-90			Tinggi						
71-80			Sedang						
61-70			Rendah						
≤ 60			Sangat Rendah						

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Rerata Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.15 Perkembangan Indeks Profesionalitas



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Capaian nilai IP ASN dari tahun 2021 mengalami kenaikan, hingga di tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mencapai target seperti yang telah diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah intens dalam mengupdate data terbaru pegawai, seperti diklat yang sudah diikuti, sehingga nilai IP ASN dapat mengalami peningkatan sehingga dapat mencapai terget dalam RPJMD. Data diklat telah semuanya diupdate, sehingga untuk mencapai target dalam RPJMD dimana pada tahun 2026 nanti target nilai IP ASN sebesar 82, tentu saja harus didukung dengan penganggaran yang memadai.

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Rerata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.02	82.00	90.27

Pada tahun 2024 BKPPD berhasil mencapai target sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD yaitu sebesar 74,02. Hal ini dikarenakan BKPPD pada tahun 2024 intens dalam mengupdate data kepegawaian, terutama diklat yang telah diikuti oleh ASN. Namun untuk mencapai target di tahun 2026 yaitu nilai IP ASN sebesar 82, BKPPD harus didukung dengan penganggaran yang memadai. Keseusian antara diklat yang diikuti dengan jabatan yang diduduki memiliki bobot yang paling besar dalam rumus perhitungan IP ASN. Sedangkan pelaksanaan kegiatan diklat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di tahun 2024 untuk bisa meningkatkan nilai IP ASN, BKPPD intens dalam mengupdate data ASN terutama pada data diklat yang sudah diikuti, dan data diklat sudah selesai di update semua. Sehingga untuk bisa menaikkan nilai IP ASN harus dilaksanakan diklat-diklat baru sesuai kebutuhan organisasi.

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Rerata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.02	78.00	94.90

Jika dibandingkan capaian nilai IP ASN Kab. Halmahera Selatan pada tahun 2024 yaitu 74,02, dengan nilai IP ASN nasional, maka masih terdapat selisih kurang lebih 3,98 dengan persentase capaian 95%. Hal ini mengisyaratkan kualitas ASN Kab. Halmahera Selatan masih harus terus ditingkatkan lagi, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN harus menjadi salah satu prioritas daerah. Dengan pesatnya perubahan regulasi tentang kepegawaian, hal ini menuntut para ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya. BKPPD sebagai OPD yang salah satu tupoksinya adalah menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi ASN, pada tiap tahun anggaran selalu kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Pengembangan SDM ASN selalu menjadi prioritas terakhir dalam penganggaran. Hal ini harus dirubah, karena pengembangan kompetensi ASN sudah merupakan hal yang wajib, terutama untuk memenuhi kewajiban minimal 20 JP.

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan diklat ASN

2. Faktor Pendukung

- BKPPD pada tahun 2024 intens dalam mengupdate data ASN, terutama data diklat

3. Upaya/Solusi

- Berkoordinasi dengan TAPD guna pengembangan SDM ASN menjadi salah satu prioritas utama

3.2.9 SASARAN 9 : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	75.00	55.56	74.08	Sedang	KEMENDAGRI
2	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	10.50	11.65	110.00	Sangat Tinggi	BPKAD
3	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	45.00	29.05	64.56	Rendah	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 9					82.88	Tinggi	

3.2.9.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah umumnya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance)

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.39 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

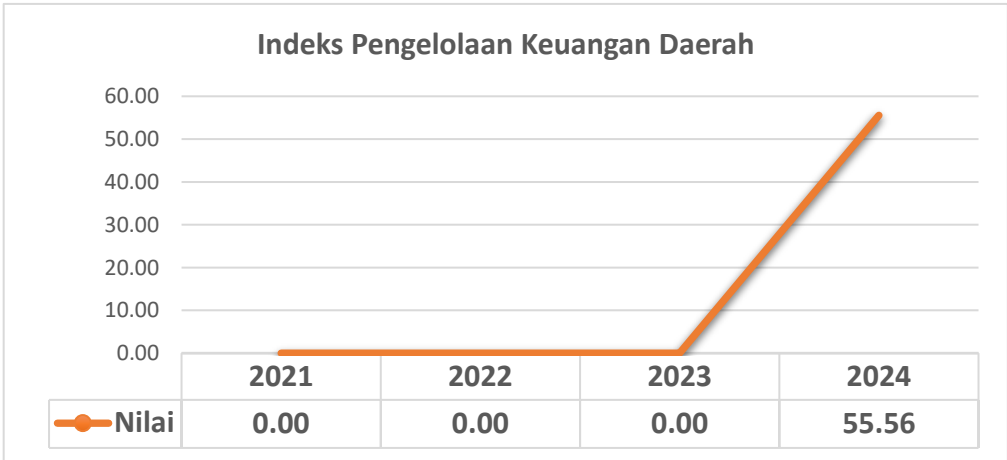
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	75.00	55.56	74.08

Target kinerja "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" tahun 2024 **belum tercapai**, dengan realisasi skor **55.56** dari target **75**, sehingga capaian kinerjanya hanya **74.08%**. Untuk meningkatkan indeks ini, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan, serta mengoptimalkan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran guna meminimalisir risiko kesalahan atau penyimpangan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.16 Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	55.56	85.00	65.36

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	55.56	80.00	69.45

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kesalahan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan

2. Faktor Pendukung

- Dokumen RPJMD, KUA PPAS, APBD dan LHP BPK

3. Upaya/Solusi

- Penilaian baru di dilaksanakan sekali dalam tahun anggaran sehingga masih membutuhkan pendampingan

3.2.9.2 Persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD.

Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan APBD adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar sumber pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi persentasenya, semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan operasionalnya tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.42 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

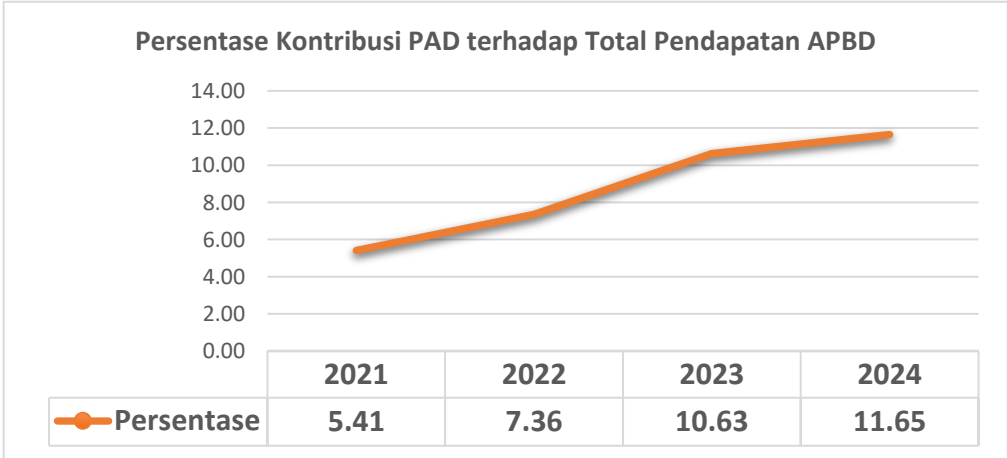
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	10.50	11.65	110

Target kinerja "**Persentase Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD**" tahun 2024 telah **melampaui target**, dengan realisasi **11.65%** dari target **10.50%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **110%**. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dan peranannya dalam APBD semakin kuat, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif, efektivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "*Persentase Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD*" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.17 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "*Persentase Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD*" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase kontribusi PAD terhadap Tolal Pendapatan APBD	%	11.65	11.50	101.30

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan
1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Melebihi Target/Tidak ada masalah

2. Faktor Pendukung

- Laporan Realisasi Anggaran

3. Upaya/Solusi

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber PAD dan Sumber Pendapatan Lainnya
- Digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah

3.2.9.3 Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat.

Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak aset tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai bukti legalitas kepemilikan. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik pengelolaan aset daerah, karena sertifikasi tanah mencegah sengketa, memperjelas status kepemilikan, serta memungkinkan pemanfaatan aset untuk kepentingan pembangunan dan investasi daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.44 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	45.00	29.05	64.56

Target kinerja "Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat" tahun 2024 belum tercapai, dengan realisasi 29.05% dari target 45%, sehingga capaian kinerjanya hanya 64.56%. Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah masih menghadapi beberapa kendala.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.18 Perkembangan Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	29.05	55.00	52.82

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Masih terdapat banyaknya aset tanah Pemda yang belum bersertifikat
- Masih terdapat tumpang tindih status kepemilikan tanah yang diperoleh dari masyarakat, sehingga proses pencatatan sertifikat kepemilikan tanah belum dapat diproses

2. Upaya/Solusi

- meningkatkan kerja sama dengan BPN
- mempercepat proses pendataan dan inventarisasi aset
- mengalokasikan anggaran khusus untuk program sertifikasi guna mempercepat pencapaian target di tahun-tahun mendatang

3.2.10 SASARAN 10 : TERPENUHINYA INVENTARISASI SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA TERSEDIANYA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	10.00	274.93	110.00	Sangat Tinggi	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 10					110.00	Sangat Tinggi	

3.2.10.1 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya.

Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar lahan yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk berbagai proyek pembangunan, baik untuk kepentingan infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, maupun untuk kepentingan lainnya seperti perumahan, industri, atau ruang terbuka hijau. Tingginya realisasi luas tanah yang disediakan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.47 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	10.00	274.93	110

Target kinerja **"Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya"** tahun 2024 telah **melampaui target secara signifikan**, dengan realisasi **274 hektare** dari target **10 hektare**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **110%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan berjalan sangat baik, bahkan jauh melampaui ekspektasi.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.19 Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	274.93	90.00	110

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Program untuk mendukung sasaran dimaksud belum diimplementasikan akibat tidak adanya nomenklatur urusan pertanahan pada struktur organisasi dan tata kerja di lingkup pemerintah daerah

2. Faktor Pendukung

- Optimaliasi kerjasama Pemda, Badan Pertanahan dan masyarakat dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan

3. Upaya/Solusi

- Melakukan pembenahan terhadap nomenklatur urusan pertanahan

3.2.11 SASARAN 11 : TERSEDIAINYA DATA STATISTIK DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Tabel 3.49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	50.00	50.00	Sangat Rendah	Diskominfo, Statistik dan Persandian
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 11					50.00	Sangat Rendah	

3.2.11.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah indikator yang mengukur sejauh mana OPD memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Semakin tinggi persentase OPD yang menggunakan data statistik, semakin baik kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan data sebagai dasar kebijakan, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.50 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

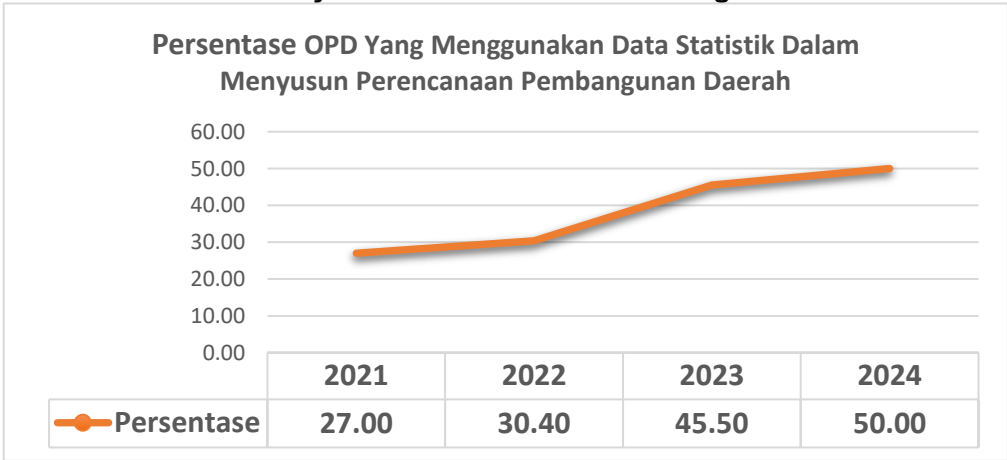
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	50.00	50.00

Target kinerja "**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**" tahun 2024 **belum tercapai**, dengan realisasi hanya **50%** dari target **100%**, sehingga capaian kinerjanya hanya **50%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat **tantangan dalam optimalisasi penggunaan data statistik** dalam perencanaan pembangunan daerah.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.20 Perkembangan OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	100	50

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya ketersediaan data dari beberapa sektor atau instansi, terutama data yang bersifat real-time atau terupdate.
- Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang statistik dan analisis data.
- Kurangnya teknologi atau perangkat lunak yang memadai untuk pengolahan dan analisis data statistik

2. Faktor Pendukung

- Adanya sumber data yang memadai dari berbagai instansi atau sektor untuk menyusun dokumen-dokumen statistik seperti Buku Profil Halsel, Buku PDRB, dan lainnya
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran dan fasilitas untuk pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data statistic
- Tersedianya teknologi informasi dan perangkat lunak yang memudahkan pengolahan dan analisis data statistik.
- Adanya kolaborasi yang baik antara instansi statistik dengan dinas-dinas terkait dalam menyediakan data yang dibutuhkan

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data statistik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan

- Bermitra dengan lembaga eksternal seperti universitas atau lembaga penelitian untuk mendapatkan dukungan teknis dan analisis data.

3.2.12 SASARAN 12 : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH .

Tabel 3.52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00	80.00	100.00	Sangat Tinggi	Bappelitbangda
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 12					100.00	Sangat Tinggi	

3.2.12.1 Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD).

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. IPPD mencerminkan sejauh mana perencanaan pembangunan di suatu daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

Formulasi Perhitungan

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$

- X_1 = $\sum$ Program dalam RKPD *dibagi* $\sum$ Program dalam RPJMD *dikali* 100
- X_2 = $\sum$ Program dalam Renja OPD *dibagi* $\sum$ Program dalam Renstra OPD *dikali* 100
- X_3 = Nilai keterisian SIPD (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD)
- X_4 = $\sum$ Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai target *dibagi* $\sum$ Indikator Sasaran RPJMD *dikali* 100

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.53 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00	80.00	100.00

Target kinerja "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)" tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan realisasi 80% dari target 80%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di daerah telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.21 Perkembangan Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)



Sumber : Bappelitbangda

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00	88.00	90.91

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menjalankan setiap Tugas dan Fungsi Bappelitbangda tentunya akan ada setiap Permasalahan/Hambatan/Kendala hanya saja semua itu dapat diatasi sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan dalam diselesaikan.

2. Faktor Pendukung

- Tentunya faktor pendukung dalam kerja-kerja Bappelitbangda adalah Mitra-Mitra Kerja OPD dari Bappelitbangda karena setiap Ketercapaian Indikator Kinerja adalah Akumulasi dari kinerja Mitra-Mitra OPD itu sendiri

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan
- Memastikan implementasi program dan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

3.2.13 SASARAN 13 : MENINGKATNYA KUALITAS PENELITIAN DAN INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Tabel 3.55 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	501	320	63.87	Rendah	Badan Litbang Kemendagri
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 13					63.87	Rendah	

3.2.13.1 Indeks Inovasi Daerah (IID).

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. IID menilai sejauh mana daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam IID meliputi:

- **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan**, seperti sistem administrasi berbasis digital, perencanaan dan penganggaran inovatif, serta kebijakan yang mendukung perubahan positif.
- **Inovasi Pelayanan Publik**, seperti penerapan teknologi dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan yang mempermudah akses bagi masyarakat.
- **Inovasi Daerah Lainnya**, seperti kebijakan berbasis lingkungan, pemberdayaan ekonomi kreatif, serta program berbasis partisipasi masyarakat.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.56 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

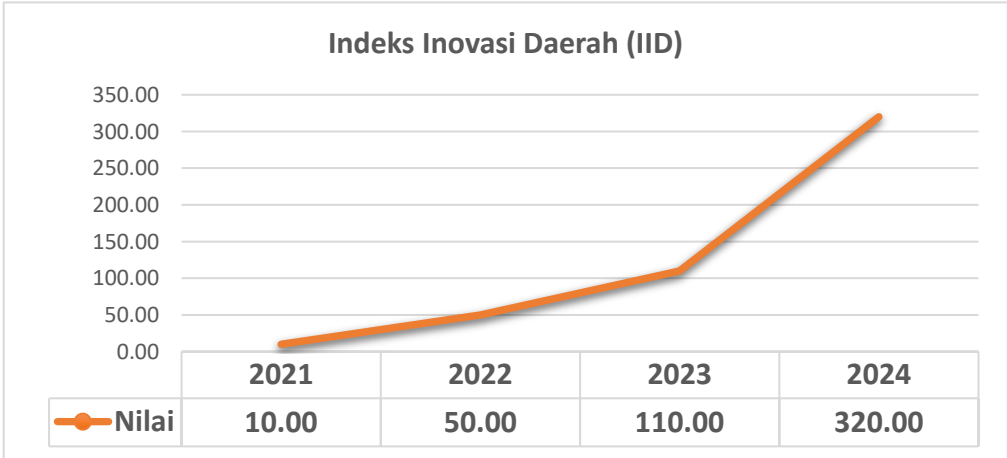
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Inovasi daerah (IID)	-	501	320.00	63.87

Target kinerja "**Indeks Inovasi Daerah (IID)**" tahun 2024 **tidak tercapai secara optimal**, dengan realisasi **320** dari target **501**, sehingga capaian kinerjanya hanya **63.87%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi ekspektasi.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "*Indeks Inovasi Daerah (IID)*" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.22 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah (IID)



Sumber : Badan Litbang Kemendagri

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "*Indeks Inovasi Daerah (IID)*" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Inovasi daerah (IID)	-	302	1001	30.17

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menjalankan setiap Tugas dan Fungsi Bappelitbangda tentunya akan ada setiap Permasalahan/Hambatan/Kendala hanya saja semua itu dapat diatasi sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan dalam diselesaikan.

2. Faktor Pendukung

- Tentunya faktor pendukung dalam kerja-kerja Bappelitbangda adalah Mitra-Mitra Kerja OPD dari Bappelitbangda karena setiap Ketercapaian Indikator Kinerja adalah Akumulasi dari kinerja Mitra-Mitra OPD itu sendiri

3. Upaya/Solusi

- Memperkuat regulasi dan insentif yang mendorong budaya inovasi di pemerintahan daerah
- Mendorong digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas
- Demi Meningkatkan Indeks Inovasi daerah serta dorongan kepada OPD untuk selalu berinovasi, mungkin bisa diberikan pemberian penghargaan demi mendorong semangat dari OPD.

3.2.14 SASARAN 14 : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.

Tabel 3.58 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	A (85)	A (85)	CC (57.61)	67.78	Sedang
2	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3.75	3.75	-	0.00	-
3	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	60.00	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
4	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	90.00	100.00	111.11	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 14					44.72	Sangat Rendah	

3.2.14.1 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.59 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	A (85)	CC (57.61)	67.78

Berikut adalah hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 :

Tabel 3.60 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	18.83	18.96
2	Pengukuran Kinerja	30	15.66	16.44
3	Pelaporan Kinerja	15	9.48	9.73
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12.06	12.48
Nilai Hasil Evaluasi		100	56.03	57.61
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

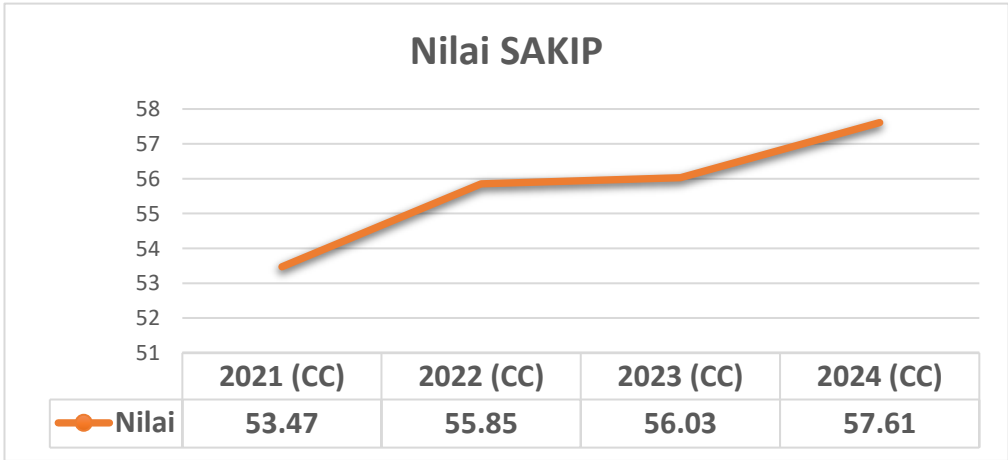
Sumber : LHE SAKIP Kementerian PAN & RB Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan “CUKUP”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.23 Perkembangan Nilai SAKIP



Sumber Data : LHE SAKIP Kementerian PANRB 2021-2024

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian pelaksanaan SAKIP di Kabuten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	CC (57.61)	AA (90.00)	64.01

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan
1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

Beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat peningkatan nilai SAKIP di Tahun 2024 antara lain :

- Tingkat kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan sebagian OPD dan Pemerintah Daerah belum cukup baik dan belum memenuhi kriteria SMART.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pengukuran kinerja secara periodik
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi belum berjalan secara optimal
- Belum terpublikasinya dokumen LKJIP ke masyarakat.
- Pelaksanaan evaluasi internal belum menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan dan pemantauan atas tindak lanjut.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan pada sebagian OPD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

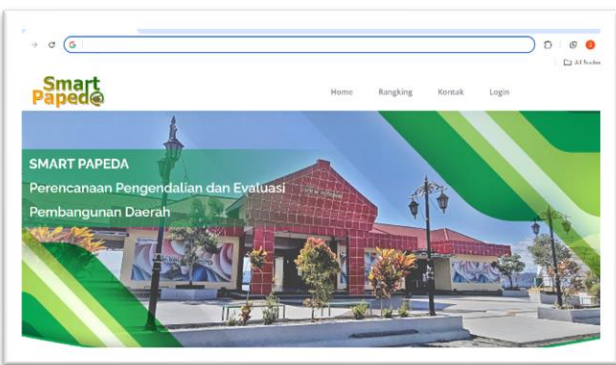
2. Upaya/Solusi

Beberapa upaya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan guna peningkatan nilai SAKIP di tahun-tahun mendatang antara lain :

- Merekomendasikan ke APIP agar dapat melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap OPD.
- Melakukan reviu dan perbaikan pada dokumen IKU OPD.
- Melaksanakan pendampingan SAKIP dengan Tim dari Kementerian PAN & RB



- Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lewat penyediaan Aplikasi ESAKIP Perencanaan (PAPEDA) dan Aplikasi ESAKIP Evaluasi (SIKIPER).



3.2.14.2 Nilai LPPD Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

Nilai LPPD Pemda diperoleh dari Rilis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan, capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output

(Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.62 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3.75	-	0.00

Pada Tahun 2024 Nilai LPPD Pemda Kabupaten Halmahera Selatan belum ada rilis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga capaian untuk indikator ini belum dapat terukur begitupun Nilai LPPD pada Tahun 2023. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.63 Capaian LPPD Kabupaten Halmahera Selatan

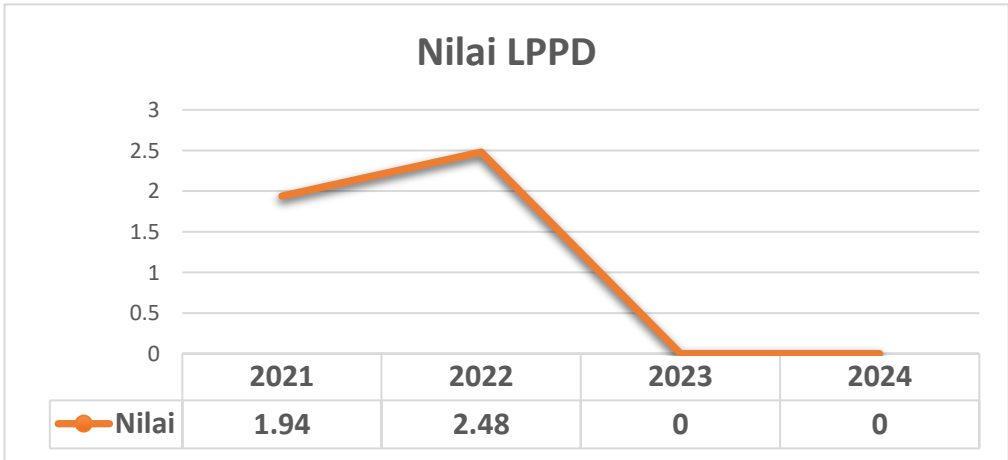
NO	TAHUN EVALUASI	SKOR	STATUS	KET
1	2021	1.94	Rendah	-
2	2022	2.48	Rendah	-
3	2023	-	-	Belum di Rilis
4	2024	-	-	Belum di Rilis

Sumber Data : Bagian Pemerintahan dan Kemendagri RI

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan nilai LPPD Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.24 Perkembangan Nilai LPPD



Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian LPPD Kabuten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	-	4.00	0.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dana, kapasitas SDM, atau teknologi yang memadai dapat menyulitkan proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan LPPD

- Masalah terkait dengan transparansi dan akurasi data. Jika data yang digunakan dalam LPPD tidak akurat atau tidak transparan, laporan tersebut akan kehilangan nilai dan kepercayaan.
- Kurangnya koordinasi antar unit kerja OPD sehingga dapat menghambat proses pengumpulan data dan penyusunan LPPD.
- Sering terdapat miskomunikasi antar Tim Penyusun LPPD Pemda (Bagian Pemerintahan) dengan OPD terkait data

2. Upaya/Solusi

- Peningkatan kapasitas SDM tim penyusun LPPD, baik di tingkat OPD dan PEMDA.
- Pengalokasian anggaran yang memadai untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar.
- Peningkatan Transparansi dan Akurasi Data dalam pengelolaan data
- Membangun komitmen melalui penghargaan dan insentif bagi mereka yang berkontribusi secara positif dalam penyelenggaraan LPPD.

3.2.14.3 Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A.

Evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai sejauh mana OPD menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan prinsip **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja OPD dalam lingkup internal pemerintahan daerah. Predikat “A” menunjukkan bahwa instansi pemerintah atau unit kerja telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam akuntabilitas kinerja. Perlu dicatat bahwa standar penilaian SAKIP memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

- **AA**: Nilai > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)
- **A**: Nilai > 80 - 90 (Memuaskan)
- **BB**: Nilai > 70 - 80 (Sangat Baik)
- **B**: Nilai > 60 - 70 (Baik)
- **CC**: Nilai > 50 - 60 (Cukup)

A. Capaian Tahun 2024.

Tabel 3.65 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	60.00	0.00	0.00

Realisasai persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal “A” pada tahun 2024 adalah sebesar 0% dari yang ditargetkan 60%, sehingga capaiannya sangat memuaskan yakni sebesar 0%, ini menunjukan adanya tantangan serius dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di OPD. Untuk tahun 2024 capaian indikator dimaksud tidak dapat diukur karena belum ada OPD yang memiliki nilai SAKIP “A”.

TABEL 3.66 REKAPITULASI LHE AKIP INTERNAL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024

NO	OPD	NILAI	PREDIKAT
1	SEKRETARIAT DAERAH	50.71	CC
2	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	52.51	CC
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	E
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	63.66	B
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	60.71	B
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	67.11	B
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.15	CC
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	53.41	CC

10	DINAS KESEHATAN	61.5	B
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
12	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	67.11	B
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80.54	BB
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.86	CC
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.26	B
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	60.81	B
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	69.96	B
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	51.16	CC
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	89.54	BB
21	DINAS PENDIDIKAN	57.71	CC
22	DINAS PERHUBUNGAN	63.61	B
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	80.54	BB
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	80.54	BB
25	DINAS SOSIAL		
26	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	80.54	BB
27	INSPEKTORAT	67.11	B
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
29	SEKRETARIAT DPRD	80.54	BB
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA	44.56	C

Sumber Data : INSPEKTORAT

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal “A” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.25 Perkembangan nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal “A”



Sumber : Inspektorat

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal “A” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	0	80	0.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Beberapa OPD belum konsisten dalam menjalankan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan

2. Faktor Pendukung

- Dukungan dan komitmen pimpinan OPD dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja menjadi faktor pendorong perbaikan capaian

3. Upaya/Solusi

- Forum koordinasi rutin bersama pimpinan OPD untuk memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai rencana

3.2.14.4 Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah).

Tingkat Pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD berhasil menyusun, membahas, dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) sesuai dengan program legislasi yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya, semakin baik kinerja legislatif dalam mendukung kebijakan daerah melalui peraturan yang berkualitas dan tepat waktu.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.68 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	90.00	100.00	110

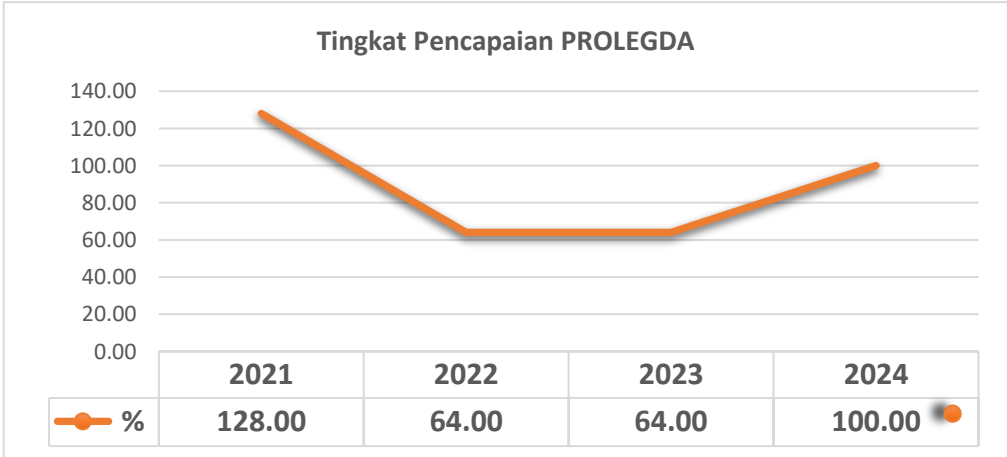
Target kinerja "**Tingkat Pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)**" tahun 2024 telah **melampaui target**, dengan realisasi **100%** dari target **90%**, sehingga capaian kerjanya mencapai **110%**. Jumlah Ranperda pada tahun 2024 berjumlah 7 Ranperda, yang di Sahkan 7 Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD berhasil menyelesaikan seluruh program legislasi yang telah direncanakan, bahkan melebihi ekspektasi.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam membangun regulasi yang mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk memastikan bahwa peraturan yang telah disahkan benar-benar efektif, perlu dilakukan evaluasi implementasi setiap peraturan daerah, sosialisasi yang baik kepada masyarakat, serta pengawasan dalam pelaksanaannya agar regulasi yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan tingkat pencapaian PROLEGDA dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.26 Perkembangan Pencapaian PROLEGDA



Sumber : Sekretariat DPRD

Pada tahun 2021 tingkat pencapaian prolegda ditargetkan 7 yang terealisasi 9 Perda atau 128%, pada tahun 2022 tingkat pencapaian prolegda ditargetkan 17 yang terealisasi 11 Perda atau 64%, pada tahun 2023 tingkat pencapaian prolegda ditargetkan 14 yang terealisasi 9 Perda atau 64% dan pada tahun 2024 tingkat pencapaian prolegda ditargetkan 7 yang terealisasi 7 Perda atau 100%.

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian tingkat pencapaian PROLEGDA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	100	100	100

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Sering kali terjadi Agenda DPRD yang tidak terlaksana
- Terjadinya perubahan agenda kerja yang tidak sesuai dengan agenda kegiatan DPRD

2. Faktor Pendukung

- Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan yang mendukung Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan dalam rangka memfasilitasi tugas, pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tersedianya dukungan dana/anggaran
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan dan Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan

3. Upaya/Solusi

- Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan untuk melaksanakan agenda kerja sesuai dengan kesepakatan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Banmus)
- Menghadapi kendala Administrasi dalam mengaktualkan harapan anggota DPRD yang bernuansa politik, jajaran sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan perencanaan lebih baik, kreatif, inovatif dari perencanaan yang baik, sehingga diharapkan partisipasi anggota DPRD dapat berdampak optimal bagi kinerja pegawai sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan

3.2.15 SASARAN 15 : MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI CAMAT DALAM SISTEM PELAYANAN PEMERINTAHAN.

Tabel 3.70 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	45.00	Belum Ada Capaian	0.00	Belum Ada Capaian	Bagian Administrasi Pembangunan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 15					-		

3.2.15.1 Rata-Rata Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan).

Capaian indikator nilai evaluasi perkembangan kecamatan tahun 2024 belum dapat diukur, karena pelaksanaan evaluasi oleh OPD terkait belum dilakukan. Sebab belum adanya acuan yang jelas tentang proses evaluasi perkembangan kecamatan. Dan juga belum maksimalnya implementasi Perbup Nomor 26 tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi atas implementasi Perbup Nomor 26 tahun 2021, untuk memaksimalkan peran dan fungsi Camat selaku koordinator pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan

3.2.16 SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN.

Tabel 3.71 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Persentase desa mandiri (%)	%	8.03	3.61	44.96	Sangat Rendah	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
2	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	59.03	63.86	108.18	Sangat Tinggi	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 16					76.57	Sedang	

3.2.16.1 Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemandiriannya. IDM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

1. **Dimensi Ketahanan Sosial** → mencakup pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.
2. **Dimensi Ketahanan Ekonomi** → mencakup keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, dan ketersediaan lembaga ekonomi desa.
3. **Dimensi Ketahanan Ekologi/Lingkungan** → mencakup kualitas lingkungan, pengelolaan risiko bencana, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Adapun Kategori **Desa Mandiri** adalah :

1. **IDM > 0,8155**
2. Desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.
3. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tersedia dan berfungsi optimal.
4. Infrastruktur dan layanan publik sudah maju dan modern.
5. Contoh: Desa yang memiliki BUMDes maju, fasilitas kesehatan lengkap, dan masyarakat berdaya secara ekonomi.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.72 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase desa mandiri (%)	%	8.03	3.61	44.96

Pada tahun 2024 Desa Mandiri yang terdapat pada Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebanyak 9 (sembilan) desa, sehingga realisasai Persentase Desa Mandiri pada tahun 2024 adalah sebesar 3.61% dari yang ditargetkan 8.03%, sehingga capaiannya cukup meningkat yakni sebesar 44.96% dibanding beberapa tahun yang lalu.

Tabel 3.73 Data Desa Mandiri
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024

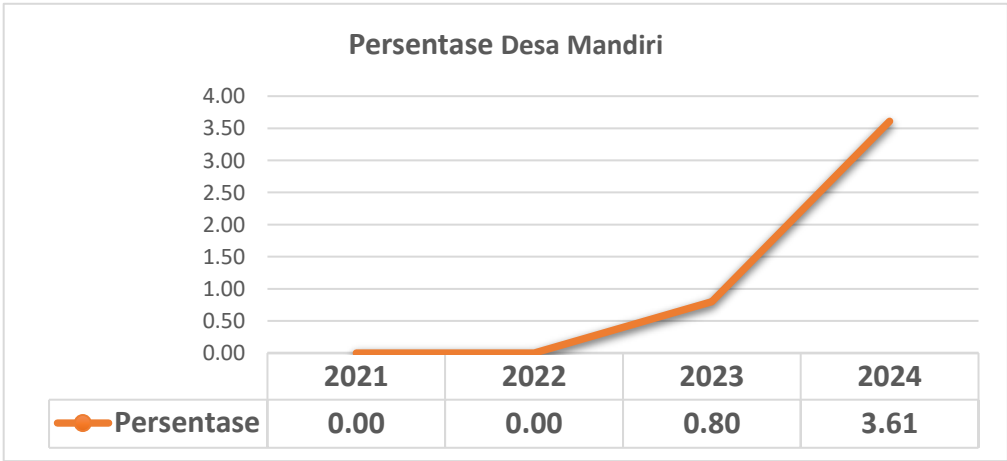
No	Status Desa	Nama Desa	Jumlah Desa Mandiri di Tahun 2024	Jumlah Keseluruhan Desa	Persentase
1	Desa Mandiri	Desa Tomori Desa Hidayat Desa Mandaong Desa Papaloang Desa Tembal Desa Panamboang Desa Dolik Desa Laiwui Desa Kampung Makian	9	249	3.61%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan persentase Desa Mandiri dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.27 Perkembangan Desa Mandiri



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.74 Data Desa Mandiri
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024

No	Status Desa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Desa Mandiri	0	0	2	9
Total Keseluruhan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan		249			
Persentase Terhadap Total Desa Keseluruhan		0.00%	0.00%	0.80%	3.61%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian persentase Desa Mandiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase desa mandiri (%)	%	3.61	12.04	29.98

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan Infrastruktur misalnya Jalan, Listrik dan akses internet
- kurangnya SDM yang terampil dan berpartisipasi dalam membangun desa

2. Faktor Pendukung

- Desa yang memanfaatkan potensi alam setempat
- Desa yang memiliki infrastruktur yang memadai
- Desa yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan

3. Upaya/Solusi

- Mengembangkan Potensi Lokal
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
- Membangun infrastruktur Desa

3.2.16.2 Persentase Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal.

Kategori Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menurut Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

1. Desa Tertinggal

- IDM antara 0,4906 – 0,5989
- Memiliki keterbatasan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Infrastruktur dasar kurang memadai.
- Mayoritas penduduk masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan bantuan pemerintah.

2. Desa Sangat Tertinggal

- IDM < 0,4906
- Memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat lemah.
- Fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat terbatas atau tidak tersedia.
- Infrastruktur desa minim, seperti jalan, listrik, dan air bersih.
- Tingkat kemiskinan tinggi, dan masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau pihak lain.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.76 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	59.03	63.86	108.18

Pada tahun 2024 Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang terdapat pada Kabupaten Halmahera Selatan masing-masing sebanyak 154 dan 5 desa atau sebanyak 159 desa, sehingga realisasai Persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 adalah sebesar 63.86% dari yang ditargetkan 59.03%, sehingga capaiannya sebesar 108.18%.

Tabel 3.77 Data Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024

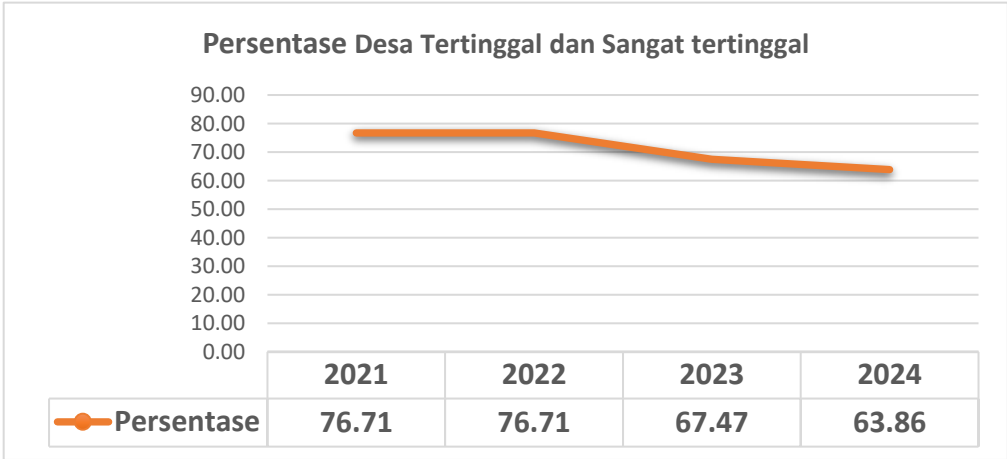
No	Status Desa	Jumlah Desa	Total Desa	Jumlah Keseluruhan Desa	Persentase
1	Desa Tertinggal	154	159	249	63.86%
2	Desa Sangat Tertinggal	5			

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dari tahun 2021-2024 memiliki trend yang cukup baik karena persentasenya menurun, ini berarti ada beberapa desa yang telah meningkat statusnya menjadi Desa Berkembang. Hal ini bisa dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.28 Perkembangan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.78 Data Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024

No	Status Desa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Desa Tertinggal	170	172	160	154
2	Desa Sangat Tertinggal	21	19	8	5
Total Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		191	191	168	159
Total Keseluruhan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan		249			
Persentase Terhadap Total Desa Keseluruhan		76.71%	76.71%	67.47%	63.86%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	63.86	48.19	110

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet menghambat perkembangan ekonomi dan Pendidikan
- penyebab ketertinggalan di tingkat desa terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang
- Migrasi dan pertumbuhan penduduk yang menjadi tantangan, terjadinya Bencana Alam serta Konflik sosial

2. Upaya/Solusi

- Untuk mengatasi ketertinggalan desa, pemerintah dapat membangun infrastruktur penghubung, seperti jalan raya, jembatan, dan prasarana transportasi laut

3.2.17 SASARAN 17 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS).

Tabel 3.80 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Persentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00	75.00	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 17					100.00	Sangat Tinggi	

3.2.17.1 Persentase PMKS Yang Tertangani.

Persentase PMKS yang Tertangani adalah indikator yang mengukur proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapatkan penanganan atau intervensi dari pemerintah atau lembaga sosial. PMKS mencakup berbagai kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, korban kekerasan, serta kelompok miskin dan rentan lainnya.

Tingkat penanganan PMKS dipengaruhi oleh ketersediaan program sosial, anggaran, tenaga pendamping sosial, serta sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat. Jika persentasenya tinggi, berarti sistem perlindungan sosial berjalan dengan baik. Namun, jika rendah, maka diperlukan evaluasi kebijakan, peningkatan anggaran bantuan sosial, serta perluasan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.81 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

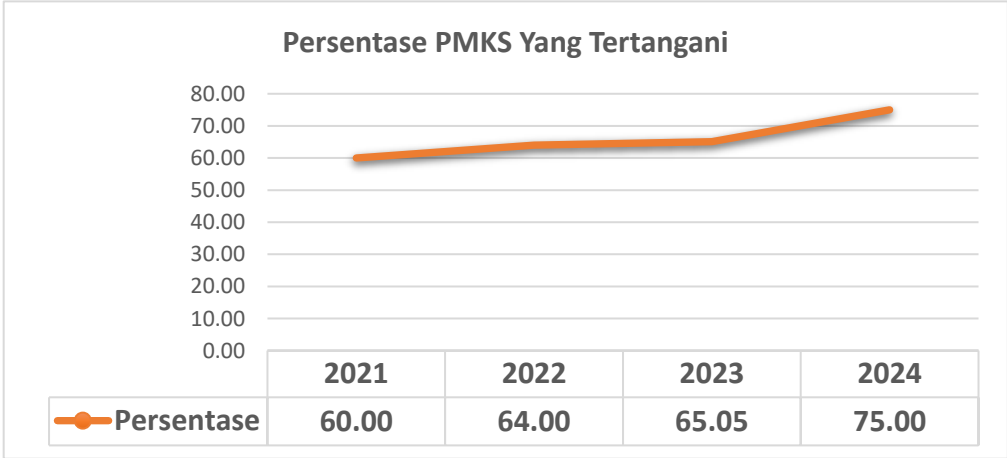
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00	75.00	100.00

Target kinerja "Persentase PMKS yang Tertangani" tahun 2024 telah tercapai sepenuhnya, dengan realisasi 75%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berjalan sesuai rencana dan target yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial, bantuan, serta pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait telah berhasil menjangkau kelompok PMKS sesuai dengan sasaran

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Presentase PMKS Yang Tertangani” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.29 Perkembangan Persentase PMKS Yang Tertangani



Sumber : Dinas Sosial

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Presentase PMKS Yang Tertangani” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00	85.00	88.24

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya dukungan anggaran untuk target pencapaian SPM Bidang Sosial
- Belum Optimalnya kinerja SDM dalam penanganan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Faktor Pendukung

- Program Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang berjalan dengan baik.
- Bantuan sosial kepada PMKS yang tersalurkan.

3. Upaya/Solusi

- Memberikan dukungan anggaran, terutama pada program yang menunjang SPM Bidang Sosial.

3.2.18 SASARAN 18 : MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

Tabel 3.83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	58.00	51.12	88.14	Tinggi	DP3AKB
2	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	11.00	5.2	110.00	Sangat Tinggi	DP3AKB
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 18					99.07	Sangat Tinggi	

3.2.18.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan: Diukur dengan persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan, persentase menteri perempuan, dan persentase pejabat senior perempuan.
- 2. Pendidikan: Diukur dengan Indeks Paritas Gender (GPI) untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- 3. Kesehatan dan ekonomi: Diukur dengan Indeks Harapan Hidup Sehat (IHES) perempuan dan laki-laki, dan pendapatan rata-rata perempuan dan laki-laki.

Formulasi Perhitungan:

IDG dihitung dengan rumus berikut:

$IDG = (1/3) * (IPG + GPI + EPI)$

- IPG: Indeks Partisipasi Gender
- GPI: Indeks Paritas Gender
- EPI: Indeks Pemberdayaan Ekonomi

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.84 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

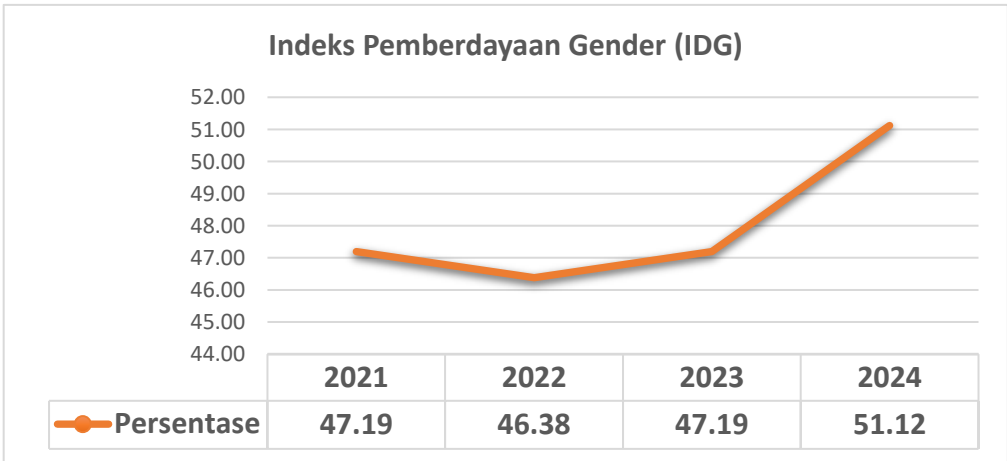
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	58.00	51.12	88.14

Target kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” tahun 2024 sebesar 58% dan realisasinya sebesar 51.12% dengan capaian kinerja sebesar 88.14%, Meskipun capaian IDG masih di bawah target, hasil ini menunjukkan adanya progres positif dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai target yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, penguatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.30 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Sumber : DP3AKB

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.85 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	51.12	62	82.45

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	51.12	76.90	66.47

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.
- Akses terbatas perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan.
- Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.
- Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

2. Faktor Pendukung

- Data pekerja perempuan di lingkup pemerintahan kab. Halmahera selatan
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan.
- Program-program pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan.

3. Upaya/Solusi

- Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender.
- Pemberian pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan.
- Peningkatan akses perempuan terhadap modal dan sumber daya ekonomi.
- Mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan.
- Penguatan implementasi peraturan perundang undangan yang mendukung kesetaraan gender.

3.2.18.2 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.

Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan diukur melalui survei. Survei ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga penelitian, atau organisasi non-pemerintah. Survei ini biasanya menanyakan kepada responden tentang pengalaman mereka dengan kekerasan fisik, emosional, dan seksual.

Formulasi Perhitungan :

Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan dihitung dengan rumus berikut:

Prevalensi = (Jumlah kasus kekerasan / Jumlah populasi) x 100%

Sumber Data:

Sumber data untuk menghitung prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan antara lain:

- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
- Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHP)

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Data dari lembaga-lembaga layanan korban kekerasan, seperti P2TP2A dan BPS

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.87 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	11.00	5.20	110

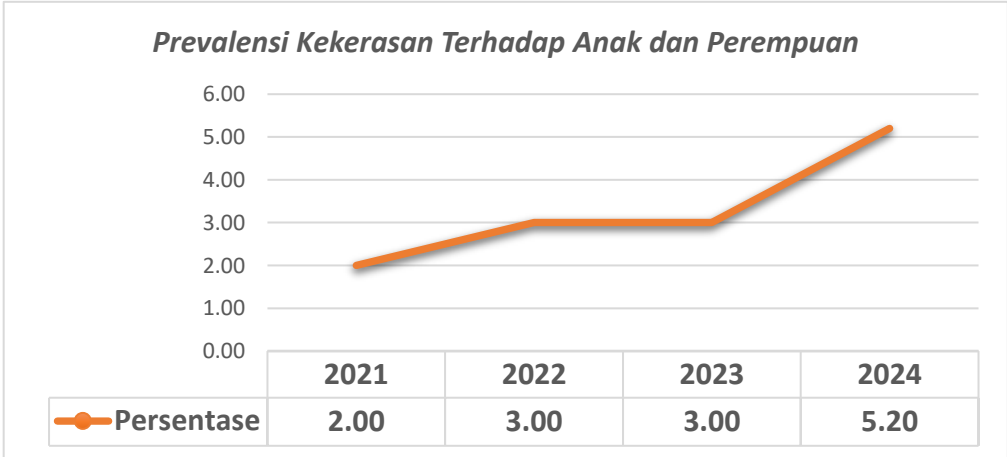
Target kinerja "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan" tahun 2024 telah melampaui target secara signifikan, dengan realisasi 5.2% dari target 11%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 110%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang mencerminkan efektivitas berbagai upaya pencegahan dan perlindungan yang telah dilakukan.

Meskipun capaian ini sangat positif, tetap diperlukan pemantauan berkelanjutan dan penguatan upaya preventif, untuk memastikan bahwa angka kekerasan terhadap anak dan perempuan terus menurun serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.31 Perkembangan Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan



Sumber : DP3AKB

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	5.2	5	96.00

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	5.2	11.31	154.02

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan
- Korban takut melaporkan karena stigma dan ancaman
- Penegakan hukum yang belum optimal
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang penanganan korban kekerasan

2. Faktor Pendukung

- Adanya lembaga perlindungan anak dan perempuan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan.
- Adanya layanan pendampingan bagi korban kekerasan.

3. Upaya/Solusi

- Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan
- Memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.
- Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.
- Penyediaan layanan pendampingan yang komprehensif bagi korban.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan.

3.2.19 SASARAN 19 : MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KEMANANAN PANGAN STRATEGIS DAERAH.

Tabel 3.90 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	82.50	78.90	95.64	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Ketpang
2	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	80.00	Belum Ada Capaian	0.00	Belum Ada Capaian	Dinas Pertanian dan Ketpang
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 19					47.82	Sangat Rendah	

3.2.19.1 Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)

Peningkatan Konsumsi Pangan Seimbang: Skor Pola Pangan Harapan yang sudah mendekati target menunjukkan perkembangan positif, namun tetap diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan guna mencapai keseimbangan gizi yang lebih baik.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.91 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	82.50	78.90	95.64

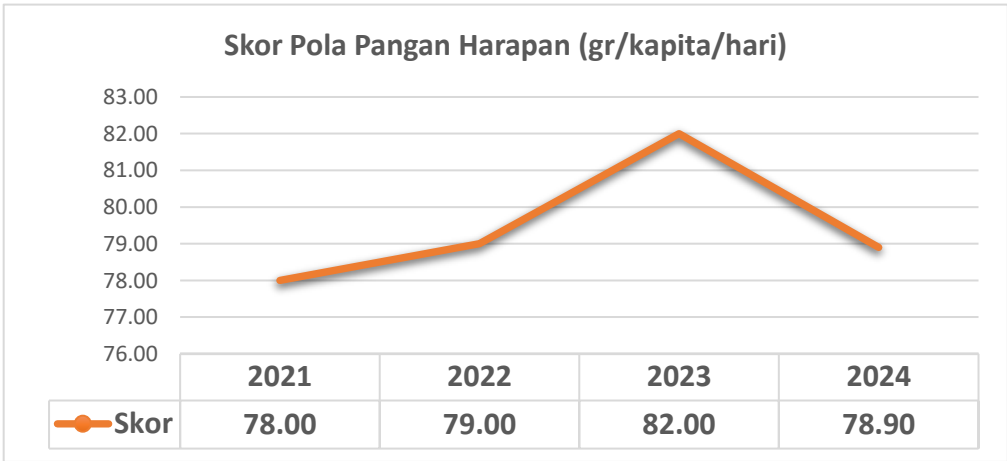
Pada indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan, terdapat dua parameter yang diukur, yaitu: Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dalam satuan gram per kapita per hari. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 82,50. Realisasi yang telah dicapai adalah 78,90, atau 95,64% dari target yang

direncanakan. Pencapaian ini tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai target yang optimal

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.32 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketpang

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	78.90	87.50	90.17

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2024 mencapai 78,90 gram/kapita/hari, yang sudah mencapai 90,17% dari target RPJMD 2026 sebesar 87,50 gram/kapita/hari. Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin mendekati keseimbangan gizi yang diharapkan. Namun, tantangan dalam meningkatkan skor PPH masih ada, terutama terkait dengan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras, rendahnya diversifikasi pangan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pola makan sehat. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan upaya dalam mendorong konsumsi pangan lokal, meningkatkan kampanye kesadaran gizi, serta memperkuat distribusi pangan alternatif yang lebih beragam dan bernutrisi.

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.
- Minimnya referensi masyarakat terkait diversifikasi pangan di masyarakat.
- Ketergantungan tinggi terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat.

2. Faktor Pendukung

- Ketersediaan bahan pangan lokal yang cukup beragam.
- Dukungan dari pemerintah dalam bentuk program ketahanan pangan dan gizi.
Sebagai contoh penyampaian edukasi bagi masyarakat tentang B2SA melalui lomba cipta menu B2SA

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan kampanye edukasi tentang diversifikasi pangan kepada masyarakat.
- Mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam.

- Mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan sektor pendidikan dan kesehatan

3.2.19.2 Persentase Cadangan Pangan Masyarakat.

Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat: Dengan belum adanya realisasi cadangan pangan masyarakat, diperlukan langkah konkret dalam membangun sistem penyimpanan pangan yang lebih terorganisir, termasuk dengan melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan distribusi pangan cadangan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.93 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

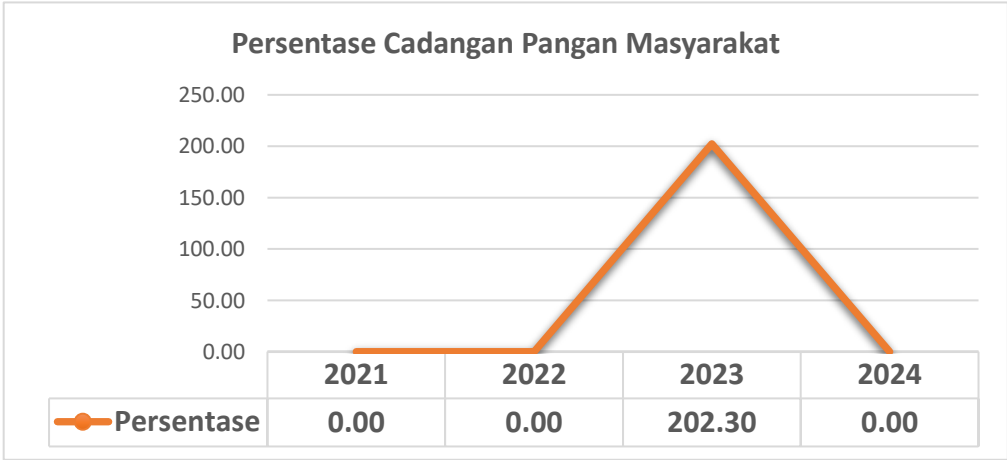
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	80.00	Belum Ada Capaian	0.00

Persentase Cadangan Pangan Masyarakat, yang mencerminkan ketersediaan pangan yang disimpan untuk menghadapi situasi darurat atau kekurangan pangan. Target yang ditetapkan adalah 80,00%, namun realisasi capaian masih berada di 0,00%, menunjukkan bahwa belum ada cadangan pangan yang terhimpun atau dilaporkan dalam sistem. Kondisi ini dapat mengindikasikan perlunya langkah konkret dalam penyediaan dan pengelolaan stok pangan cadangan, baik di tingkat rumah tangga maupun pemerintah daerah

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan **Persentase Cadangan Pangan Masyarakat** dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.33 Perkembangan Persentase Cadangan Pangan Masyarakat



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%		90.00	

Indikator persentase cadangan pangan masyarakat pada tahun 2024 masih menunjukkan angka 0,00%, jauh dari target akhir RPJMD 2026 sebesar 90,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terdapat sistem cadangan pangan yang efektif di daerah, yang berpotensi meningkatkan risiko ketahanan pangan, terutama saat terjadi bencana atau gangguan pasokan pangan. Faktor utama yang menghambat pengelolaan cadangan pangan meliputi belum adanya kebijakan daerah

yang kuat, kebijakan penganggaran cadangan pangan pemerintah yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menetapkan regulasi daerah tentang cadangan pangan, mengoptimalkan kebijakan penganggaran cadangan pangan pemerintah, serta mendorong peran aktif masyarakat dan swasta dalam sistem pengelolaan cadangan pangan yang berkelanjutan

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kebijakan penganggaran cadangan pangan pemerintah yang belum optimal
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun cadangan pangan mandiri.

2. Faktor Pendukung

- Potensi produksi pangan daerah yang cukup besar.
- Dukungan kebijakan pemerintah untuk penguatan cadangan pangan.

3. Upaya/Solusi

- Membangun sistem cadangan pangan berbasis masyarakat dan desa.
- Melibatkan koperasi dan kelompok tani dalam pengelolaan cadangan pangan.
- Mendorong kebiasaan menyimpan cadangan pangan di rumah tangga melalui program edukasi.
- Mengoptimalkan kebijakan penganggaran cadangan pangan daerah

3.2.20 SASARAN 20 : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN.

Tabel 3.95 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 20

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.60	8.42	97.91	Sangat Tinggi	BPS
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07	13.04	92.68	Sangat Tinggi	BPS
3	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	17.50	0.24	1.37	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 20					63.99	Rendah	

3.2.20.1 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator ini menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, semakin baik tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. RLS yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang dasar atau menengah pertama, sedangkan RLS yang tinggi mengindikasikan lebih banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas atau bahkan perguruan tinggi.

Peningkatan RLS sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), daya saing tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk meningkatkan angka ini meliputi penyediaan akses pendidikan yang merata, program beasiswa, kebijakan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kualitas sekolah dan tenaga pengajar. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan RLS, karena semakin banyak individu yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, semakin besar pula dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.96 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.60	8.42	97.91

Target kinerja "Rata-rata Lama Sekolah" tahun 2024 **hampir tercapai**, dengan realisasi **8.42 tahun** dari target **8.60 tahun**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **97.91%**. Hal ini menunjukkan bahwa **tingkat partisipasi pendidikan di wilayah tersebut sudah cukup baik**, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain :

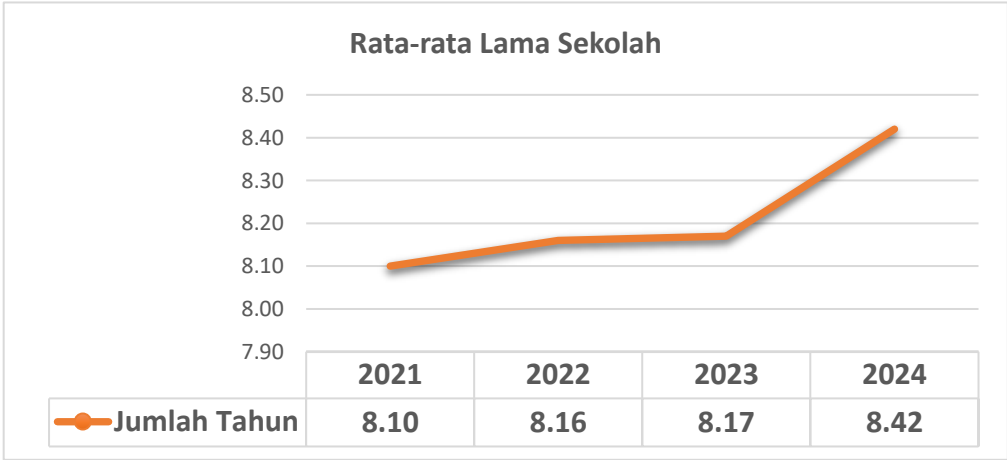
- **Akses terhadap pendidikan yang semakin membaik**, dengan adanya fasilitas sekolah yang lebih merata.
- **Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang meningkat**, mendorong anak-anak untuk bersekolah lebih lama.
- **Program pemerintah dalam mendukung pendidikan**, seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah.
- **Namun, masih terdapat tantangan**, seperti putus sekolah akibat faktor ekonomi, pernikahan dini, atau kurangnya akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun belum mencapai target, capaian ini tetap menunjukkan **tren positif dalam pembangunan sektor pendidikan**, dan ke depannya diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan "Rata-rata Lama Sekolah" dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.34 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : BPS

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian "Rata-rata Lama Sekolah" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.97 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.42	8.97	93.87

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian "Rata-rata Lama Sekolah" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.98 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.42	8.77	96.01

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Faktor Aksesibilitas Pendidikan; Minimnya Sarana dan Prasarana Sekolah, terutama di daerah terpencil dan pedalaman, kemudian jarak sekolah yang jauh menyebabkan anak kesulitan untuk hadir secara rutin.
- Faktor Ekonomi ; Anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dibanding melanjutkan sekolah.
- Faktor Sosial dan Budaya ; Kurangnya kesadaran akan Pentingnya pendidikan, terutama di lingkungan yang masih mengutamakan bekerja daripada sekolah, kemudian pernikahan dini, terutama bagi anak perempuan, yang menyebabkan mereka putus sekolah.
- Faktor Kualitas Pendidikan ; Kualitas Guru yang Belum Merata terutama di daerah pelosok, metode pembelajaran yang kurang menarik, sehingga siswa cepat bosan dan memilih berhenti sekolah.
- Faktor Teknologi ; Terbatasnya Akses Internet dan Listrik, menghambat pendidikan berbasis teknologi di daerah terpencil, Kurangnya Literasi Digital, sehingga siswa dan guru sulit memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.

2. Faktor Pendukung

- Faktor Sumber Daya; Semakin banyak sumber daya yang tersedia, seperti buku, guru, dan fasilitas, semakin besar kemungkinan anak-anak untuk bersekolah lebih lama.
- Faktor Akses Pendidikan (Semakin mudah akses ke pendidikan, semakin besar kemungkinan anak-anak untuk bersekolah lebih lama, Ketersediaan fasilitas sekolah yang merata baik di kota maupun di daerah terpencil.
- Faktor Sosial (semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, maka semakin baik juga anak yang bersekolah, terutama di lingkungan yang mendukung sekolah hingga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Program Pendidikan Non-Formal, seperti Kejar Paket A, B, dan C untuk mereka yang putus sekolah.
- Faktor Kebijakan pemerintah, terutama terkait pendidikan gratis.

3. Upaya/Solusi

- Peningkatan akses pendidikan, diantaranya membangun dan memperbaiki/rehabilitasi fasilitas pendidikan, teruma di daerah terpencil dan tertinggal yang minim akses pendidikan.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, melalui pelatihan/bimtek kepada guru secara berkala, menyusun kurikulum yang fleksibel, serta meningkatkan fasilitas sekolah.
- Mencegah angka putus sekolah ; memastikan semua anak, termasuk disabilitas dan anak pekerja, dapat bersekolah.

3.2.20.2 Harapan Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur perkiraan jumlah tahun yang akan ditempuh oleh seorang anak yang berusia 7 tahun dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi bahwa pola partisipasi pendidikan saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. HLS mencerminkan potensi akses pendidikan bagi generasi muda di suatu daerah dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.99 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07	13.04	92.68

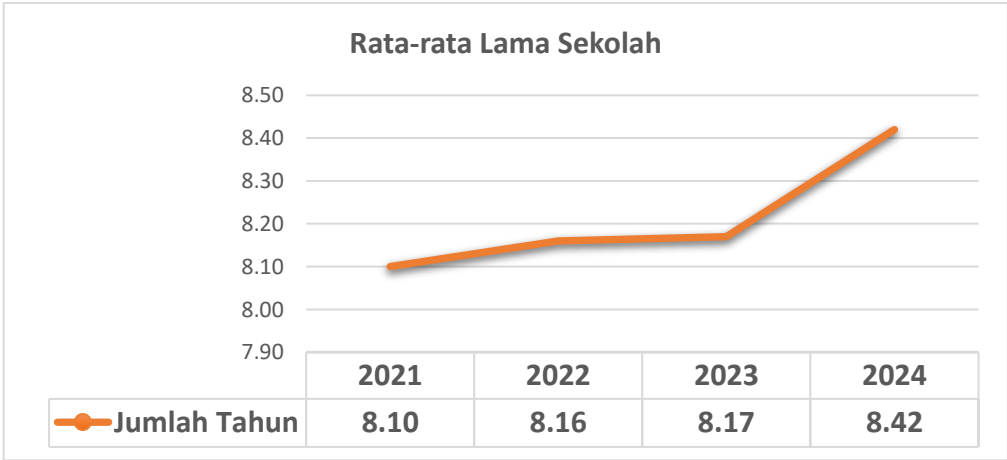
Target kinerja "**Harapan Lama Sekolah**" tahun 2024 **belum sepenuhnya tercapai**, dengan realisasi **13.04 tahun** dari target **14.07 tahun**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **92.68%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas anak di daerah tersebut memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang cukup panjang, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian target.

Meskipun realisasi Harapan Lama Sekolah belum mencapai target, angka ini masih menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta menyediakan program dukungan seperti beasiswa dan sekolah gratis agar semakin banyak anak yang bisa bersekolah lebih lama sesuai dengan harapan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Harapan Lama Sekolah” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.35 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : BPS

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Harapan Lama Sekolah” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.04	14.72	88.59

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian “Harapan Lama Sekolah” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.101 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.04	13.21	98.71

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Faktor Infrastruktur dan Aksesibilitas; Jarak sekolah yang jauh terutama di daerah terpencil sehingga menyulitkan siswa untuk bersekolah, Fasilitas pendidikan yang tidak layak, seperti kurangnya ruang kelas, laboratorium, atau akses internet serta belum adanya listrik di daerah terpencil.
- Faktor Kualitas Pendidikan; Kualitas tenaga pengajar yang rendah, karena kurangnya pelatihan guru, kurikulum yang kurang relevan, sehingga siswa merasa bosan dan tidak termotivasi, serta tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA.
- Faktor Kebijakan dan Pemerintahan; Belum tepatnya penganggaran pendidikan yang berdampak pada kualitas sekolah, serta tidak meratanya distribusi guru yang menyebabkan daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik, juga sistem pendidikan yang kurang fleksibel sehingga sulit bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan jika sempat terputus.

2. Faktor Pendukung

- Faktor Sosial dan Budaya; Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat, dukungan keluarga terhadap pendidikan anak, mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tinggi.
- Faktor Infrastruktur dan Aksesibilitas; Ketersediaan sekolah dan perguruan tinggi di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, serta mudahnya akses pendidikan, akan semakin besar kemungkinan anak-anak untuk memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi.
- Faktor Kualitas Pendidikan; Ketersediaan guru yang berkualitas dan berkompeten serta kurikulum yang menarik dan relevan sesuai kebutuhan, juga sistem pendidikan yang fleksibel, sehingga semakin banyak anak dapat bersekolah lebih lama dan memperoleh manfaat dari pendidikan yang berkualitas.

3. Upaya/Solusi

- Faktor Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Kurangnya guru berkualitas dan bersertifikasi, terutama di daerah terpencil, minimnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan, dan keterbatasan kemampuan manajerial kepala sekolah yang berdampak pada pengelolaan sekolah yang kurang optimal.
- Faktor Sarana dan Prasarana; Kondisi gedung sekolah yang tidak layak atau tidak memenuhi standar akreditasi, kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang tidak memadai, terbatasnya akses terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan, terluar dan minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih, yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan siswa.
- Faktor Kurikulum dan Proses Pembelajaran; Metode pembelajaran yang kurang inovatif, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar, kurikulum yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai standar nasional pendidikan, dan kurangnya bahan ajar dan buku pelajaran yang sesuai standar

3.2.20.3 Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A.

Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan Nilai Akreditasi Minimal A adalah indikator yang mengukur proporsi sekolah dasar dan menengah pertama yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Akreditasi A menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar mutu pendidikan yang sangat baik dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen sekolah, serta hasil pembelajaran.

Semakin tinggi persentase sekolah yang terakreditasi A, semakin baik kualitas pendidikan di suatu daerah. Sebaliknya, jika persentase ini rendah, berarti masih banyak sekolah yang belum mencapai standar mutu yang optimal. Untuk meningkatkan angka ini, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, penguatan manajemen sekolah, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam pendampingan dan percepatan akreditasi. Dengan demikian, peningkatan akreditasi sekolah dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.102 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	17.50	0.24	1.37

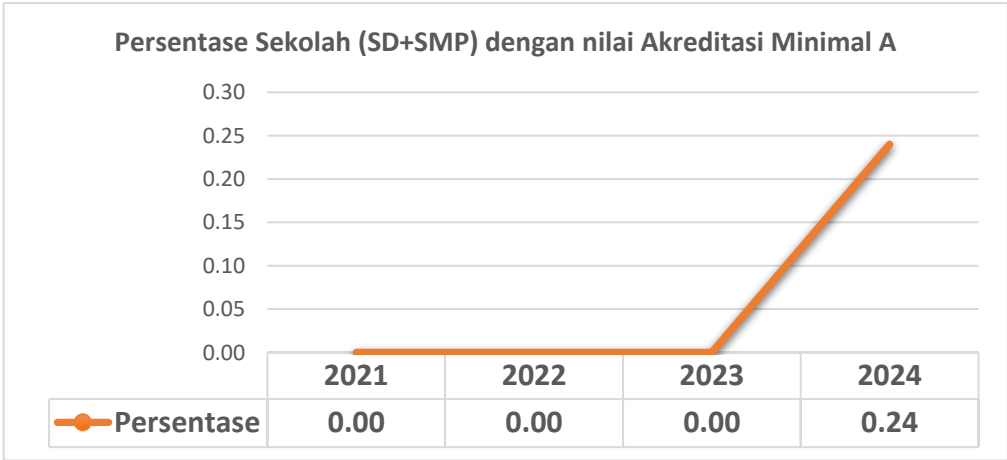
Target kinerja "**Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A**" tahun 2024 **jauh dari tercapai**, dengan realisasi **0.24%** dari target **17.50%**, sehingga capaian kinerjanya hanya **1.37%**. Hal ini menunjukkan adanya **tantangan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan**, khususnya dalam mencapai standar akreditasi yang lebih tinggi.

Capaian yang sangat rendah ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan langkah strategis, seperti peningkatan infrastruktur sekolah, pelatihan tenaga pendidik, pendampingan intensif dalam proses akreditasi, serta kebijakan yang lebih mendukung peningkatan mutu sekolah agar target di tahun mendatang dapat lebih realistis dan tercapai.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.36 Perkembangan Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A



Sumber : Dinas Pendidikan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.103 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	0.24	25.00	0.96

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Faktor Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Kurangnya guru berkualitas dan bersertifikasi, terutama di daerah terpencil, minimnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan, dan keterbatasan kemampuan manajerial kepala sekolah yang berdampak pada pengelolaan sekolah yang kurang optimal.
- Faktor Sarana dan Prasarana; Kondisi gedung sekolah yang tidak layak atau tidak memenuhi standar akreditasi, kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang tidak memadai, terbatasnya akses terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan, terluar dan minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih, yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan siswa.
- Faktor Kurikulum dan Proses Pembelajaran; Metode pembelajaran yang kurang inovatif, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar, kurikulum yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai standar nasional pendidikan, dan kurangnya bahan ajar dan buku pelajaran yang sesuai standar.

2. Faktor Pendukung

- Faktor Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Kualifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar sesuai standar nasional, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan kepala sekolah yang berkualitas dengan kemampuan manajerial yang baik.
- Faktor Sarana dan Prasarana; Ketersediaan ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya, akses terhadap teknologi dan internet untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, dan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah sesuai standar nasional pendidikan.
- Faktor Kurikulum dan Proses Pembelajaran; Implementasi kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan evaluasi akademik dan non-akademik yang terstruktur dan sesuai standar akreditasi.

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, terutama dalam metode pembelajaran inovatif, memastikan distribusi guru yang merata, terutama ke daerah terpencil, melalui insentif khusus, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam manajemen pendidikan melalui program pelatihan kepemimpinan, dan meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk insentif bagi guru di sekolah yang sedang meningkatkan status akreditasi.
- Rehabilitasi sekolah-sekolah yang tidak layak terutama pembangunan sarana yang belum sesuai standar akreditasi. Penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang memadai dengan standar pendidikan nasional, meningkatkan akses terhadap teknologi dan internet, terutama bagi sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), dan penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak untuk meningkatkan kenyamanan siswa dan guru.
- Memperbarui metode pembelajaran agar lebih interaktif dan berbasis teknologi, memastikan implementasi kurikulum berbasis standar nasional termasuk pendekatan berbasis kompetensi, menambah ketersediaan buku dan bahan ajar yang sesuai dengan standar akreditasi, dan meningkatkan program remedial dan bimbingan belajar bagi siswa yang membutuhkan.

3.2.21 SASARAN 21 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Tabel 3.104 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 21

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.57	66.71	100.21	Sangat Tinggi	BPS
2	Angka kesakitan (%)	%	4.00	9.00	-25.00	Sangat Rendah	BPS
3	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	85.00	80.05	94.18	Sangat Tinggi	RSUD Labuha
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 21					56.46	Rendah	

3.2.21.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup adalah indikator pennting yang mencerminkan harapan umur rata-rata penduduk di suatu wilayah. Angka harapan hidup di Indonesia berkisar antara 68-72 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup meliputi kualitas layanan Kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, tingkat Pendidikan, kondisi ekonomi, dan faktor lingkungan.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat Kesehatan pada khususnya. Data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 diperoleh dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS).

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.105 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

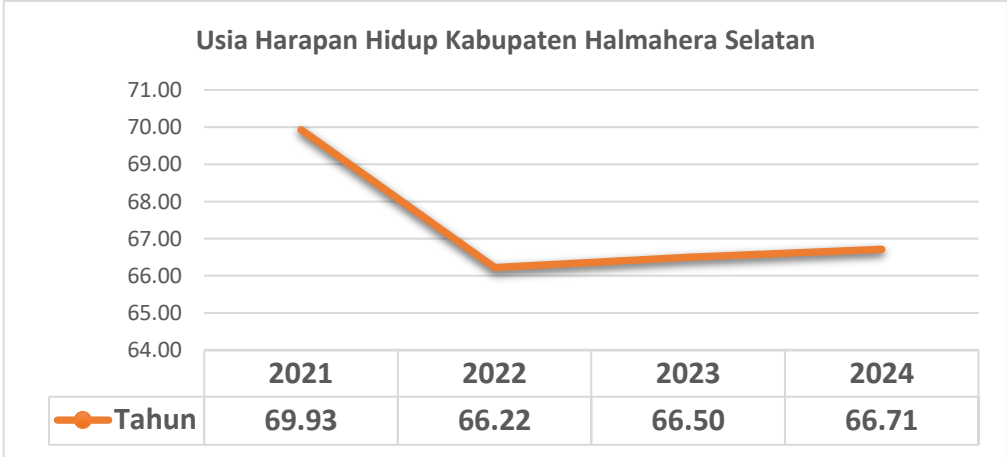
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.57	66.71	100.21

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Halmahera Selatan Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 yakni 66.71 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lebih baik dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh perbaikan di sektor Kesehatan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.37 Perkembangan Usia Harapan Hidup



Sumber : BPS Halmahera Selatan Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.71	66.93	99.67

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.107 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.71	72.39	92.15

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan :

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Angka kematian Ibu dan Bayi di beberapa wilayah kerja masih tinggi

2. Faktor Pendukung

- Adanya peningkatan akses terhadap pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah kerja

3. Upaya/Solusi

- Adanya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan
- Meningkatnya kapasitas tenaga Kesehatan
- Adanya perhatian terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan

3.2.21.2 Angka Kesakitan.

Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Interpretasi : Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Indikator kinerja Angka Kesakitan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 diperoleh dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS).

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.108 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

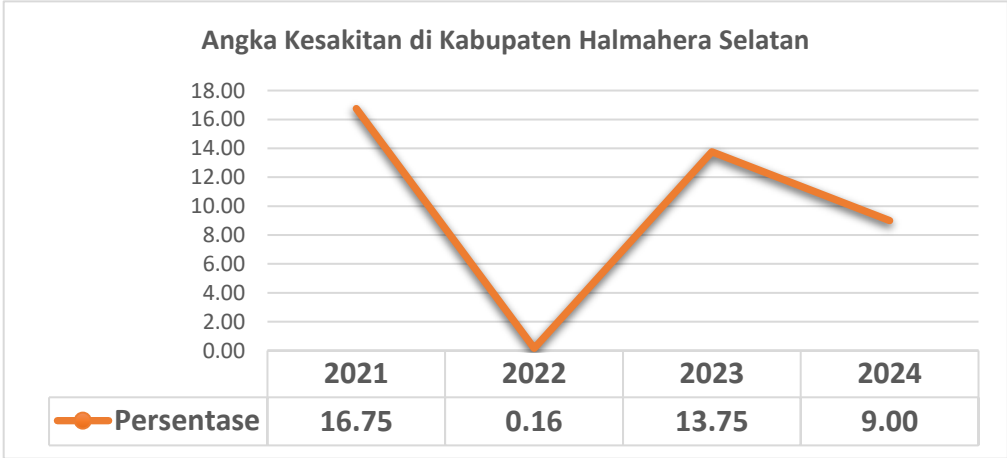
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Angka kesakitan (%)	%	4.00	9.00	-25.00

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Halmahera Selatan Angka Kesakitan pada tahun 2024 yakni 9 %, capain ini masih jauh dari yang ditargetkan yakni 4 %.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Angka Kesakitan di Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.38 Perkembangan Angka Kesakitan



Sumber : BPS Halmahera Selatan Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Angka Kesakitan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Angka kesakitan (%)	%	9.00	2.00	-250.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- semakin tingginya angka penyakit tidak menular
- masih adanya penyakit menular

2. Upaya/Solusi

- meningkatkan cakupan imunisasi (IDL)
- peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan

3.2.21.3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target.

Indikator ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan regulasi pemerintah. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan efisien bagi masyarakat. Indikator SPM diantaranya mencakup Pelayanan IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, Laboratorium dan Radiologi serta Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.110 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

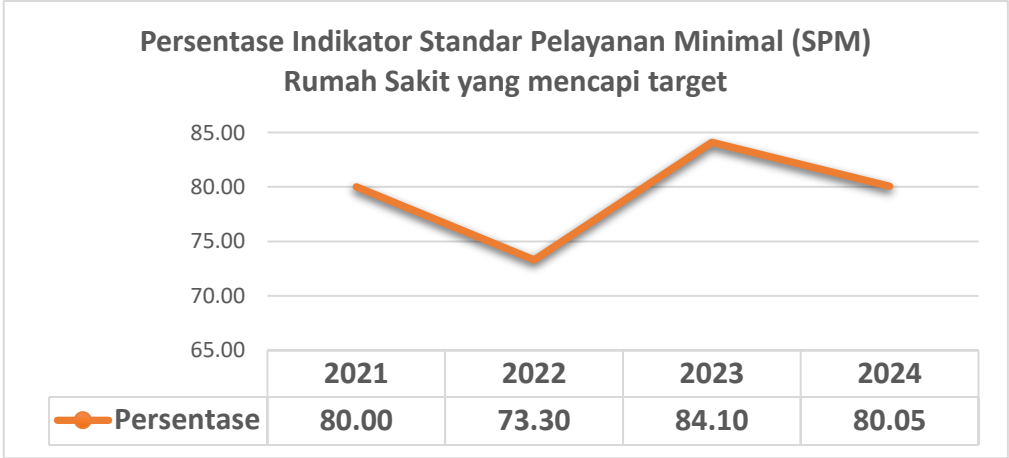
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	85.00	80.05	94.18

Persentase indikator SPM Tahun 2024 sebesar 80.05 % atau mencapai 94.18 % dari yang ditargetkan, hal ini menunjukkan pelaksanaan SPM pada RSUD Labuha cukup baik.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan realisasi indikator dimaksud dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.39 Perkembangan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target



Sumber : RSUD Labuha

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Persentase indikator SPM Rumah Sakit Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.111 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	80.05	90.00	88.94

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Persentase Indikator SPM Rumah Sakit Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.112 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	80.05	100.00	80.05

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- keterbatasan akses layanan kesehatan: masih adanya wilayah terpencil atau sulit dijangkau yang mengalami keterbatasan dalam akses layanan Kesehatan
- masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pencegahan penyakit.

2. Faktor Pendukung

- SDM Kesehatan yang Kompeten: tenaga kesehatan yang terlatih dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- Pemanfaatan teknologi informasi: digitalisasi layanan kesehatan seperti rekam medik elektronik, dan aplikasi kesehatan untuk memudahkan akses layanan

3. Upaya/Solusi

- Peningkatan akses layanan kesehatan: meningkatkan infrastruktur transportasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan Kesehatan
- Peningkatan edukasi dan Promosi kesehatan: meningkatkan kampanye kesehatan melalui media sosial, televisi, dan platform digital
- Penguatan program pencegahan penyakit: memperkuat program vaksinasi, skrining dini, dan deteksi penyakit menular untuk mencegah penyakit menular

3.2.22 SASARAN 22 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN.

Tabel 3.113 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 22

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	63.94	104.82	Sangat Tinggi	DP3AKB
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	%	81.00	83.00	102.47	Sangat Tinggi	DP3AKB
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 22					103.64	Sangat Tinggi	

3.2.22.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator ini yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. iBangga dikembangkan untuk menilai sejauh mana keluarga-keluarga di suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Indeks ini mencerminkan kualitas kehidupan keluarga, yang meliputi aspek keberdayaan ekonomi keluarga, kualitas pengasuhan anak, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dalam rumah tangga.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.114 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	63.94	104.82

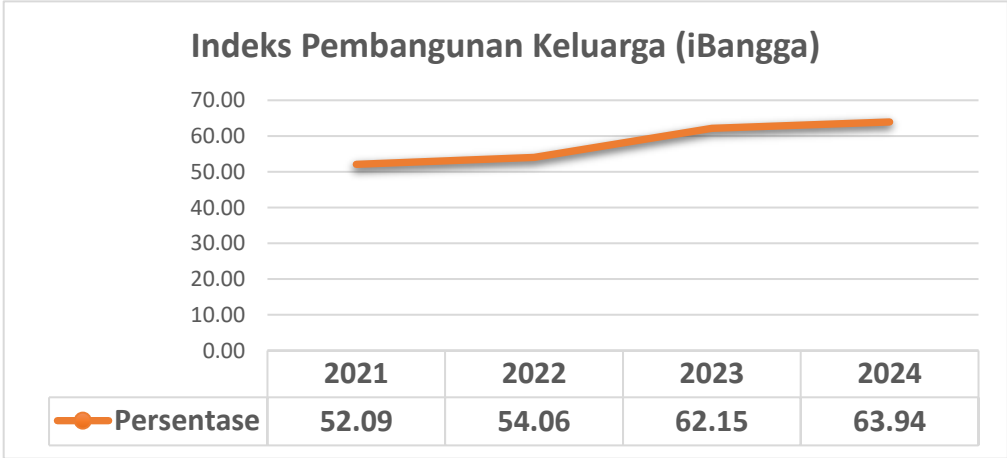
Target kinerja "**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**" tahun 2024 telah **melampaui target**, dengan realisasi **63.94** dari target **61**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **104.82%**. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan yang positif, mencerminkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan yang ditargetkan

Capaian ini menjadi indikasi bahwa strategi dan intervensi yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Namun, perlu terus dilakukan pemantauan dan peningkatan kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan keluarga tetap berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan sosial-ekonomi di masa depan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.40 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)



Sumber : DP3AKB

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.115 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.94	65	98.37

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)”, Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.116 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.94	61.00	104.82

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Masih adanya keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit.
- Tingkat pendidikan yang belum merata.
- Budaya dan tradisi yang menghambat perubahan perilaku.
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

2. Faktor Pendukung

- Pendataan Keluarga atau Pemutahiran Data tahun 2024/PK24 yang selalu Ter update
- Program-program Bangga Kencana yang efektif dalam meningkatkan kualitas keluarga.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program tersebut.
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan akses keluarga terhadap program bantuan sosial.

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi keluarga.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam sosialisasi program.
- Memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan memperluas jangkauan program.

3.2.22.2 Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR).

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dihitung berdasarkan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 5 tahun sekali. Data SDKI digunakan untuk menghitung nilai mCPR berdasarkan kategori usia perempuan yang menikah atau hidup bersama pasangan (15-49 tahun).

Formulasi Perhitungan:

$$\text{mCPR} = \left(\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang menikah atau hidup bersama pasangan}} \right) \times 100\%$$

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.116 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

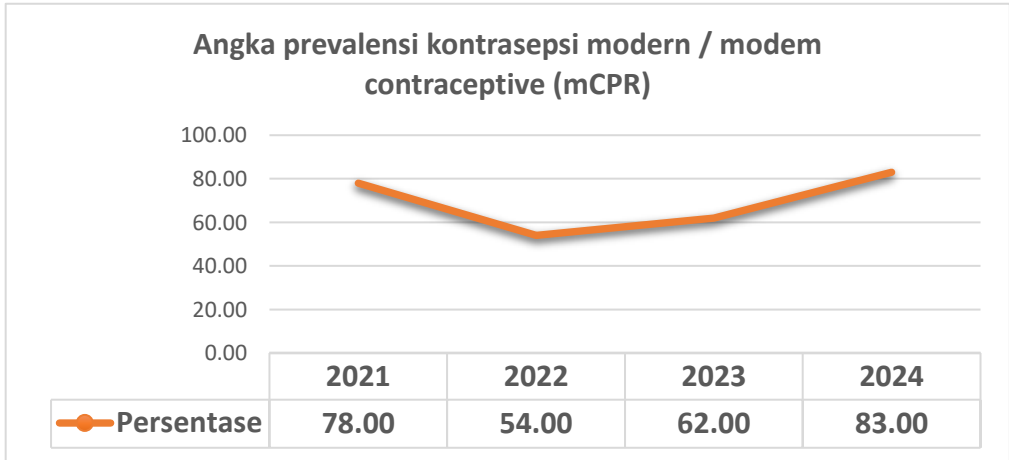
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	%	81.00	83.00	102.47

Target kinerja "Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)" tahun 2024 telah melampaui target, dengan realisasi 83% dari target 81%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi modern semakin meningkat, yang berkontribusi pada keberhasilan program keluarga berencana (KB) dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.41 Perkembangan Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modem contraceptive (mCPR)



Sumber : DP3AKB

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.117 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	83.00	85.00	97.65

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian “Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.118 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	83.00	63.41	110

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Mitos dan informasi yang salah tentang kontrasepsi.
- Akses yang terbatas terhadap layanan kontrasepsi di daerah terpencil.
- Pengambilan Obat di Gudang Alokon sering terlambat Akibat Pelaporan Stok ALOKON

2. Faktor Pendukung

- Ketersediaan layanan kontrasepsi yang mudah diakses di 41 Faskes KB di Halmahera Selatan
- Program promosi kesehatan reproduksi yang efektif.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kontrasepsi modern.
- Dukungan dari tenaga kesehatan dan kader KB.

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan edukasi dan konseling tentang kontrasepsi.
- Memperluas jangkauan layanan kontrasepsi ke daerah terpencil.
- Meningkatkan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader KB.

3.2.23 SASARAN 23 : MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.

Tabel 3.119 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 23

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33.75	54.59	110.00	Sangat Tinggi	BPS
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14.75	7.46	50.58	Rendah	BPS
3	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	60.00	76.00	110.00	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 23					90.19	Sangat Tinggi	

3.2.23.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengacu pada besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Sektor industri, khususnya manufaktur dan pengolahan, sering menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi suatu wilayah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.120 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

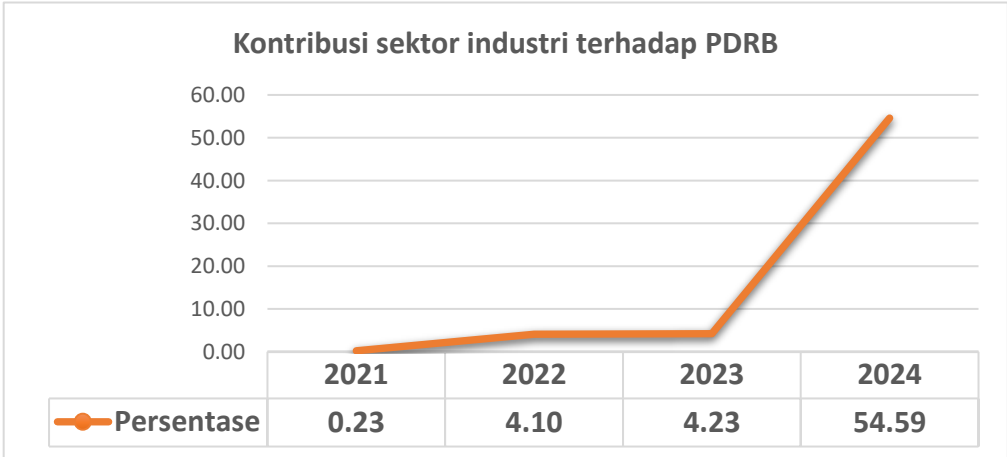
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33.75	54.59	110.00

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2024 memiliki target sebesar 33,75%, dengan realisasi mencapai 54,59%, sehingga capaian kinerja mencapai 110%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor industri berkembang jauh melebihi ekspektasi dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Kontribusi sektor industri terhadap PDRB* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.42 Perkembangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB



Sumber : Dinas Koperindag

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Kontribusi sektor industri terhadap PDRB* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.121 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	54.59	34.25	110.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Terjadinya Peningkatan Inflasi

2. Faktor Pendukung

- Daya Beli Masyarakat Meningkat

3. Upaya/Solusi

- Adanya Ketersediaan Bahan Baku

3.2.23.2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengukur persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Sektor ini mencakup perdagangan besar, eceran, ekspor-impor, dan aktivitas distribusi barang dan jasa yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.122 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

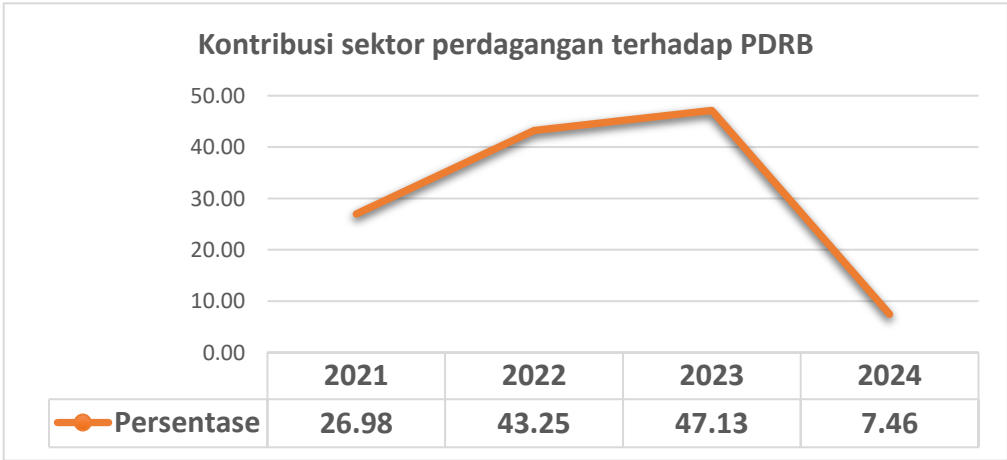
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14.75	7.46	50.58

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 memiliki target sebesar 14,75%, namun realisasinya hanya mencapai 7,46%, sehingga capaian kinerja hanya 50,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan belum mencapai target yang diharapkan, dengan kontribusi yang jauh lebih rendah dari proyeksi awa

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.43 Perkembangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB



Sumber : Dinas Koperindag

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.123 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7.46	15.50	48.13

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan SDM yang terdidik dan terampil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi

2. Faktor Pendukung

- Jumlah perusahaan dapat meningkatkan PDRB melalui peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3.2.23.3 Persentase Kunjungan Wisatawan.

Persentase Kunjungan Wisatawan adalah indikator yang mengukur tingkat kunjungan wisatawan ke suatu daerah dalam periode tertentu, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Indikator ini digunakan untuk menilai pertumbuhan sektor pariwisata, daya tarik destinasi wisata, serta dampak ekonomi dari industri pariwisata terhadap daerah tersebut.

Semakin tinggi persentase kunjungan wisatawan, semakin baik potensi ekonomi dan pengembangan infrastruktur pariwisata di wilayah tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi persentase ini meliputi promosi wisata, aksesibilitas transportasi, kualitas fasilitas pariwisata, keamanan, serta daya tarik destinasi wisata itu sendiri. Untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan, diperlukan strategi seperti penguatan branding pariwisata, perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan wisata, serta penyelenggaraan event atau festival yang menarik wisatawan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.124 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Kunjungan Wisatawan	%	60.00	76.00	126.67

Target kinerja **"Persentase Kunjungan Wisatawan"** tahun 2024 telah **melampaui target secara signifikan**, dengan realisasi **76%** dari target **60%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **126.67%**. Hal ini menunjukkan bahwa **sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat positif**, dengan peningkatan jumlah wisatawan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan

Capaian ini mencerminkan bahwa **strategi pengembangan pariwisata telah berjalan dengan baik**, namun perlu dipastikan bahwa pertumbuhan wisatawan juga diimbangi dengan **pengelolaan destinasi yang berkelanjutan**, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.



DATA WISATAWAN MANCANEGERA BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024

NO	NEGARA	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	USA	Orang	367	
2	German	Orang	421	
3	Itali	Orang	150	
4	Zwitserland	Orang	67	
5	Swiss	Orang	415	
6	Canada	Orang	55	
7	Perancis	Orang	45	
8	Austria	Orang	10	
9	Australia	Orang	33	
10	British	Orang	35	
11	New Zealand	Orang	22	
			1620	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Ali Hasan, S.T.
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19730312 200808 1 001



DATA WISATAWAN NUSANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024

NO	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	Orang	2000	
2	Februari	Orang	1200	
3	Maret	Orang	4225	
4	April	Orang	3210	
5	Mei	Orang	1760	
6	Juni	Orang	980	
7	Juli	Orang	3450	
8	Agustus	Orang	888	
9	September	Orang	2012	
10	Oktober	Orang	1070	
11	November	Orang	1077	
12	Desember	Orang	1115	
TOTAL			22987	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



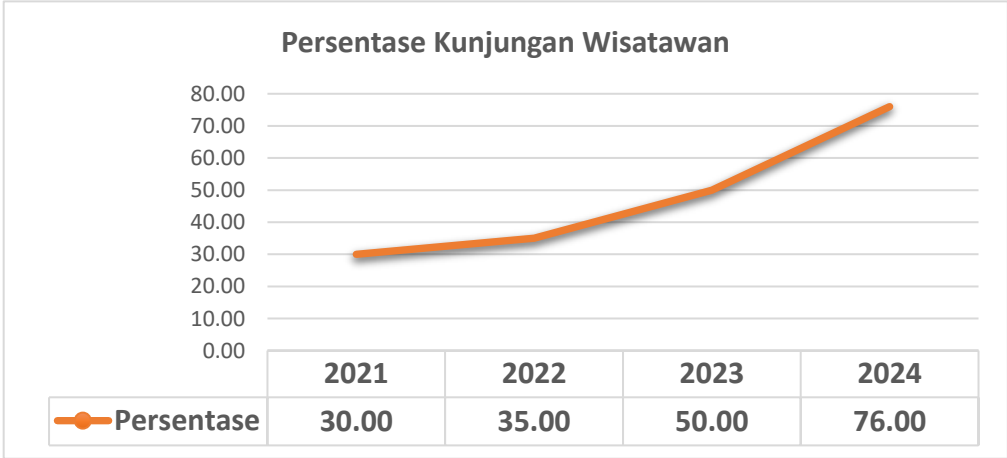
Ali Hasan, S.T.
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19730312 200808 1 001



B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Persentase Kunjungan Wisatawan” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.44 Perkembangan Persentase Kunjungan Wisatawan



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Kunjungan Wisatawan” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.125 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Kunjungan Wisatawan	%	76	80	95.00

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan anggaran dalam penyediaan infrastruktur maupun upaya promosi.

2. Faktor Pendukung

- Bertambahnya jumlah Destinasi Pariwisata, Sarana Prasarana yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan memadai, upaya promosi yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain mengikuti even skala nasional DEEP DIVE PROMOTION di Jakarta, Penyelenggaraan Festival Marabose, penyebaran informasi pariwisata melalui platform sosial media dengan konten yang dibuat melalui jasa influencer serta penyediaan produk wisata

3. Upaya/Solusi

- Percepatan penyediaan infrastruktur pada kawasan destinasi wisata yang dikembangkan dan ditetapkan.

3.2.24 SASARAN 24 : MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN.

Tabel 3.126 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 24

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	65,275.29	27,828.70	42.63	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Ketpang
2	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	42,208.69	45,972.99	108.92	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 24					75.78	Tinggi	

3.2.24.1 Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)

Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian: Mengingat realisasi produksi pertanian masih sangat rendah dibandingkan target, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil panen, seperti optimalisasi penggunaan teknologi pertanian, penyediaan pupuk dan benih berkualitas, serta penguatan infrastruktur pertanian.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.127 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

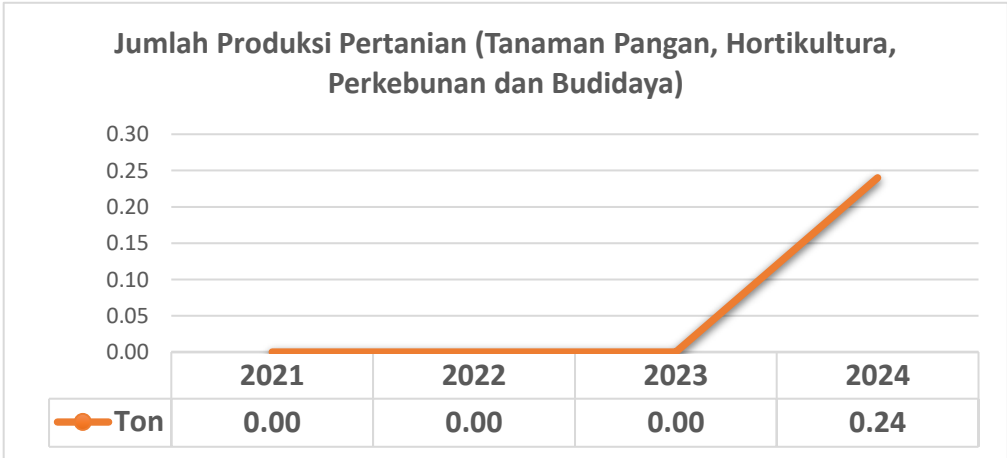
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	65,275.29	27,828.70	42.63

Pada indikator Jumlah Produksi Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan budidaya, target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 65.275,29 ton. Namun, hingga saat ini, realisasi capaian produksi baru mencapai 27.828,70 ton, atau 42,63% dari target yang diharapkan. Persentase pencapaian ini menunjukkan bahwa produksi pertanian masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan hasil produksi, baik melalui optimalisasi lahan, peningkatan akses terhadap sarana produksi pertanian, maupun pemberdayaan petani.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.45 Perkembangan Jumlah Produksi Pertanian



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.128 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	27,828.70	78,983.10	35.23

Kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang beragam. Jumlah produksi pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan budidaya mencapai 27.828,70 ton, yang baru memenuhi 35,23% dari target akhir RPJMD 2026 sebesar 78.983,10 ton. Capaian ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan produksi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pertanian, dampak perubahan iklim, serta masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian modern. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti penguatan mekanisasi pertanian, peningkatan akses petani terhadap benih unggul dan pupuk, serta pengembangan sistem irigasi yang lebih baik untuk mendorong produktivitas sektor pertanian

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Rendahnya adopsi budidaya pertanian modern oleh petani.
- Kurangnya akses terhadap modal usaha bagi petani kecil.
- Dampak perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian cuaca dan gagal panen.
- Infrastruktur irigasi dan jalan tani yang masih terbatas.

2. Faktor Pendukung

- Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas.
- Program bantuan sarana dan prasarana budidaya yang memadai dari pemerintah.
- Adanya penyuluhan pertanian bagi petani.

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan akses petani terhadap metode budidaya pertanian modern.
- Mempermudah akses permodalan bagi petani melalui skema kredit pertanian.
- Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi dan jalan tani untuk meningkatkan produktivitas.
- Meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam manajemen pertanian yang lebih efisien.

3.2.24.2 Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya).

Indikator ini diukur dari Volume Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan (Ton/Tahun). Capaian Indikator Produksi berdasarkan Pengolahan Data Statistik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan dengan melakukan pengambilan Produksi Perikanan (tangkap, Budidaya dan pengolahan) di beberapa kecamatan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.129 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

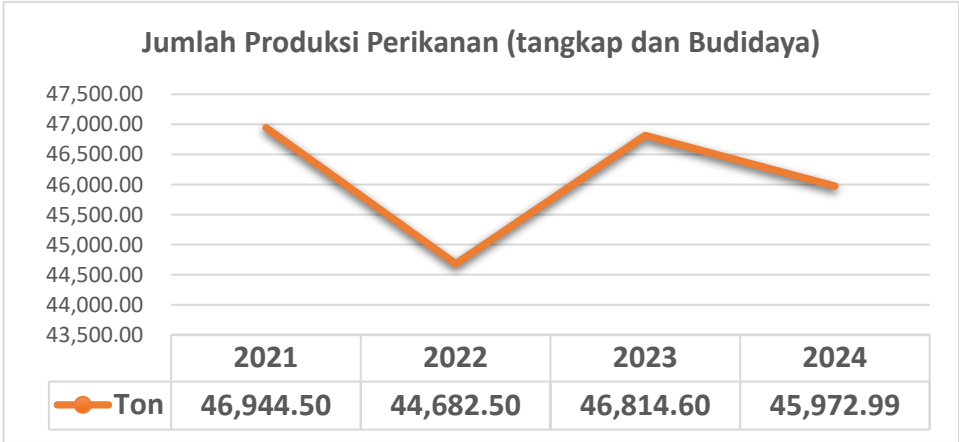
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	42,208.69	45,972.99	108.92

Target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun 2024 telah terlampaui dengan capaian kinerja sebesar 108.92%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam sektor perikanan, dengan realisasi produksi melebihi target sebesar **3,764.3 ton**.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya) dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 4.46 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.130 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	45,972.99	45,731.90	100.53

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional, maka capaian Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.131 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	45,972.99	13,070,000.00	0.35

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Musim atau Cuaca Gelombang Tinggi yang membuat Kapal/Perahu Penangkapan ikan tidak bisa melaut dan Para Pembudidayaan Ikan terjadi serangan penyakit dan Pakan yang mahal sehingga tidak optimal dalam pembudidayaan ikan

2. Faktor Pendukung

- Sarana dan Prasarana Kapal/Perahu Penangkap ikan bertambah dari pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun Anggaran 2024 dan Sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan bertambah dari Pengadaan Dinas kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024
- Faktor Pendukung : Sarana dan Prasarana Kapal/Perahu Penangkap ikan bertambah dari pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun Anggaran 2024



- Faktor Pendukung : Sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan bertambah dari Pengadaan Dinas kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024



3. Upaya/Solusi

- Kerjasama dengan Penyuluh perikanan dalam sosialisasi musim penangkapan ikan yang di lakukan jika terjadi gelombang tinggi dan diskusi dengan Pembudidaya dalam mengatasi serangan penyakit dan pembuatan pakan ikan alternatif.

3.2.25 SASARAN 25 : MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI DI HALMAHERA SELATAN.

Tabel 3.132 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 25

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	300	88,431	110.00	Sangat Tinggi	DPM PSP
2	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100	Sangat Tinggi	DPM PSP
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 25					105.00	Sangat Tinggi	

3.2.25.1 Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.133 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

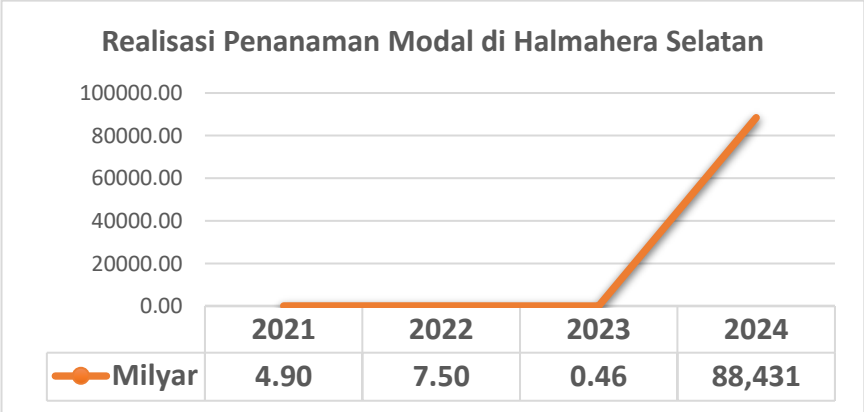
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	300	88,431	110.00

Berdasarkan data yang Anda berikan, **Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan** pada tahun 2024 memiliki target sebesar **Rp 300 miliar**, sementara realisasinya mencapai **Rp 88,431 miliar**, dengan capaian **110%** dari target yang ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.47 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan



Sumber : DPM PTSP

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	88,431	500.00	110.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Sistem perizinan investasi yang berbelit-belit
- stabilitas politik, ketidak pastian hukum,
- peraturan yang tumpang tindih, ketidakpastian status tanah, ketidakpastian lahan suaka alam, dan keterbatasan infrastruktur. Akuisisi Lahan, Infra Struktur Publik, yang belum merata pajak dan Insentif yang tidak mendukung serta tenaga kerja terampil belum memadai dan Regulasi yang berbelit-belit

2. Faktor Pendukung

- Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah sehingga para investor berlomba-lomba untuk membuka lahan usaha di Kabupaten Halmahera Selatan
- Jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi dengan kondisi karakteristik demografi dan georafi Kab. Halmahera Selatan

3. Upaya/Solusi

- Menciptakan stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi,, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisiensi.
- Intervensi Pemerintah Daerah dalam proses hasil produksi terhadap pemberdayaan sumber daya dan social masyarakat.

3.2.25.2 Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya.

Persentase Perizinan dan Non-Perizinan yang Dikeluarkan dan Sesuai Peruntukannya mengacu pada proporsi izin usaha, pembangunan, lingkungan, dan izin lainnya yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan regulasi, rencana tata ruang, serta tujuan penggunaannya.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.135 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

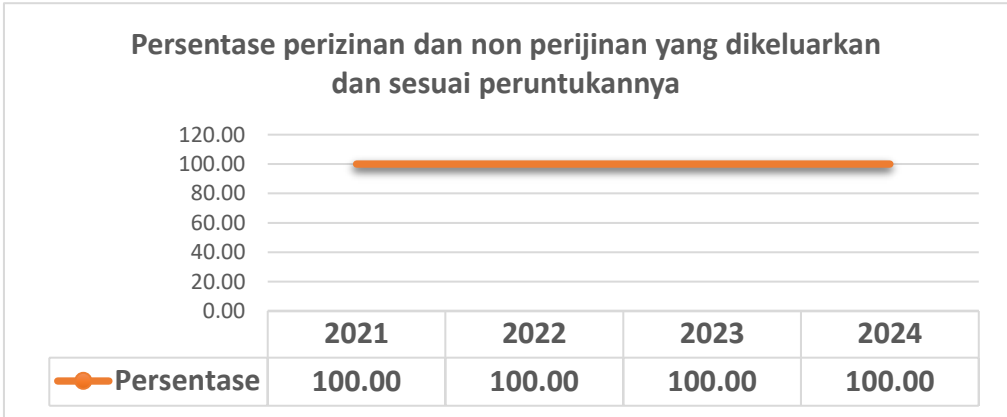
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100

Indikator "**Persentase Perizinan dan Non-Perizinan yang Dikeluarkan dan Sesuai Peruntukannya**" menunjukkan pencapaian yang optimal pada tahun 2024. Dengan target sebesar **100%**, realisasi juga mencapai **100%**, menghasilkan capaian kinerja **100%**.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan **Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya** dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.48 Perkembangan Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya



Sumber : DPM PTSP

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya Tahun 2024* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.136 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100	100	100.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Pendukung

- Kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Adanya layanan pengaduan bagi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan izin.
- Tim yang profesional dalam mengelola administrasi perizinan
- Implementasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS – *Online Single Submission*)
- Adanya pedoman dan regulasi yang tegas dalam proses perizinan

3.2.26 SASARAN 26 : MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM DI HALMAHERA SELATAN.

Tabel 3.137 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 26

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	47.50	9.58	20.17	Sangat Rendah	Dinas Koperindag
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	65.00	5.20	8.00	Sangat Rendah	Dinas Koperindag
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 26					14.08	Sangat Rendah	

3.2.26.1 Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)

Persentase Koperasi Aktif dan Volume Usahanya Meningkat (Koperasi yang Berkualitas) adalah indikator yang mengukur jumlah koperasi yang masih beroperasi secara aktif dan mengalami peningkatan dalam volume usahanya.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.138 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

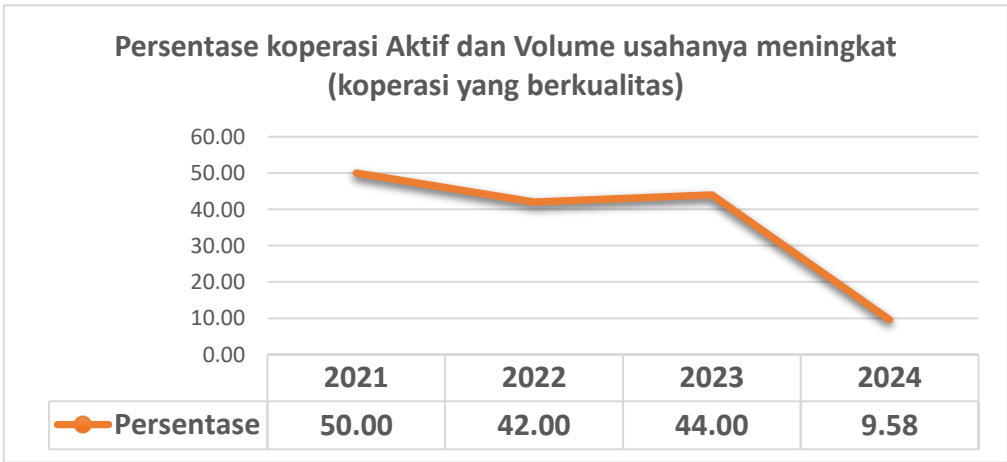
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	47.50	9.58	20.17

Angka ini menunjukkan bahwa hanya **9,58% koperasi yang aktif dan berkembang**, jauh di bawah target **47,50%**. Capaian **20,17%** berarti masih banyak koperasi yang belum mampu berkembang atau bahkan tidak beroperasi secara efektif.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.49 Perkembangan Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)



Sumber : Dinas Koperindag

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.139 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	9.58	52.50	18.25

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya Permodalan, masalah Likuiditas yang menghambat kegiatan Simpan Pinjam

2. Faktor Pendukung

- Kepatuhan Anggota Terhadap regulasi Koperasi, Peningkatan Kualitas Manajemen, dan Ketersediaan sumberdaya Manusia yang Terlatih.

3. Upaya/Solusi

- Penyediaan Pelatihan Manajemen bagi Pengurus serta Mencari Sumber Modal Alternatif untuk mendukung Operasional

3.2.26.2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha.

Indikator ini mengukur seberapa banyak Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang masih beroperasi secara aktif dan mengalami pertumbuhan dalam volume usahanya. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan jumlah usaha kecil yang berhasil berkembang menjadi wirausaha yang mandiri dan berkelanjutan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.140 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	65.00	5.20	8.00

Capaian kinerja **hanya mencapai 8,00% dari target yang ditetapkan**. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UKM yang aktif dan berkembang **sangat jauh dari harapan**.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.49 Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha



Sumber : Dinas Koperindag

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.141 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	5.20	75.00	6.93

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Karna kurangnya anggaran sehingga bantuan baik modal usaha maupun peralatan produksi yang diberikan masih terbatas kepada pelaku usaha dan pelatihan pengembangan manajemen usaha

2. Faktor Pendukung

- Peningkatan SDM para pelaku usaha, Bantuan modal da perlatan kepada pelaku usaha

3. Upaya/Solusi

- Perlu perhatian serius anggaran kedepannya anggaran yang diberikan dapat terakomodir kegiatan prioritas UMKM

3.2.27 SASARAN 27 : MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETENAGAKERJAAN.

Tabel 3.142 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 27

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	40.00	10.00	25.00	Sangat Rendah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 27					25.00	Sangat Rendah	

3.2.27.1 Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)

Besaran pekerja yang meningkat produktivitasnya setelah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pelatihan, industri tempat mereka bekerja, dans ejauh mana pelatihan tersebut diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi dapat meningkatkan produktivitas pekerja secara signifikan.

Berikut adalah beberapa hasil yang sering ditemukan dalam penelitian tentang pelatihan berbasis kompetensi. Peningkatan Keterampilan dan Efisiensi: Pelatihan berbasis kompetensi memungkinkan pekerja untuk menguasai keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka, yang dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat waktu penyelesaian tugas.

Peningkatan Kualitas Kerja: Pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi cenderung menghasilkan output yang lebih berkualitas, mengurangi tingkat kecelakaan kerja, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan Kepuasan dan Motivasi Kerja: Pekerja yang merasa diberdayakan dengan keterampilan baru yang relevan cenderung lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka, yang dapat mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi.

Dampak Jangka Panjang: Meskipun manfaat jangka pendek dari pelatihan berbasis kompetensi bisa terlihat dengan segera, dampak jangka panjang sering kali lebih besar. Karyawan yang terus berkembang melalui pelatihan berbasis kompetensi dapat menunjukkan peningkatan karier, yang pada gilirannya berdampak positif pada produktivitas organisasi.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.143 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	%	40.00	10.00	25.00

Pelatihan berbasis kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Meskipun data spesifik mengenai persentase pekerja yang produktivitasnya meningkat setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tidak selalu tersedia, beberapa studi dan laporan menunjukkan dampak positif dari pelatihan tersebut .Misalnya, dalam laporan Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Pangkep tahun 2024, tercatat bahwa 0,3% tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan produktivitas.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak pelatihan terhadap produktivitas dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pelatihan, sektor industri, dan karakteristik individu peserta. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif dan berbasis data diperlukan untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara spesifik.



B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.50 Perkembangan Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)



Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.144 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	%	10.00	50.00	20.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya Akses ke Pelatihan yang Berkualitas: Beberapa pekerja mungkin tidak memiliki akses ke pelatihan berkualitas karena keterbatasan lokasi, biaya, atau waktu.
- Keterbatasan Anggaran: Banyak perusahaan atau lembaga yang terbatas dalam hal anggaran untuk menyediakan pelatihan yang memadai bagi pekerja.
- Keterbatasan Waktu Pekerja: Pekerja yang sibuk dengan tugas mereka sering kali kesulitan untuk mengikuti pelatihan, terutama pelatihan tatap muka yang memakan waktu.
- Kesenjangan Keterampilan: Terkadang pelatihan yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan praktis di tempat kerja, menyebabkan kesenjangan antara keterampilan yang dipelajari dan keterampilan yang dibutuhkan.
- Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa pekerja mungkin merasa ragu atau menentang pelatihan baru karena merasa nyaman dengan keterampilan lama yang sudah dikuasai..

2. Faktor Pendukung

- Ketersediaan Pelatihan Berbasis Standar Nasional: Pelatihan yang diadakan sesuai dengan standar kompetensi nasional dapat memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh relevan dengan kebutuhan industri.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Kolaborasi antara perusahaan, lembaga pelatihan, dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan program pelatihan yang sesuai dan terfokus.
- Sumber Daya Instruktur yang Kompeten: Penggunaan instruktur yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup sangat mendukung efektivitas pelatihan.
- Dukungan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam proses pelatihan (misalnya e-learning, simulasi, dan penggunaan perangkat lunak canggih) dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan jangkauan peserta.
- Evaluasi dan Pemantauan Berkala: Evaluasi hasil pelatihan yang terstruktur dapat memastikan bahwa pelatihan mencapai tujuannya dan pekerja dapat mengimplementasikan keterampilan yang didapat dengan baik.

3. Upaya/Solusi

- Penyediaan Pelatihan yang Terjangkau dan Aksesibel: Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih fleksibel, seperti pelatihan daring atau pelatihan di tempat kerja, dapat membantu pekerja dengan keterbatasan waktu dan akses.
- Peningkatan Pembiayaan untuk Pelatihan: Pemerintah dan perusahaan dapat menyediakan dana lebih banyak untuk program pelatihan berbasis kompetensi, baik melalui anggaran internal perusahaan maupun dukungan subsidi pemerintah.
- Kolaborasi antara Dunia Usaha dan Pendidikan: Perusahaan dan lembaga pelatihan atau universitas perlu bekerja sama untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan tuntutan pasar.

- Pelatihan yang Berfokus pada Kebutuhan Praktis: Program pelatihan harus dirancang dengan pendekatan berbasis aplikasi langsung di tempat kerja, dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis agar keterampilan yang diperoleh lebih mudah diterapkan.
- Penguatan Budaya Pembelajaran: Membentuk budaya yang mendorong pekerja untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi pekerja yang mengikuti pelatihan dan menunjukkan peningkatan kinerja.

3.2.28 SASARAN 28 : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT.

Tabel 3.145 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 28

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	36.00	27.34	75.94	Tinggi	Dinas PUPR
2	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	80.00	85.00	106.25	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
3	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	75.00	88.00	110.00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 28					97.40	Sangat Tinggi	

3.2.28.1 Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik atau mantap terhadap total panjang jalan kabupaten yang ada. Jalan dalam kondisi baik/mantap berarti jalan tersebut memiliki permukaan yang masih layak digunakan, tidak mengalami kerusakan signifikan, serta memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.146 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

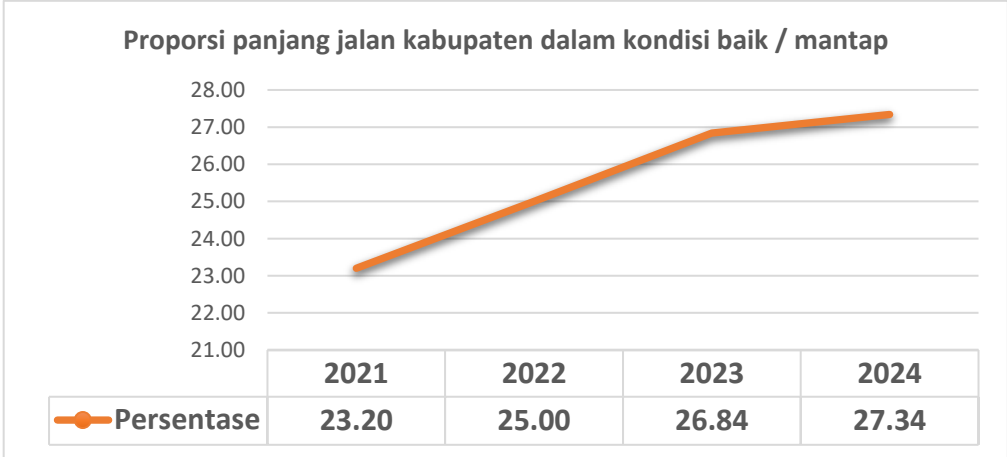
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	36.00	27.34	75.94

Target kinerja **"Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap"** tahun 2024 belum tercapai, dengan realisasi sebesar **27.34%** dari target **36%**, menghasilkan capaian kinerja **75.94%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.51 Perkembangan Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap



Sumber : Dinas PUPR

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.147 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	27.34	40.00	68.35

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Adanya Koordinasi Intern, Sektoral maupun Lintas Sektor Secara Berkala Sehingga Setiap Hambatan Dan Kendala Dapat Diminimalisir
- Dukungan Penuh dari Segenap Pimpinan Dan Para Pelaksana Dalam Menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja
- Komitmen Bersama Untuk Selalu Berusaha Mencapai Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan.

2. Faktor Pendukung

- Belum Seluruh Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik / Mantap Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
- Anggaran Yang Tersedia Belum Cukup Membiayai Progam / Kegiatan yang Ada.

3. Upaya/Solusi

- Melaksanakan Skala Prioritas Perbaikan Jalan Agar Dalam Kondisi Baik / Mantap Dan Perbaikan Jembatan Agar dalam Kondisi baik

3.2.28.2 Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi.

Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi adalah indikator yang mengukur proporsi sarana transportasi yang memenuhi standar kelayakan operasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indikator ini mencakup berbagai jenis moda transportasi, seperti kendaraan darat (bus, angkutan umum), kereta api, kapal laut, dan pesawat udara, serta infrastruktur pendukungnya.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.148 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

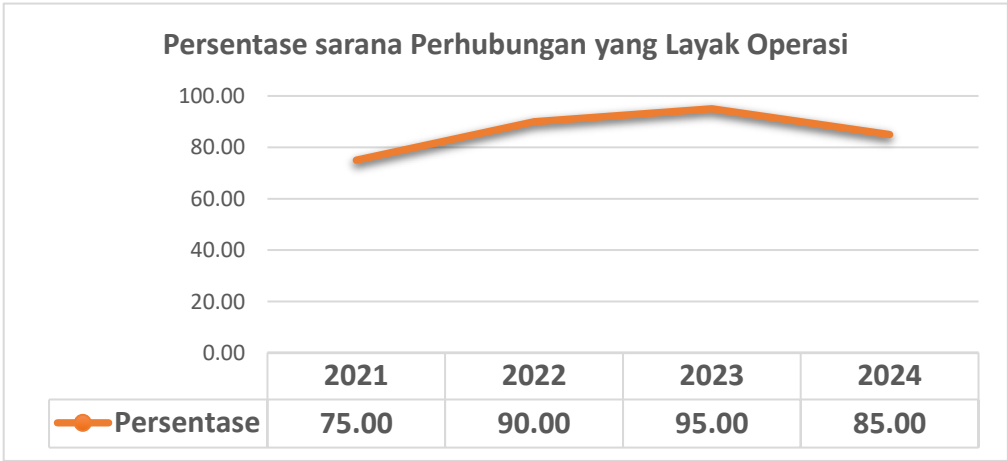
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	80.00	85.00	106.25

Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi Tahun 2024 memiliki target sebesar 80%, dengan realisasi mencapai 85%, sehingga capaian kinerja sebesar 106,25%.Capaian di atas 100% ini menunjukkan bahwa kinerja dalam memastikan sarana perhubungan layak operasi telah melampaui target yang ditetapkan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.52 Perkembangan Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi



Sumber : Dinas Perhubungan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.149 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	85.00	90.00	94.44

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya anggaran dapat menghambat pemeliharaan dan pengadaan sarana perhubungan yang layak operasi.
- Kurangnya tenaga kerja yang terampil atau berpengalaman dapat menghambat pemeliharaan dan pengoperasian sarana perhubungan

2. Faktor Pendukung

- Pemeliharaan Sarana yang Teratur: Pemeliharaan sarana perhubungan yang teratur dapat meningkatkan persentase sarana yang layak operasi
- Kerja sama dengan stakeholder dapat memastikan bahwa sarana perhubungan dapat dioperasikan dan dipelihara dengan baik

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana perhubungan
- Memberikan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana perhubungan

3.2.28.3 Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi .

Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi adalah indikator yang mengukur proporsi infrastruktur transportasi yang memenuhi standar operasional dan dapat digunakan secara optimal. Prasarana perhubungan mencakup fasilitas seperti jalan raya, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya yang mendukung kelancaran transportasi.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.150 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	75.00	88.00	110.00

Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi Tahun 2024 memiliki target sebesar 75%, dengan realisasi mencapai 88%, sehingga capaian kinerja sebesar 110%. Capaian di atas 100% ini menunjukkan bahwa kondisi prasarana perhubungan melebihi ekspektasi yang ditetapkan

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.53 Perkembangan Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi



Sumber : Dinas Perhubungan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.151 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	88.00	80.00	110.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya anggaran dapat menghambat pemeliharaan dan pengadaan prasarjana perhubungan.

2. Faktor Pendukung

- Pemeliharaan rutin pada prasarana perhubungan dapat memastikan bahwa prasarana tersebut tetap layak fungsi

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan prasarana perhubungan.

3.2.29 SASARAN 29 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR BAKU UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK DAN NON DOMESTIK.

Tabel 3.152 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 29

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	65.00	82.15	110.00	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 29					110.00	Sangat Tinggi	

3.2.29.1 Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang atau jumlah jaringan irigasi kabupaten yang masih berfungsi dengan baik terhadap total jaringan irigasi yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase. Jaringan irigasi dikategorikan dalam kondisi baik apabila :

- Saluran irigasi tidak mengalami kerusakan yang signifikan.
- Aliran air dapat mengalir dengan lancar sesuai kebutuhan pertanian.
- Struktur pendukung, seperti pintu air dan tanggul, berfungsi dengan optimal.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.153 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

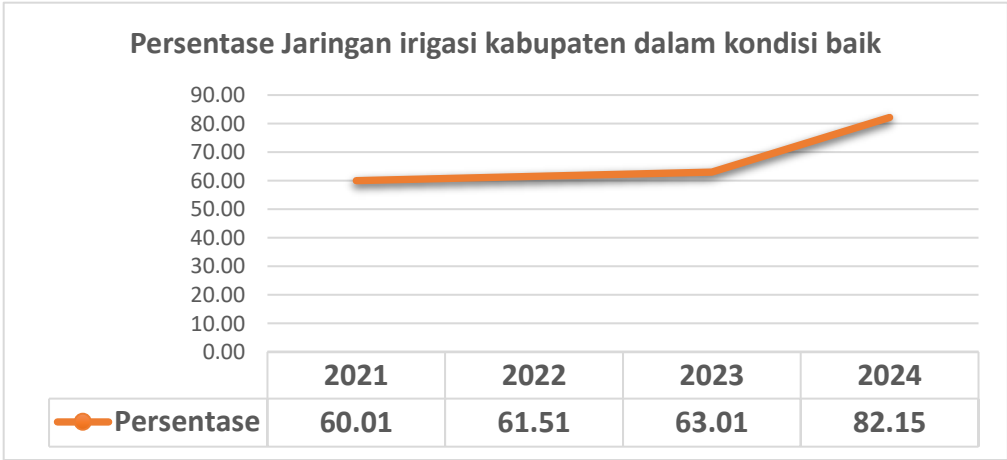
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	65.00	82.15	110

Target kinerja "**Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**" tahun 2024 telah **terlampaui**, dengan realisasi **82.15%** dari target **65%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **110%**. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi di wilayah kabupaten, yang dapat berdampak positif pada sektor pertanian dan ketahanan pangan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.54 Perkembangan Jaringan irigasi kabupaten.



Sumber : Dinas PUPR

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.154 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	82.15	75.00	109.53

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Adanya Bencana Alam Berupa Banjir Yang Menyebabkan Jaringan Irigasi Mengalami Kerusakan

2. Faktor Pendukung

- Adanya Koordiansi Intern, Sektoral maupun Lintas Sektor Secara Berkala Sehingga Setiap Hambatan Dan Kendala Dapat Diminimalisir
- Dukungan Penuh dari Segenap Pimpinan Dan Para Pelaksana Dalam Menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja

3. Upaya/Solusi

- Melaksanakan Skala Prioritas Perbaikan Jaringan Irigasi Agar Menjadi Kondisi baik

3.2.30 SASARAN 30 : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS KOMUNIKASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Tabel 3.155 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 30

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00	55.00	100.00	Sangat Tinggi	Diskominfo, Statistik dan Persandian
2	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	60.00	65.00	108.33	Sangat Tinggi	Diskominfo, Statistik dan Persandian
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 30					104.17	Sangat Tinggi	

3.2.30.1 Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)

Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City) adalah indikator yang mengukur sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menerapkan sistem digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan website dalam konsep **Smart City** bertujuan untuk:

- **Meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan**, dengan sistem berbasis data yang lebih terstruktur.
- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas**, dengan keterbukaan informasi melalui website resmi SKPD.
- **Mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif**, dengan akses layanan digital bagi masyarakat.
- **Mempermudah koordinasi antar SKPD**, melalui sistem yang terintegrasi.

Semakin tinggi persentase SKPD yang telah memiliki SIM dan website, semakin baik kesiapan daerah dalam mengimplementasikan **pemerintahan berbasis elektronik (E-Government)** dan konsep **Smart City**, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.156 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00	55.00	100.00

Target kinerja **"Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City)"** tahun 2024 telah **tercapai sepenuhnya**, dengan realisasi **55%** sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya mencapai **100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- Pemerintah daerah telah berhasil merealisasikan target pengembangan digitalisasi layanan SKPD sesuai dengan rencana.
- Implementasi sistem informasi dan web dalam konsep Smart City sudah berjalan, mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas layanan publik.
- SKPD telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Meskipun target telah tercapai, masih ada **45% SKPD yang belum memiliki SIM dan WEB**, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan digitalisasi secara menyeluruh, guna mendukung konsep **Smart City yang lebih optimal dan terintegrasi**.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City) dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.55 Perkembangan SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)



Sumber : Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.157 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00	70.00	78.57

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan, pemeliharaan, dan operasional sistem e-government.
- Adanya resistensi dari sebagian ASN atau masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga menghambat adopsi e-government.

2. Faktor Pendukung

- Adanya kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan sistem e-government sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik
- Tersedianya infrastruktur dasar TI seperti jaringan internet, server, dan perangkat keras lainnya yang mendukung implementasi e-government.
- Adanya kesadaran dan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti kepala daerah, dinas terkait, dan masyarakat untuk mendukung implementasi e-government.
- Kolaborasi dengan pihak swasta atau konsultan TI untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem e-government.

3. Upaya/Solusi

- Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur TI, seperti jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya, terutama di daerah terpencil.
- Mengadakan pelatihan secara berkala bagi ASN dan SDM terkait untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola dan mengoperasikan sistem e-government.
- Bermitra dengan pihak swasta atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan teknis dan pengembangan sistem e-government.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.2.30.2 Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village).

Indikator ini yang mengukur proporsi desa yang memiliki akses terhadap jaringan internet, baik melalui kabel, fiber optik, satelit, atau jaringan seluler. Indikator ini penting dalam mendukung konsep **Smart Village**, yaitu desa yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Peningkatan akses internet di desa memiliki berbagai manfaat, seperti:

- **Meningkatkan akses informasi dan pendidikan**, terutama melalui platform daring.
- **Mendukung ekonomi digital**, termasuk e-commerce dan pemasaran produk lokal.
- **Mempermudah akses layanan kesehatan dan administrasi publik**, seperti telemedicine dan layanan e-government.
- **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa**, melalui komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah.

Semakin tinggi persentase desa yang memiliki akses internet, semakin besar potensi transformasi digital di daerah pedesaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi digital, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.158 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	60.00	65.00	108.33

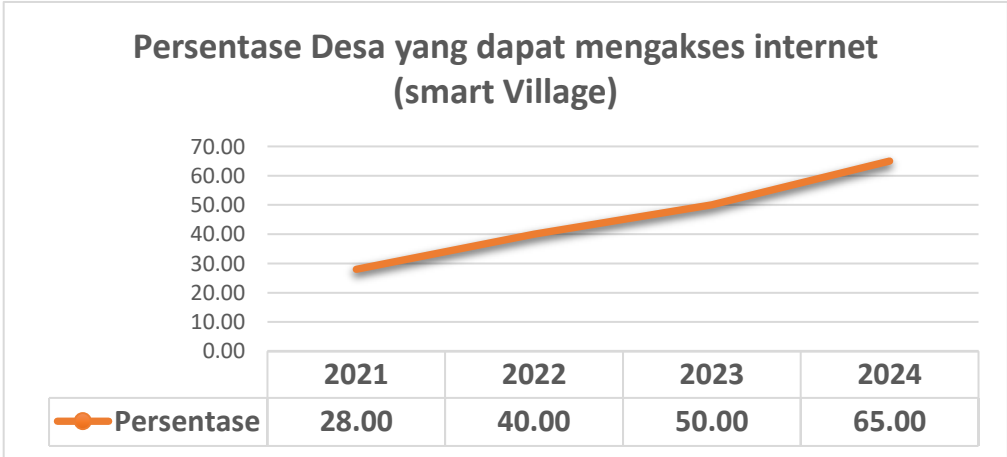
Target kinerja "**Persentase Desa yang dapat mengakses internet (Smart Village)**" tahun 2024 telah **terlampau**, dengan realisasi **65%** dari target **60%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **108.33%**. Hal ini menunjukkan adanya **perkembangan positif dalam pemerataan akses internet di desa-desa**, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Beberapa faktor yang dapat mendukung pencapaian ini antara lain:

- **Peningkatan infrastruktur telekomunikasi**, seperti pembangunan menara BTS dan perluasan jaringan fiber optik.
- **Dukungan kebijakan pemerintah dan kerja sama dengan penyedia layanan internet**, dalam memperluas jangkauan akses di daerah terpencil.
- **Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat desa terhadap teknologi digital**, mendorong adopsi layanan internet untuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.
- **Program Smart Village yang berjalan efektif**, dengan pengembangan layanan berbasis digital di desa.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.56 Perkembangan Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)



Sumber : Dinas ...

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.159 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	65.00	70.00	92.86

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli atau SDM yang kompeten dalam mengelola dan memelihara jaringan informasi di daerah terpencil.
- Gangguan teknis seperti kerusakan peralatan, gangguan sinyal, atau masalah jaringan yang tidak segera teratasi.
- Keterbatasan anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur jaringan informasi di desa-desa terpencil.

2. Faktor Pendukung

- Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui program-program seperti pembangunan jaringan internet desa atau program pemerataan akses informasi.
- Adanya infrastruktur jaringan informasi (seperti tower telekomunikasi, jaringan internet, atau jaringan komunikasi lainnya) yang sudah terbangun di beberapa wilayah.

3. Upaya/Solusi

- Meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di desa-desa terpencil
- Melakukan pelatihan bagi SDM lokal untuk mengelola dan memelihara jaringan informasi di desa mereka.
- Melakukan pemetaan wilayah-wilayah prioritas yang belum terjangkau jaringan informasi dan fokus pada pembangunan di wilayah tersebut.

3.2.31 SASARAN 31 : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Tabel 3.160 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 31

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase Rumah Layak Huni	%	77.50	69.93	90	Tinggi	Dinas PERKIM
2	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	60.00	11.81	20	Sangat Rendah	Dinas PERKIM
3	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60.00	43.57	73	Sedang	Dinas PERKIM
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 31					60.84	Rendah	

3.2.31.1 Persentase Rumah Layak Huni

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.161 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Rumah Layak Huni	%	77.50	69.93	90

Capaian untuk Indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni dengan target 77,50% realisasi 69,93% dengan capaian 90% berpredikat “Tinggi”, tapi belum mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan pada tahun 2024 masih kurangnya pegawai tenaga ahli dan teknis pada penangan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), adanya regulasi tentang penggunaan atau peruntukan anggaran DAK Tematik pengetasan pemukiman kumuh terpadu itupun dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang belum memenuhi syarat readiness criteria dan belum optimal peran serta aparat Desa dalam memberikan database dan informasi perkembangan rumah tidak layak huni.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Realisasi capaian kinerja indikator Persentase Rumah Layak Huni untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada pada tahun 2022 yakni mencapai 79%. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 69%, pada Tahun 2022 selain anggaran DAU atau APBD Kabupaten ada juga Anggaran APBD Provinsi dan APBN dalam pembangunan atau peningkatan rumah layak huni sedangkan pada Tahun 2023, 69% karena satu program kegiatan terdapat dua paket atau item pekerjaan bahkan lebih dalam satu desa dan beberapa paket pekerjaan fisik yang masuk pada APBD Perubahan yang tidak memenuhi progres fisik 100%.

Adapun perkembangan “Persentase Rumah Layak Huni” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas PERKIM

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni belum memenuhi target akhir RPJMD karena pembangunan dan peningkatan rumah layak huni selain anggaran DAU atau APBD Kabupaten ada juga anggaran DAK Tematik pengetasan pemukiman kumuh terpadu namun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman belum memenuhi syarat readiness criteria.

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Rumah Layak Huni” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.162 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Rumah Layak Huni	%	69.93	90.00	78

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli dan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Belum sepenuhnya pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum masih ada beberapa paket pekerjaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai 100% progress fisik;
- Perlu adanya peran serta pihak pengembang dan mayarakat desa dalam pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mencapai indikator kinerja tersebut;

2. Faktor Pendukung

- Adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemerintah Pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah

- Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, pembangunan dan Peningkatan rumah layak huni.
- Adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemerintah Provinsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah.
- Adanya bantuan perumahan dari Perusahaan dalam bentuk CSR
- Adanya bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Upaya/Solusi

- Perlu adanya tambahan pegawai tenaga ahli dan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pencapaian indicator kinerja tersebut,
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prasarana sarana dan utilitas umum dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Perlu adanya kolaborasi antara usulan Desa, Dinas dan Pokok pikiran DPRD.

3.2.31.2 Persentase Kawasan Pemukiman Layak Huni.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.163 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	60.00	11.81	20

Capaian untuk Indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dengan target 60% realisasi 11,81% dengan capaian 20% berpredikat “Sangat Rendah”, masih jauh untuk mencapai target, disebabkan pada tahun 2024 masih kurangnya pegawai tenaga ahli dan teknis pada penataan kawasan permukiman dan dokumen perencanaan atau data dukung yang masih di revisi untuk usulan atau penanganan kawasan kumuh.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Realisasi capaian kinerja indikator Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada pada tahun 2023 yakni mencapai 17%. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2021 yakni hanya sebesar 4 %, capaian kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada Tahun 2024 menurun 11,81%, karena selain SDM untuk menunjang kegiatan penataan kawasan permukiman masih terdapat dalam satu program kegiatan ada dua paket atau item pekerjaan bahkan lebih dalam satu desa sehingga dapat mempengaruhi alokasi anggaran pada indicator tersebut, dan beberapa paket pekerjaan fisik yang masuk pada APBD Perubahan yang tidak memenuhi progres fisik 100%.

Adapun perkembangan “Persentase Kawasan Pemukiman Layak Huni” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.58 Perkembangan Persentase Kawasan Pemukiman Layak Huni



Sumber : Dinas PERKIM

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni belum memenuhi target akhir RPJMD karena penataan kawasan permukiman layak huni membutuhkan dokumen perencanaan seperti Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten sementara ini direview untuk sesuaikan dengan matriks kementerian PUPR sehingga mempengaruhi capaian Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni terhadap target akhir RPJMD.

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Kawasan Pemukiman Layak Huni” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.164 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	11.81	70.00	17

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli dan teknis pada penataan kawasan permukiman layak huni untuk menata kawasan-kawasan permukiman kumuh.
- Adanya review dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten

2. Faktor Pendukung

- Adanya APBN dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Adanya APBD Pemerintah Provinsi untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Adanya bantuan dari Perusahaan dalam bentuk CSR
- Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan

3. Upaya/Solusi

- Perlu adanya tambahan pegawai tenaga ahli dan teknis penataan kawasan permukiman yang layak huni dalam pencapaian indicator kinerja tersebut,
- Perlu adanya pemerataan pembagian pagu pada item paket pekerjaan yang ditetapkan sesuai pada target lokasi yang belum tersentuh atau belum Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencapaian indikator kinerja tersebut
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Perlu adanya peran serta masyarakat dalam kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian indicator kinerja tersebut

3.2.31.3 Persentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.165 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60.00	43.57	73

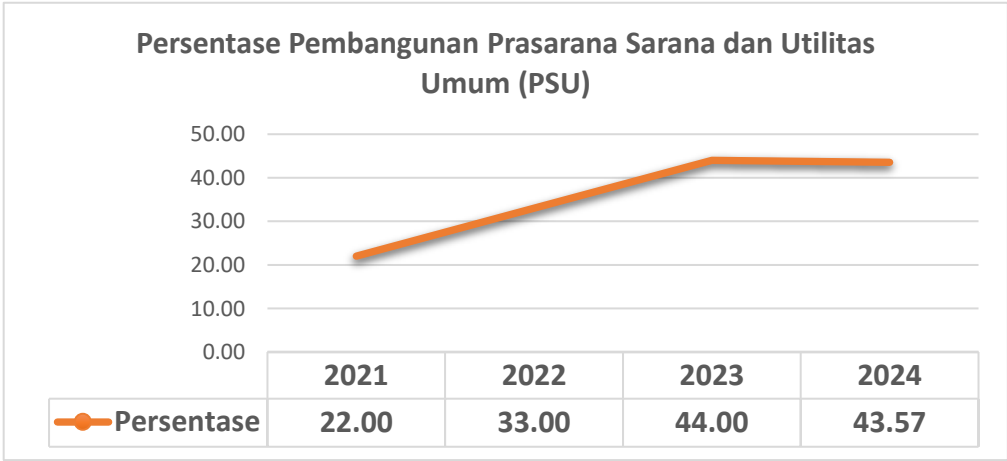
Capaian untuk Indikator kinerja Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan target 60% realisasi 43,57% dengan capaian 73% berpredikat “Sedang”, belum mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan pada tahun 2024 masih kurangnya pegawai tenaga ahli dan teknis pada penanganan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, belum secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dan ada beberapa paket pekerjaan fisik yang masuk pada APBD Perubahan yang tidak memenuhi progres fisik 100%.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Realisasi capaian kinerja indikator Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahun, namun terjadi penurunan pada Tahun 2024 sebesar 0,43% disebabkan beberapa paket pekerjaan fisik yang masuk pada APBD Perubahan yang tidak memenuhi progres fisik 100%.

Adapun perkembangan “Persentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.59 Perkembangan Persentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Sumber : Dinas PERKIM

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum belum memenuhi target akhir RPJMD karena kegiatan fisik yang masuk pada APBD Perubahan yang progres fisik tidak mencapai 100% dan kekurangan pegawai tenaga teknis bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Persentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.166 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	43.57	70.00	62

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli dan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Belum sepenuhnya pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum masih ada beberapa paket pekerjaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai 100% progress fisik;
- Perlu adanya peran serta pihak pengembang dan mayarakat desa dalam pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mencapai indikator kinerja tersebut;

2. Faktor Pendukung

- Terdapat perumahan dan kawasan perumahan yang dibangun pihak pengembang
- Termasuk atau bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat
- Adanya pokok pikiran (Pokir) DPRD hasil penjangingan aspirasi masyarakat melalui reses.
- Peran serta Masyarakat dalam usulan proposal prasarana jalan lingkungan, drainase lingkungan dan sarana rumah ibadah serta TPQ.

3. Upaya/Solusi

- Perlu adanya tambahan pegawai tenaga ahli dan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pencapaian indicator kinerja tersebut,
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prasarana sarana dan utilitas umum dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Perlu adanya kolaborasi antara usulan Desa, Dinas dan Pokok pikiran DPRD.

3.2.32 SASARAN 32 : MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN DAN KUALITAS AIR BERSIH SERTA AKSES SANITASI YANG LAYAK.

Tabel 3.167 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 32

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	70.00	56.54	81	Tinggi	BPS/Dinas PERKIM
2	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	80.00	50.62	63	Rendah	BPS/Dinas PERKIM
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 32					72.02	Sedang	

3.2.32.1 Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.168 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	70.00	56.54	81

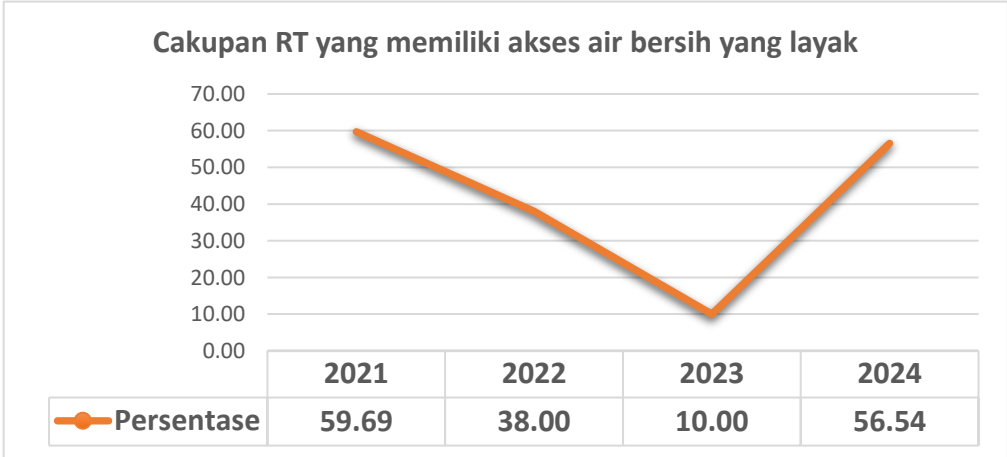
Capaian untuk Indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Air Bersih yang Layak dengan target 70% realisasi 56,54% dengan capaian 81% berpredikat “Tinggi”, tapi belum mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan pada tahun 2024 masih kurangnya pegawai tenaga ahli dan teknis pada penanganan pembangunan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan, adanya regulasi tentang penggunaan atau peruntukan anggaran DAK Air Minum dan belum optimal peran serta aparat Desa dalam memberikan database dan informasi perkembangan rumah tangga memiliki akses air bersih yang layak.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Realisasi capaian kinerja indikator Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Air Bersih yang Layak untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada pada tahun 2021 yakni mencapai 59,69%. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 10%, pada Tahun 2021 selain anggaran DAU atau APBD Kabupaten ada juga dari PDAM dalam sambungan rumah (SR), DAK Bidang Air Minum dan APBN untuk perluasan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di wilayah kabupaten Halmahera Selatan sedangkan pada Tahun 2023 dengan capaian realisasi 10% karena adanya program pembangunan infrastruktur pendukung Smart City menggunakan dana dengan pagu anggaran yang cukup besar yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran begitu juga regulasi DAK Bidang Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memenuhi syarat readiness criteria.

Adapun perkembangan “Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.60 Perkembangan Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak



Sumber : BPS/Dinas PERKIM

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Air Bersih yang Layak terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Air Bersih yang Layak belum memenuhi target akhir RPJMD karena tidak lagi menggunakan anggaran DAK pembangunan dan peningkatan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.169 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	56.54	90.00	63

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli dan teknis pada penanganan pembangunan dan peningkatan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan.
- Adanya regulasi tentang penggunaan atau peruntukan anggaran DAK pembangunan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan
- Belum Optimal peran serta aparat Desa dalam memenuhi database dan informasi perkembangan rumah tangga yang memiliki akses air bersih/minum

2. Faktor Pendukung

- Program Pemerintah Pusat Penurunan Stunting dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
- Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum.
- Adanya PDAM Kabupaten Halmahera Selatan.
- Adanya program CSR dari perusahaan
- Adanya Pemerintah Desa dengan Anggaran Dana Desa untuk penanganan Stunting

3. Upaya/Solusi

- Perlu adanya tambahan pegawai tenaga ahli dan teknis penanganan pembangunan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan dalam pencapaian indicator kinerja tersebut,
- Mengusulkan kepada TAPD untuk membahas usuluan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pemerataan pembagian pagu pada item paket pekerjaan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan prioritas yang sangat mendesak pada system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pemeliharaan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Perlu adanya peran serta aparat desa dalam kerjasama terkait pemeliharaan system penyedia air minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan yang telah terbangun dalam pencapaian indicator kinerja tersebut

3.2.32.2 Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.170 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	80.00	50.62	63

Capaian untuk Indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Sanitasi yang Layak dengan target 80% realisasi 50,62% dengan capaian 63% berpredikat “Rendah”, belum mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan pada tahun 2024 masih kurangnya pegawai tenaga ahli dan teknis pada penanganan pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik, adanya regulasi tentang penggunaan atau peruntukan anggaran DAK Bidang Sanitasi dan belum optimal peran serta aparat Desa dalam memberikan database dan informasi perkembangan rumah tangga memiliki akses sanitasi yang layak.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Realisasi capaian kinerja indikator Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Sanitasi yang Layak untuk beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada pada tahun 2021 yakni mencapai 68,40%. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 9%, pada Tahun 2021 selain anggaran DAU atau APBD Kabupaten ada juga dari

DAK Bidang Sanitasi di 17 Desa wilayah kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah 858 rumah tangga, sedangkan pada Tahun 2023 dengan capaian realisasi 9 % karena adanya program pembangunan infrastruktur pendukung Smart City menggunakan dana dengan pagu anggaran yang cukup besar dan regulasi DAK Bidang Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memenuhi syarat readiness criteria yang dapat mempengaruhi capaian indikator

Adapun perkembangan “Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.61 Perkembangan Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak



Sumber : BPS/Dinas PERKIM

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Sanitasi yang Layak terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Cakupan Rumah Taggga (RT) Memiliki Akses Sanitasi yang Layak belum memenuhi target akhir RPJMD karena tidak lagi menggunakan anggaran DAK Bidang Sanitasi.

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.171 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	50.62	90.00	56

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Kurangnya tenaga ahli dan teknis pada penangan pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik.
- Adanya regulasi tentang penggunaan atau peruntukan anggaran DAK Bidang Sanitasi
- Belum adanya PERDA terkait pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik
- Belum Optimal peran serta aparat Desa dalam memenuhi database dan informasi perkembangan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak

2. Faktor Pendukung

- Program Pemerintah Pusat Penurunan Stunting dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
- Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi.
- Adanya program CSR dari perusahaan
- Adanya Pemerintah Desa dengan Anggaran Dana Desa untuk penanganan Stunting

3. Upaya/Solusi

- Perlu adanya tambahan pegawai tenaga ahli dan teknis penanganan pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik dalam pencapaian indicator kinerja tersebut,
- Mengusulkan kepada TAPD untuk membahas usuluan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pemerataan pembagian pagu pada item paket pekerjaan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan prioritas yang sangat mendesak pada pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik untuk pencapaian indikator kinerja tersebut
- Menyusun PERDA terkait pengolahan dan pengembangan system air limbah domestic dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik dalam pencapaian indicator kinerja tersebut.
- Perlu adanya peran serta aparat desa dalam kerjasama terkait pengolahan dan pengembangan system air limbah domestik dalam pencapaian indicator kinerja tersebut

3.2.33 SASARAN 33 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG DI HALMAHERA SELATAN.

Tabel 3.172 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 33

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	72.00	81.09	110.00	Sangat Tinggi	Neraca Lingkungan
2	Presentase Timbunan Sampah yang Tertangani (%)	%	70.00	52.45	74.93	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	55.00	65.00	110.00	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 33					98.31	Sangat Tinggi	

3.2.33.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas lingkungan di suatu wilayah. IKLH biasanya mencakup berbagai parameter yang terkait dengan kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Tujuan dari pengukuran IKLH adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan di suatu daerah dan untuk membantu dalam perencanaan kebijakan serta upaya pelestarian lingkungan.

Secara umum, parameter yang sering digunakan dalam penghitungan IKLH meliputi:

- Kualitas Udara: Diukur dengan konsentrasi polutan seperti PM10, CO, NO2, SO2, dan O3.
- Kualitas Air: Meliputi parameter seperti pH, DO (dissolved oxygen), BOD (biological oxygen demand), COD (chemical oxygen demand), serta kandungan logam berat.
- Kualitas Tanah: Berdasarkan tingkat kesuburan, keberadaan bahan kimia berbahaya, serta kontaminasi.
- Keanekaragaman Hayati: Menilai keragaman spesies flora dan fauna di wilayah tersebut.
-

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.173 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	72.00	81.09	110.00

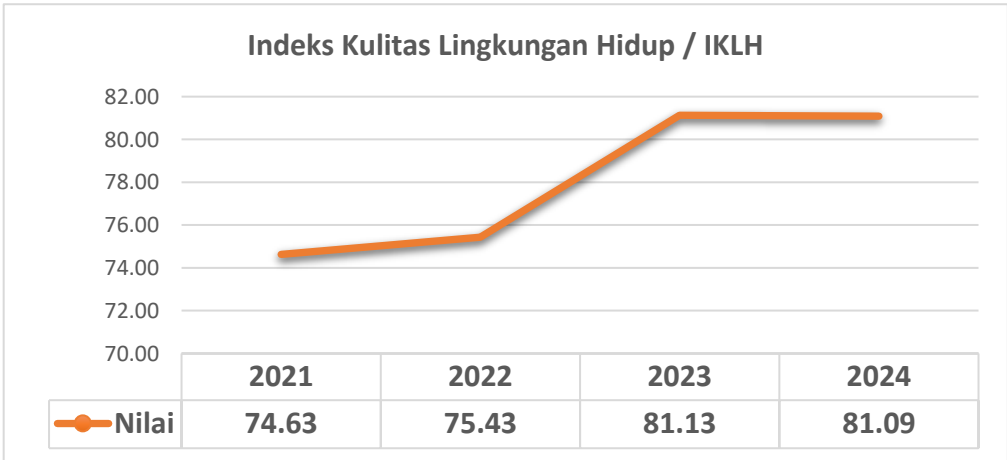
Dari tabel diatas dapat kita lihat pada Indikator Kinerja I Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan indeks realisasi 81.09 dari target yg diitetapkan adalah sebesar 72.00. Dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut didapat dari berbagai aspek pemantauan kualitas lingkungan diantaranya :

- Pemantauan Kualitas Udara
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan pemantauan kualitas udara sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam satu tahun dilakukan 2 kali kegiatan Pemantauan Kualitas Udara yang dimana sampel dari hasil pemantauan akan di uji oleh pihak laboratorium yang terakreditasi.
- Uji Kualitas Air
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan Pengujian Kualitas Air sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ada 14 titik Pengujian Kualitas Air yang dilakukan dan di uji oleh pihak Laboratorium yang terakreditasi.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.62 Perkembangan Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Pada Indikator Kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)" dengan indeks realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 81.13 dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 81.09, tetapi jika ditarik mundur jauh ke tahun-tahun sebelum yaitu pada tahun 2021, poin tersebut sudah mengalami banyak kenaikan sampai pada tahun 2024. Akan tetapi penurunan poin yang terjadi pada antara tahun 2023 sampai dengan 2024 disebabkan oleh menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA) pada wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sehingga mempengaruhi total capaian Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), tetapi dengan terjadinya penurunan poin Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH), hasil yang didapat masih melebihi dari target dan standar baku mutu yang telah ditetapkan.

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.174 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

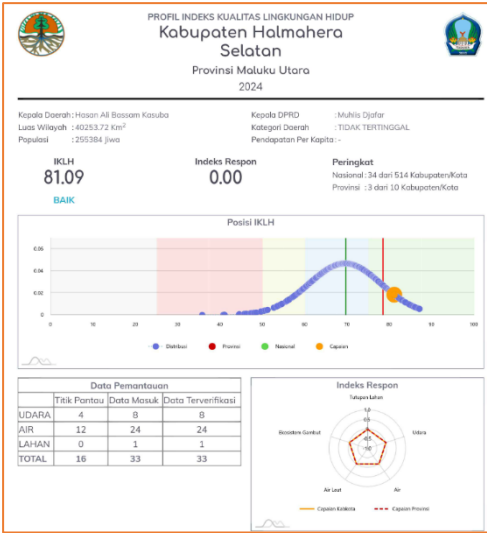
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	81.09	76.00	106.70

Berdasarkan dengan data yang tertuang pada tabel Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra, bahwa pada indikator I Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi tahun 2024 sudah mencapai bahkan melebihi target akhirRenstra pada tahun 2026. Targ et dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan nomor 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2029.

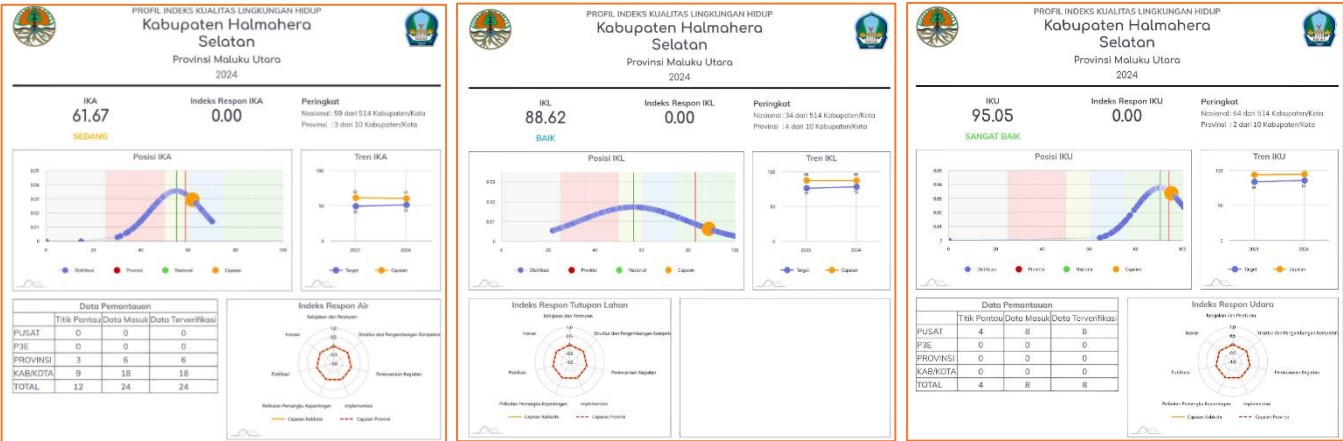
Indikator I Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Keberhasilan indikator Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan jumlah titik pantau untuk pengujian kualitas air Sungai, jumlah titik pemantauan kualitas udara dan tutupan lahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Peran aktif Masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting, limbah domestik yang selalu terukur dan dikontrol.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Table with 3 columns: Indikator, Parameter, Bobot. It lists indicators for Water Quality (Kualitas Air Sungai), Air Quality (Kualitas Udara), and Land Cover (Kualitas Tutupan Lahan) with their respective parameters and weights.



IKLH ada perubahan Metode Penghitungan Indeks yang semula IKLH kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) menjadi IKLH kabupaten = (IKA x 37,60%) + (IKU x 40,50%) + (IKL x 21,90%). Capaian indikator dan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dari Indeks Kualitas Air sebesar 61.67, Indeks Kualitas Udara sebesar 95.05, dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 88.62. Jadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 81.09 dari target 72.00 yang telah ditetapkan. Capaian tersebut jelas melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sektor Kabupaten di tahun 2024.



D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan bidang industri dan masyarakat umum terhadap pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan

2. Faktor Pendukung

- Sumber Daya Manusia SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

3. Upaya/Solusi

- Banyaknya individu/kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dapat dijadikan agen lingkungan akan tetapi masih belum mendapat dukungan program dan kegiatan

3.2.33.2 Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.175 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	70.00	52.45	74.93

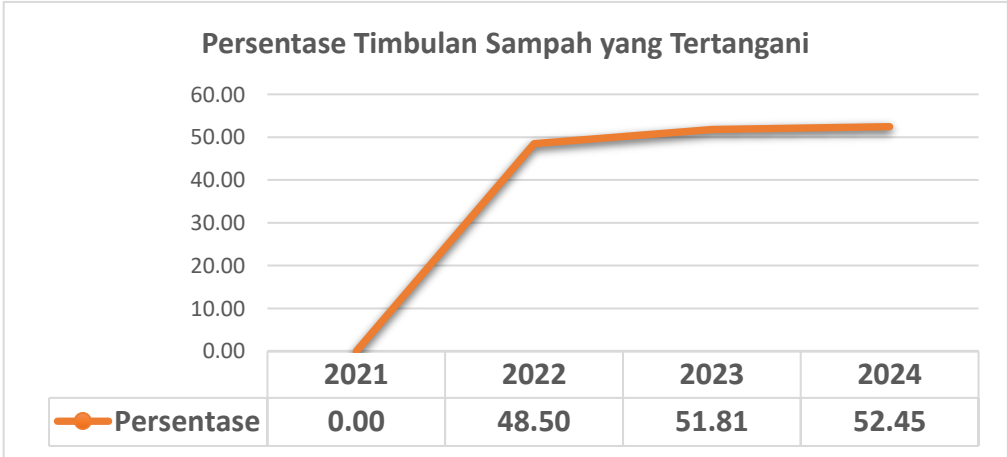
Dari tabel di atas Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mendapat capaian Kinerja 52.45% dari target yang ditetapkan adalah sebesar 70%. Perhitungan didapa berdasarkan pendekatan perhitungan sesuai SNI, bahwa perorang menghasilkan sampah per/hari adalah sebesar 0.4 kg/hari untuk kategori kota kecil. Volume sampah yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmehara Selatan melayani di 3 (tiga) Kecamatan. Tidak tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkan disebabkan dari beberapa faktor, semakin banyaknya event dan kurangnya armada pengangkut sampah seperti Dump Truck dan Truck Armroll dan belum optimalnya kelompok Masyarakat yang melakukan pengurangan sampah. Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan masih mendapatkan capaian kinerja dengan angka sebesar 74.92 yang masih termasuk dalam Predikat “Sedang”.

DATA TIMBULAN SAMPAH DAN PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024							
NO	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SAMPAH YANG DIHASILKAN KG/ORG/HARI	JUMLAH TOTAL SAMPAH YANG DIHASILKAN PER JIWA /KILO/HARI	JUMLAH HARI	JUMLAH SAMPAH YANG DIHASILKAN PER JIWA /KILO/ TAHUN	JUMLAH SAMPAH YANG DIHASILKAN PERTAHUN DI KONFERSI / TON/ TAHUN
1	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN YANG TERDIRI DARI 30 KECAMATAN 249 DESA	256.968	0,4	102.787	360	37.003.392	37.003
2	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DILAYANI DI 3 KECAMATAN 18 DESA	52.608	0,4	21.043	360	7.575.552	7.576
		20%		20%		20%	20%

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan *Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani* dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.63 Perkembangan Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian *Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.176 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Timbunan Sampah yang Tertangani (%)	%	52.45	80.00	65.56

Berdasarkan dengan data yang tertuang pada tabel Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir Renstra, bahwa pada indikator II Presentase Timbunan Sampah Tertangani dengan realisasi tahun 2024 belum mencapai target pada tahun berjalan bahkan target akhir Renstra pada tahun 2026. Target dari Presentase Timbunan Sampah Tertangani sebagaimana yang telah ditetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021 – 2026.

Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung ketercapaian Indikator Presentase Timbunan Sampah Tertangani sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
- Kurangnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus sampah tidak sebanding dengan cakupan luas penanganan sampah
- TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Marabose dengan kondisi saat ini yang overload Sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani diwilayah tertentu
- Minimnya ketersediaan teknologi pemrosesan sampah
- Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
- Belum optimalnya kelembagaan daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah
- Belum adanya ketegasan dalam penegakan hukum Lingkungan

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

2. Faktor Pendukung

- Sumber Daya Manusia SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

3. Upaya/Solusi

- Banyaknya individu/kelompok masyarakat dan stakeholder yang berminat untuk mengelola sampah di Kabupaten Halmahera Selatan

3.2.33.3 Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

Indikator ini mengukur sejauh mana penggunaan lahan di suatu wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi, seperti **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** atau **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**. Pemanfaatan lahan dianggap sesuai jika penggunaannya baik untuk permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, atau fungsi lainnya sesuai dengan zonasi dan ketentuan dalam dokumen tata ruang. Indikator ini penting untuk memastikan :

- **Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan**, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai.
- **Minimnya konflik tata ruang**, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
- **Efisiensi pemanfaatan lahan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.
- **Kepatuhan terhadap regulasi tata ruang**, termasuk izin dan kebijakan yang berlaku.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.177 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

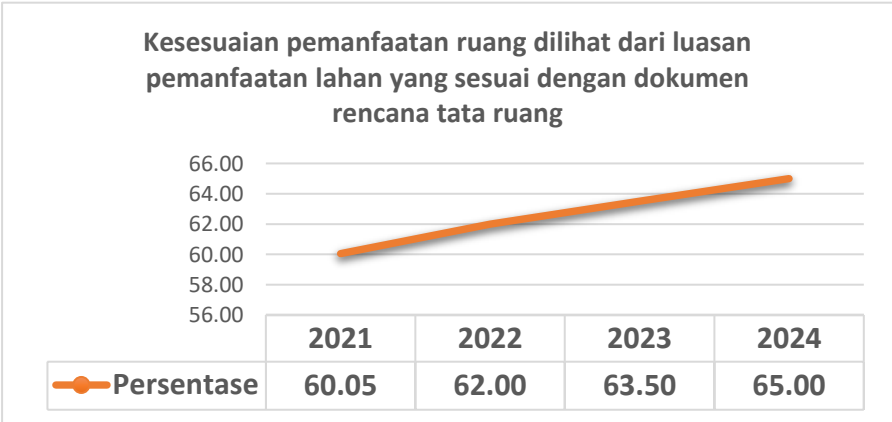
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	55.00	65.00	118.18

Target kinerja "Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang" tahun 2024 telah terlampaui, dengan realisasi **65%** dari target **55%**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **118.18%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera selatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.64 Perkembangan Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang



Sumber : Dinas PUPR

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.178 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	65.00	65.00	100.00

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Tidak Adanya Ketegasan Hukum Bagi Seorang Yang Melanggar Tata Ruang
- Perencanaan tata Ruang Selalu Didominasi Oleh Keputusan Politik

2. Faktor Pendukung

- Perencanaan tata Ruang yang Telah Memperhatikan Aspek Teknis

3. Upaya/Solusi

- Memberikan Sanksi Bagi Pelanggar Tata Ruang
- Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
- Merevisi Tata Ruang Wilayah Sesuai Akses Permintaan Tanpa Didominasi / Diintervensi Oleh Pihak2 lain

3.2.34 SASARAN 34 : MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI.

Tabel 3.179 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 34

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	50.00	Belum Ada Capaian	0.00	Belum Ada Capaian	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 34					0.00		

3.2.34.1 Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi

Permasalahan dari indikator ini adalah tidak dapat diukur karena jumlah kawasan transmigrasi sudah sangat berkurang, sehingga untuk penilaian perkembangan Kawasan transmigrasi mengalami kendala terutama pada saat pelaksanaan survei di lapangan.

3.2.35 SASARAN 35 : MENINGKATNYA APRESIASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA SERTA ADAT SEATORANG.

Tabel 3.180 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 35

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	85	61.00	71.76	Sedang	Dinas Parawisata dan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 35					71.76	Sedang	

3.2.35.1 Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan

Persentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional, dan Tradisi Budaya yang Mendapatkan Perlindungan dan Dilestarikan adalah indikator yang mengukur sejauh mana suatu daerah menjaga dan melestarikan warisan budayanya. Ini mencakup pelestarian benda cagar budaya, pengembangan kesenian tradisional, serta perlindungan terhadap tradisi lokal agar tidak punah atau tergerus oleh modernisasi. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah.

A. Capaian Tahun 2024

Tabel 3.181 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	85	61.00	71.76

Target kinerja "Persentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional, dan Tradisi Budaya yang Mendapatkan Perlindungan dan Dilestarikan" tahun 2024 **belum sepenuhnya tercapai**, dengan realisasi **61%** dari target **85%**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **71.76%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya anggaran, minimnya kesadaran masyarakat, terbatasnya regulasi perlindungan budaya, serta pengaruh modernisasi yang menyebabkan penurunan minat terhadap kesenian dan tradisi lokal.

Adapun pada tahun 2024 Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang dilestarikan dan mendapat perlindungan diantaranya tradisi budaya Popas Lipu dan Pawai Ofto.



B. Perbandingan Realisasi 2021-2024

Adapun perkembangan “Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan” dari tahun 2021-2024 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.65 Perkembangan Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Dari realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian “Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.182 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	61.00	90	67.78

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi/Upaya yang telah dilakukan

1. Faktor Permasalahan/Hambatan/Kendala

- Keterlibatan generasi muda dalam melestarikan dan melindungi warisan budaya yang masih lemah

2. Faktor Pendukung

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan melindungi warisan budaya

3. Upaya/Solusi

- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data terkait dengan Pegiat atau pelaku budaya (Pelaku seni atau sanggar, komunitas budaya, komunitas suku/etnis dll) hal ini untuk menertibkan data/administrasi dalam upaya pelestarian budaya adat seatorang
- Melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial yang melibatkan pegiat atau pelaku budaya

3.2.36 SASARAN 36 : MENINGKATNYA PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG BERKUALITAS.

Tabel 3.183 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 36

Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat	Sumber Data
1	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	65.00	Belum Ada Capaian	0.00	Belum Ada Capaian	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 36					0.00		

3.2.36.1 Persentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif

Permasalahan dari indikator ini adalah tidak dapat diukur karena kegiatan untuk mendukung indikator dimaksud sudah dialihkan menjadi kegiatan yang mendukung program di masing-masing kecamatan.

3.3. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran sesuai visi misi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, telah didukung dengan anggaran dari program/kegiatan pada APBD sebesar **Rp. 2.248.506.173.551** dengan rincian capaian realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.184 Alokasi dan Penyerapan Anggaran Program Per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1. Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan. 2. Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	- PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,191,563,200.00	2,190,060,695.00	99.93
			- PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57,483,990,777.00	58,479,241,367.00	101.73
			- PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72,790,000.00	55,440,000.00	76.16
			- PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	855,998,000.00	855,000,000.00	99.88
			- PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	99,105,000.00	99,105,000.00	100.00
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	- PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,742,861,750.00	4,520,848,196.00	95.32
			- PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	2,754,529,000.00	2,733,854,000.00	99.25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
		(WMK) kurang dari 24 jam (%)	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Resiko Bencana (IRB)	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	45,584,887,000.00	45,529,934,217.00	99.88
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%) 2. Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5,211,272,000.00	5,186,790,319.00	99.53
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	216,920,000.00	216,810,000.00	99.95
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	49,920,000.00	49,808,871.00	99.78
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%) 2. Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	620,000,000.00	429,736,440.00	69.31
			- PROGRAM PENCATATAN SIPIL	483,220,000.00	437,265,444.00	90.49
			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	393,009,200.00	325,597,680.00	82.85
			- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	42,750,000.00	42,750,000.00	100.00
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	1. Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%) 2. Persentase pengunjung perpustakaan (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284,478,000.00	281,093,619.00	98.81
			- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46,670,000.00	46,631,340.00	99.92
			- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	692,762,000.00	687,608,624.00	99.26
			- PROGRAM PERIZINANAN PENGGUNAAN ARSIP	183,354,900.00	182,240,000.00	99.39
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,421,645,000.00	3,257,921,215.00	73.68
			- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,858,788,700.00	1,797,333,428.00	96.69
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	1. Rerata Indeks Profesionalitas ASN	- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5,373,060,350.00	5,296,862,165.00	98.58
			- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300,000,000.00	299,989,040.00	100.00
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD 3. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	349,888,567,827.00	139,565,662,317.00	39.89
			- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11,801,562,000.00	5,945,860,244.00	50.38
			- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,552,803,000.00	3,279,795,200.00	92.32
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	1. Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	-			
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KABUPATEN KOTA	502,138,236.00	501,429,000.00	99.86
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,958,118,650.00	1,371,288,045.00	70.03
			- PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4,853,602,650.00	4,151,346,849.00	85.53
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	1. Indeks Inovasi daerah (IID)	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,630,967,800.00	1,591,442,000.00	97.58
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 2. Nilai LPPD Pemerintah Daerah 3. Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A 4. Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	710,297,510,057.00	661,673,207,130.83	93.15
			- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23,862,863,000.00	23,212,824,518.00	97.28
			- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,564,116,200.00	1,947,956,653.00	75.97
			- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23,010,703,600.00	22,802,256,283.00	99.09
15		1. Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan	- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,391,517,000.00	1,388,679,000.00	99.80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,392,162,300.00	2,327,914,490.00	97.31
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,779,392,950.00	1,777,981,450.00	99.92
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,614,360,300.00	2,603,696,000.00	99.59
			- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47,300,000.00	47,140,000.00	99.66
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Persentase desa mandiri (%) 2. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,534,467,000.00	1,519,566,320.00	99.03
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,709,713,000.00	1,705,925,053.00	99.78
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Presentase PMKS yang tertangani (%)	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,266,330,400.00	1,205,619,900.00	95.21
			- PROGRAM PENANGANAN BENCANA	55,208,000.00	24,930,000.00	45.16
			- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,286,089,500.00	1,276,605,750.00	99.26
			- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,560,840,000.00	1,505,408,250.00	96.45
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	435,567,350.00	433,314,470.00	99.48
			- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	600,000,000.00	588,624,025.00	98.10
			- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15,000,200.00	15,000,200.00	100.00
			- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	691,336,000.00	688,696,960.00	99.62
			- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99,922,000.00	98,421,120.00	98.50
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) 2. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	197,090,000.00	191,970,000.00	97.40
			- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	290,000,000.00	286,715,000.00	98.87
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	163,425,689,727.00	88,927,472,694.53	54.41
			- PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4,080,486,500.00	3,063,330,000.00	75.07
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (tahun) 2. Angka kesakitan (%) 3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	299,510,535,184.00	227,348,388,260.02	75.91
			- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34,073,994,500.00	33,582,569,312.00	98.56
			- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	326,356,450.00	326,082,330.00	99.92
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	745,056,750.00	216,995,771.00	29.12
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	635,184,000.00	634,500,750.00	99.89
			- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7,557,667,000.00	7,538,978,616.00	99.75
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,102,240,350.00	1,995,860,000.00	94.94
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 3. Presentase Kunjungan Wisatawan	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	568,897,100.00	567,052,179.00	99.68
			- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	600,081,950.00	598,339,169.00	99.71
			- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193,631,550.00	193,431,130.00	99.90
			- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,549,995,800.00	2,543,935,380.00	99.76
			- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,117,065,000.00	1,114,718,419.00	99.79
			- PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,988,726,000.00	2,988,726,000.00	100.00
			- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	65,300,000.00	65,300,000.00	100.00
			- PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	39,960,000.00	39,960,000.00	100.00
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13,054,399,300.00	13,005,681,400.00	99.63

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
		Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) 2. Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32,348,821,900.00	32,318,289,400.00	99.91
			- PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	494,805,000.00	484,671,999.00	97.95
			- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	420,140,000.00	419,970,000.00	99.96
			- PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	943,104,600.00	51,211,400.00	5.43
			- PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	205,000,000.00	204,939,000.00	99.97
			- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16,379,730,000.00	16,245,321,590.00	99.18
			- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,289,555,000.00	1,276,632,103.00	99.00
			- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	810,760,000.00	808,763,690.00	99.75
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	1. Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan 2. Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	701,165,000.00	701,125,000.00	99.99
			- PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	254,880,000.00	254,707,654.00	99.93
			- PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	396,601,000.00	396,481,000.00	99.97
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	1. Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas) 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	199,992,000.00	199,307,510.00	99.66
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,098,286,750.00	1,097,773,294.00	99.95
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	1. Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,734,384,250.00	1,704,051,180.00	98.25
			- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	141,693,200.00	140,065,000.00	98.85
			- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	106,478,000.00	93,759,650.00	88.06
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	1. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%) 2. Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%) 3. Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160,276,583,380.00	148,960,619,313.26	92.94
			- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,400,895,400.00	3,316,180,580.00	97.51
			- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,189,119,750.00	1,172,407,297.00	53.56
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	1. Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19,671,677,950.00	18,509,743,608.12	94.09
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	1. Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (smart City) 2. Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7,235,517,256.00	6,799,176,453.00	93.97
			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,320,027,500.00	5,195,943,463.39	97.67
			- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	565,190,000.00	563,937,703.00	99.78
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	1. Presentase Rumah Layak Huni 2. Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni 3. Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	852,400,000.00	844,460,969.00	99.07
			- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10,520,810,000.00	9,854,841,338.21	93.67
			- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	89,525,000,000.00	89,190,117,546.14	99.63
			- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	259,213,500.00	241,961,200.00	93.34
			- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4,106,504,290.00	3,563,958,673.29	86.79
			- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	816,578,550.00	813,405,449.28	99.61
			- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,828,595,000.00	2,538,126,386.68	89.73
			- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	49,627,949,317.00	42,252,090,951.91	85.14
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	1. Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	535,000,000.00	531,176,102.13	99.29

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
		2. Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300,000,000.00	299,671,600.31	99.89
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor) 2. Presentase Timbunan Sampah yang Tertangani (%) 3. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,908,891,650.00	1,683,365,293.00	88.19
			- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	446,750,000.00	444,380,200.00	99.47
			- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,819,715,550.00	6,819,247,058.00	99.99
			- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55,129,000.00	53,821,580.00	97.63
			- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	386,700,000.00	386,380,000.00	99.92
			- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49,410,000.00	49,078,000.00	99.33
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	98,610,000.00	98,610,000.00	100.00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	1. Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	212,838,000.00	212,016,736.00	99.61
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	179,876,700.00	178,842,850.00	99.43
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	1. Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3,058,664,000.00	3,056,964,884.00	99.94
			- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	245,039,000.00	243,175,130.00	99.24
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	1. Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	-			
TOTAL				2,248,506,173,551	1,805,753,289,134.10	80.31

TABEL 3.185 PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1. Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan. 2. Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESBANGPOL
			- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESBANGPOL
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESBANGPOL
			- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESBANGPOL
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN KESBANGPOL
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL-PP
			- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS DAMKAR DAN PENYELEMATAN
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Resiko Bencana (IRB)	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
4		1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	2. Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%) 2. Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
			- PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
			- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	1. Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%) 2. Persentase pengunjung perpustakaan (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			- PROGRAM PERIZINANAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
			- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	1. Rerata Indeks Profesionalitas ASN	- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
			- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD 3. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	1. Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	-	
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KABUPATEN KOTA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			- PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	1. Indeks Inovasi daerah (IID)	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah2. Nilai LPPD Pemerintah Daerah3. Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A4. Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	SELURUH PERANGKAT DAERAH
			- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
			- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
			- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	1. Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SELURUH KECAMATAN
			- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SELURUH KECAMATAN
			- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SELURUH KECAMATAN

			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SELURUH KECAMATAN SELURUH KECAMATAN
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Persentase desa mandiri (%) 2. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD DPMD
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Presentase PMKS yang tertangani (%)	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - PROGRAM PENANGANAN BENCANA - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP3 AKB DP3 AKB DP3 AKB DP3 AKB DP3 AKB
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) 2. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS PERTANIAN DAN KETPANG
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (tahun) 2. Angka kesakitan (%) 3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN RSUD DINAS KESEHATAN DAN RSUD DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern / modem contraceptive (mCPR)	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3 AKB DP3 AKB DP3 AKB
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 3. Presentase Kunjungan Wisatawan	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DISKOPERINDAG DISKOPERINDAG DISKOPERINDAG DISKOPERINDAG DISPARBUD DISPARBUD DISPARBUD DISPARBUD
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya) 2. Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS PERTANIAN DAN KETPANG

			- PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS PERTANIAN DAN KETPANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	1. Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan 2. Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPM PTSP DPM PTSP DPM PTSP
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	1. Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas) 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOPERINDAG DISKOPERINDAG
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	1. Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TRANSNAKER DINAS TRANSNAKER DINAS TRANSNAKER
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	1. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%) 2. Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%) 3. Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PUPR DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	1. Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUPR
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	1. Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City) 2. Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	1. Presentase Rumah Layak Huni 2. Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni 3. Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM DINAS PERKIM
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	1. Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak 2. Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERKIM DINAS PERKIM
33	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR

	hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	2. Presentase Timbunan Sampah yang Tertangani (%) 3. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	1. Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSNAKER
			- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSNAKER
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	1. Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPARBUD
			- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPARBUD
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	1. Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	-	

3.4. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sisa belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 442.752.884.416,90 atau terdapat efisiensi anggaran sebesar 19.69% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Hal dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.186 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER SASARAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PERUBAHAN		EFISIENSI ANGGARAN	
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH(RP)	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5/3*100)
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	60,703,446,977.00	61,678,847,062.00	- 975,400,085.00	-1.61
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	7,497,390,750.00	7,254,702,196.00	242,688,554.00	3.24
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	45,584,887,000.00	45,529,934,217.00	54,952,783.00	0.12
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	5,478,112,000.00	5,453,409,190.00	24,702,810.00	0.45
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1,538,979,200.00	1,235,349,564.00	303,629,636.00	19.73
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	1,207,264,900.00	1,197,573,583.00	9,691,317.00	0.80
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	6,280,433,700.00	5,055,254,643.00	1,225,179,057.00	19.51
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	5,673,060,350.00	5,596,851,205.00	76,209,145.00	1.34
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	365,242,932,827.00	148,791,317,761.00	216,451,615,066.00	59.26
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.				
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	502,138,236.00	501,429,000.00	709,236.00	0.14

12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	6,811,721,300.00	5,522,634,894.00	1,289,086,406.00	18.92
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	1,630,967,800.00	1,591,442,000.00	39,525,800.00	2.42
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	759,735,192,857.00	709,636,244,584.83	50,098,948,272.17	6.59
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	8,224,732,550.00	8,145,410,940.00	79,321,610.00	0.96
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	3,244,180,000.00	3,225,491,373.00	18,688,627.00	0.58
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4,168,467,900.00	4,012,563,900.00	155,904,000.00	3.74
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1,841,825,550.00	1,824,056,775.00	17,768,775.00	0.96
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	487,090,000.00	478,685,000.00	8,405,000.00	1.73
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	167,506,176,227.00	91,990,802,694.53	75,515,373,532.47	45.08
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	334,655,942,884.00	261,474,035,673.02	73,181,907,210.98	21.87
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	10,295,091,350.00	10,169,339,366.00	125,751,984.00	1.22
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	8,123,657,400.00	8,111,462,277.00	12,195,123.00	0.15
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	65,946,315,800.00	64,815,480,582.00	1,130,835,218.00	1.71
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	1,352,646,000.00	1,352,313,654.00	332,346.00	0.02
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	1,298,278,750.00	1,297,080,804.00	1,197,946.00	0.09
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	1,982,555,450.00	1,937,875,830.00	44,679,620.00	2.25
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	165,866,598,530.00	153,449,207,190.26	12,417,391,339.74	7.49
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	19,671,677,950.00	18,509,743,608.12	1,161,934,341.88	5.91
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	13,120,734,756.00	12,559,057,619.39	561,677,136.61	4.28
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	158,537,050,657.00	149,298,962,514.51	9,238,088,142.49	5.83
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	835,000,000.00	830,847,702.44	4,152,297.56	0.50
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	9,765,206,200.00	9,534,882,131.00	230,324,069.00	2.36
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	392,714,700.00	390,859,586.00	1,855,114.00	0.47
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	3,303,703,000.00	3,300,140,014.00	3,562,986.00	0.11
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas				
TOTAL		2,248,506,173,551	1,805,753,289,134.10	442,752,884,416.90	19.69

BAB IV



BAB IV

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance), serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 69 (enam puluh Sembilan) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Selatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 34 Indikator atau 49,28% Kategori Sangat Tinggi (Capaian $91\% \leq 100\%$)
- 7 Indikator atau 10.14% Kategori Tinggi (Capaian $76\% \leq 76\%$);
- 7 Indikator atau 10.14% Kategori Sedang (Capaian $66\% \leq 75\%$)
- 6 Indikator atau 8.70% Kategori Rendah (Capaian $51\% \leq 65\%$)
- 10 Indikator atau 14.49% Kategori Sangat Rendah (Capaian $\leq 50\%$)

Terdapat 5 (lima) Indikator yang belum dapat diukur pada tahun 2024 (capaian dibawah 0%) yaitu :

1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah

Permasalahan : tidak dapat diukur karena belum ada Rilis dari Kemendagri RI

2. Rata-Rata Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan (30 kecamatan)

Permasalahan : tidak dapat diukur karena pelaksanaan evaluasi oleh OPD terkait belum dilakukan dan belum ada acuan yang jelas tentang proses evaluasi perkembangan kecamatan.

3. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat

Permasalahan : tidak dapat diukur karena tidak terakomodirnya anggaran untuk kegiatan cadangan pangan.

4. Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi.

Permasalahan : tidak dapat diukur karena jumlah kawasan transmigrasi sudah sangat berkurang, sehingga untuk penilaian perkembangan Kawasan transmigrasi mengalami kendala terutama pada saat pelaksanaan survei di lapangan.

5. Persentase Kelompok-kelompok Pembelajaran Agama Yang Aktif.

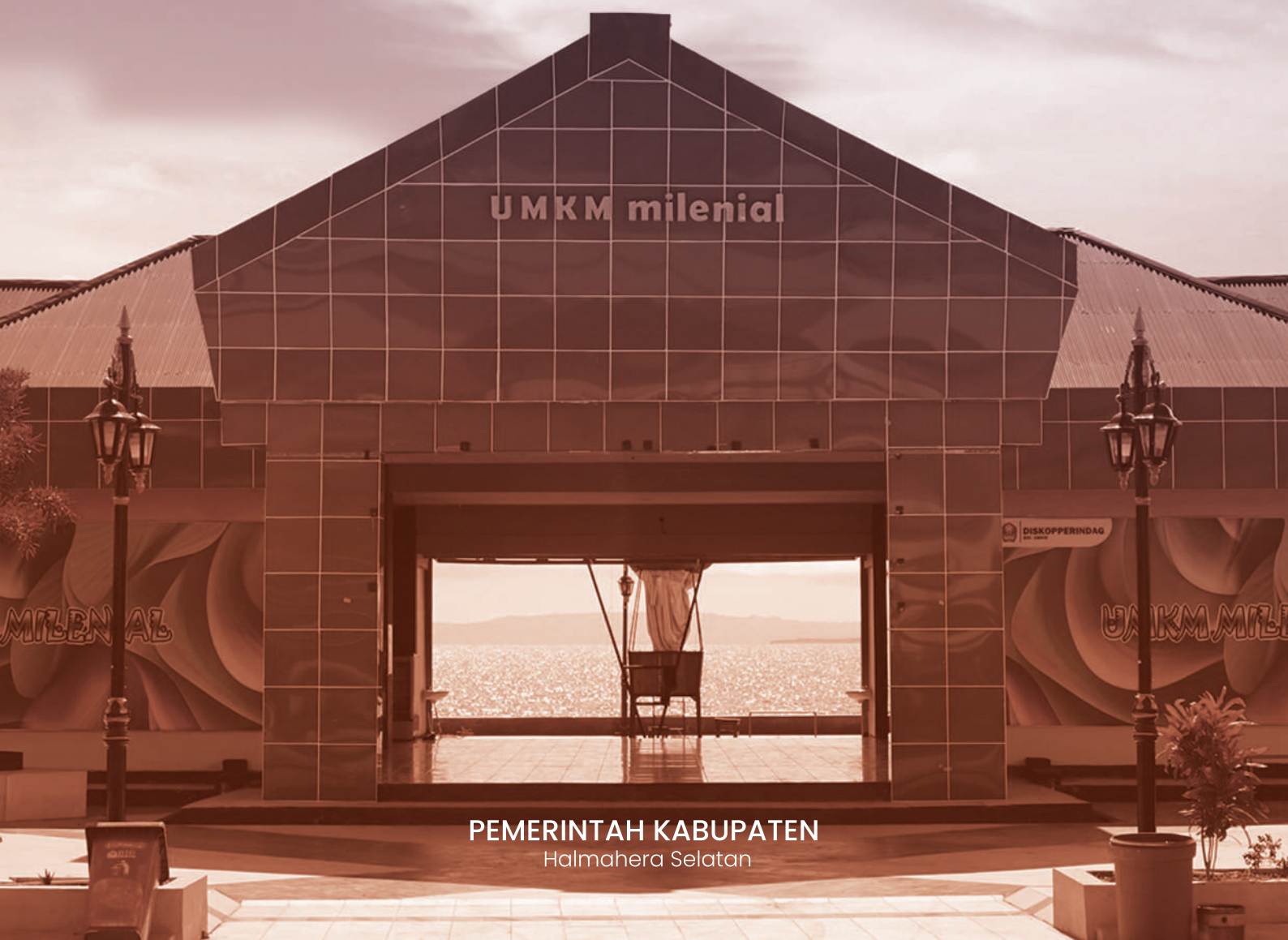
Permasalahan :

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan didukung dengan alokasi anggaran anggaran dalam APBD/-P Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebesar Rp.2.248.506.173.551,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.805.753.289.134,10 atau 80,31%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 sebagai tahun keempat dalam RPJMD kabupaten Halmahera selatan tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 belum terpenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Pada tahun 2024. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan motivasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN
Halmahera Selatan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIJP)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Labuha, 20 Maret 2025


PIH INSPEKTUR

ILHAM ABUBAKAR, SH
Pembina Tk. 1
NIP. 19690307 200212 1008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

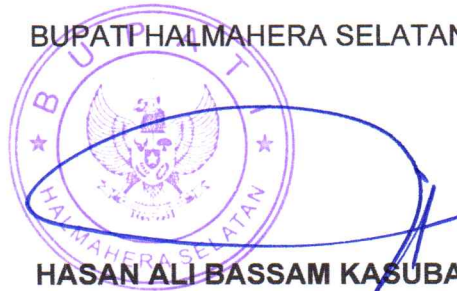
N A M A : HASAN ALI BASSAM KASUBA
JABATAN : BUPATI HALMAHERA SELATAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Labuha, September 2024

BUPATI HALMAHERA SELATAN


HASAN ALI BASSAM KASUBA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	1	Indeks demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	%	62.10
		2	Presentase Potensi Gangguan Konflik yang tertangani (%).	%	90.00
2	Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	71.00
		4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	%	40
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	5	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0.35
		6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	-	205.60
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	%	50.00
		8	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet	3
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	9	Presentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	%	90.00
		10	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA (%)	%	30.00
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	11	Tingkat pengelolaan arsip secara baku (%)	%	70.00
		12	Persentase pengunjung perpustakaan (%)	%	45.00
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	50.00
		14	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	%	80.00
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	15	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	-	74.00
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	75.00
		17	Presentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	10.50
		18	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	45.00
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	19	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	10.00
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPD)	%	80.00
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	22	Indeks Inovasi daerah (IID)	-	501
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	23	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	A
		24	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	-	3.75
		25	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	60
		26	Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	90

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	27	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	%	45.00
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	28	Persentase desa mandiri (%)	%	8.03
		29	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	%	59.03
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30	Presentase PMKS yang tertangani (%)	%	75.00
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	58
		32	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	11
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	33	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	-	82.50
		34	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	80.00
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	35	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.60
		36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.07
		37	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	17.50
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	66.57
		39	Angka kesakitan (%)	%	4.00
		40	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	85.00
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61
		42	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	81.00
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	43	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33.75
		44	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14.75
		45	Presentase Kunjungan Wisatawan	%	60
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	46	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Budidaya)	Ton	65,275.29
		47	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	42,208.69
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	48	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Milyar Rp	300
		49	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	100
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	50	Persentase koperasi Aktif dan Volume usahanya meningkat (koperasi yang berkualitas)	%	47.50
		51	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang aktif dan volume usahanya meningkat / Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	65.00
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	52	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihanberbasis kompetensi) (%)	%	40.00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	53	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / mantap (%)	%	36.00
		54	Persentase sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	%	80.00
		55	Presentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	75.00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)		Satuan	Target 2024
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	56	Presentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	65.00
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	57	Presentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajmen (SIM) dan WEB (smart City)	%	55.00
		58	Presentase Desa yang dapat mengakses internet (smart Village)	%	60.00
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	59	Presentase Rumah Layak Huni	%	77.50
		60	Presentase Kawasan Pemukiman Layak Huni	%	60.00
		61	Presentase Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60.00
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	62	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	70.00
		63	Cakupan RT yang memiliki sanitasi yang layak	%	80.00
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	64	Indeks Kulitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	-	72.00
		65	Presentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	%	70.00
		66	Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	%	55.00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	67	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi prioritas yang direvitalisasi	-	50.00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	68	Presentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	85
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	69	Presentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif.	%	65.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2,191,563,200.00
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57,483,990,777.00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	72,790,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	855,998,000.00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	99,105,000.00
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,742,861,750.00
7	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,754,529,000.00
8	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	45,584,887,000.00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5,211,272,000.00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	216,920,000.00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	49,920,000.00
12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	620,000,000.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
13	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	483,220,000.00
14	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	393,009,200.00
15	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	42,750,000.00
16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284,478,000.00
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46,670,000.00
18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	692,762,000.00
19	PROGRAM PERIZINANAN PENGGUNAAN ARSIP	183,354,900.00
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,421,645,000.00
21	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,858,788,700.00
22	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5,373,060,350.00
23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300,000,000.00
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	349,888,567,827.00
25	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11,801,562,000.00
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,552,803,000.00
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KABUPATEN KOTA	502,138,236.00
28	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,958,118,650.00
29	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4,853,602,650.00
30	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,630,967,800.00
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	710,297,510,057.00
32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23,862,863,000.00
33	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,564,116,200.00
34	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23,010,703,600.00
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,391,517,000.00
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,392,162,300.00
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,779,392,950.00
38	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,614,360,300.00
39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47,300,000.00
40	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,534,467,000.00
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,709,713,000.00
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,266,330,400.00
43	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	55,208,000.00
44	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,286,089,500.00
45	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,560,840,000.00
46	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	435,567,350.00
47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	600,000,000.00
48	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15,000,200.00
49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	691,336,000.00
50	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99,922,000.00
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	197,090,000.00
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	290,000,000.00
53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	163,425,689,727.00
54	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4,080,486,500.00
55	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	299,510,535,184.00
56	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34,073,994,500.00
57	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	326,356,450.00
58	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	745,056,750.00
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	635,184,000.00
60	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7,557,667,000.00
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,102,240,350.00
62	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	568,897,100.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
63	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	600,081,950.00
64	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193,631,550.00
65	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,549,995,800.00
66	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,117,065,000.00
67	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,988,726,000.00
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	65,300,000.00
69	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	39,960,000.00
70	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13,054,399,300.00
71	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32,348,821,900.00
72	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	494,805,000.00
73	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	420,140,000.00
74	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	943,104,600.00
75	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	205,000,000.00
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16,379,730,000.00
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,289,555,000.00
78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	810,760,000.00
79	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	701,165,000.00
80	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	254,880,000.00
81	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	396,601,000.00
82	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	199,992,000.00
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,098,286,750.00
86	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,734,384,250.00
87	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	141,693,200.00
88	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	106,478,000.00
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160,276,583,380.00
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,400,895,400.00
91	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,189,119,750.00
92	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19,671,677,950.00
93	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7,235,517,256.00
94	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,320,027,500.00
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	565,190,000.00
96	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	852,400,000.00
97	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10,520,810,000.00
98	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	89,525,000,000.00
99	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	259,213,500.00
100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4,106,504,290.00
101	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	816,578,550.00
102	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,828,595,000.00
103	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	49,627,949,317.00
104	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	535,000,000.00
105	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300,000,000.00
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,908,891,650.00
107	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	446,750,000.00
108	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,819,715,550.00
109	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55,129,000.00
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	386,700,000.00
111	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49,410,000.00
112	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	98,610,000.00
113	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	212,838,000.00
114	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	179,876,700.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
115	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3,058,664,000.00
116	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	245,039,000.00
TOTAL ANGGARAN BELANJA DAERAH		2,248,506,173,551

Labuha, September 2024

BUPATI HALMAHERA SELATAN



HASAN ALI BASSAM KASUBA



**PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN**

